



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2022**

**BADAN POM RI • BALAI BESAR POM DI JAKARTA • 2022**

**JALAN AS'SYAFIYAH NO.133 RT 03/RW 03, CILANGKAP, CIPAYUNG, JAKARTA, 13870**

**TELP: 021-84304046 • FAKS: 021-84304047 • SUREL: [bpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bpom_jakarta@pom.go.id)/[bbpomjkt@gmail.com](mailto:bbpomjkt@gmail.com)**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua oleh Allah, Tuhan Semesta Alam.*



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk **Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2022**. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2022 untuk periode rencana strategis 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, Februari 2023

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2022. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022, telah ditetapkan 11 sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; dan
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2022 diukur terhadap **29 indikator kinerja utama** yang dicapai. Pada tahun 2022, dari 29 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 22 indikator mencapai target dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (100% ≤ x ≤ 120%) dengan kesimpulan “Efektif”**, 7 indikator mencapai kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi” (80% ≤ x < 100%) dengan kesimpulan “Kurang Efektif”** dan

1 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**” (> 120%). Adapun pada tahun 2022, semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta sudah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | CAPAIAN (NPS) | KRITERIA                  |
|-----|--|---------------|---------------------------|
| 1.  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | 96,55         | Tidak Memenuhi Ekspektasi |
| 2.  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                  | 104,64        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 3.  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 106,21        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 4.  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta            | 104,64        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 5.  | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                       | 109,75        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 6.  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                     | 100,17        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7.  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                                 | 99,68         | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8.  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal  | 104,12        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 9.  | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | 104,16        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 10. | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan  | 115,99        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 11. | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel  | 99,29         | Tidak Memenuhi Ekspektasi |

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp43.705.622.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2022 sebesar

Rp43.586.926.108 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,73%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang dan ilegal (termasuk obat dan makanan palsu) melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat, diantaranya adalah Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi);
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan Kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kerja Balai Besar POM di Jakarta.

# HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan, khususnya wilayah provinsi DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan terobosan di tahun 2022 sebagai berikut:

## 1. ***Recover Together, Recover Stronger***: Partisipasi Badan POM dan Balai Besar POM di Jakarta Dalam Rangka Tugas *Food-Security* di Acara Pertemuan Delegasi G20



Kelompok Duapuluh atau G20 merupakan suatu aliansi yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa (*European Union*), termasuk Indonesia yang tergabung di dalamnya dan menjadi tuan rumah dalam acara G20 yang diselenggarakan tahun ini. G20

secara resmi dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum diskusi antar pemerintah yang membahas tentang isu-isu penting perekonomian di dunia, termasuk isu penting yang dibahas pada pertemuan G20 tahun ini adalah arsitektur kesehatan global (*global health architecture*), transformasi digital (*digital transformation*) serta transisi energi berkelanjutan (*sustainable energy transition*). Lebih lanjut, isu mengenai keamanan pangan global juga turut menjadi topik yang dibahas dalam G20 kali ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan slogan "*Recover Together, Recover Stronger*", perekonomian dunia diharapkan dapat kembali pulih dan bangkit akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sebagai instansi pemerintah yang turut berkontribusi dalam perkembangan sektor perekonomian di Indonesia, khususnya pengawasan obat dan makanan yang beredar, Badan POM bersama dengan unit pelaksana teknis Balai Besar POM di Jakarta turut mengambil langkah partisipatif dengan melakukan kegiatan *food-*

*security* (keamanan pangan), yaitu inspeksi sarana dan fasilitas dapur produksi serta pengujian sampel makanan yang akan dihidangkan untuk para delegasi G20. Inspeksi dan pengujian sampel makanan berlangsung di tiga lokasi utama, yaitu Jakarta Convention Center, Hutan Kota Plataran dan Hotel Fairmont. Kegiatan *food-security* ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 17-18 Februari 2022.

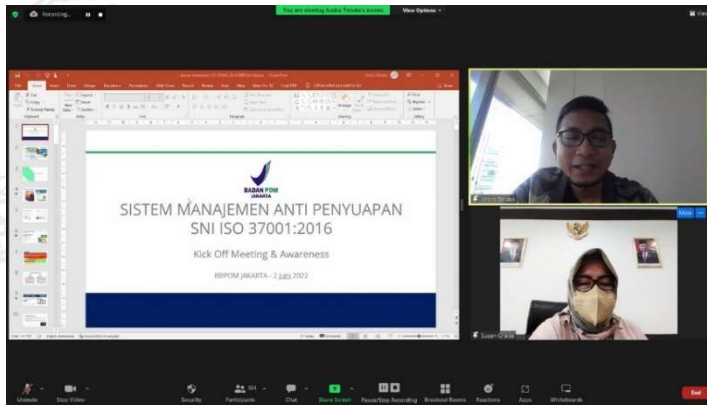
## 2. Laron Baja Raih Penghargaan, Wujud Sinergi Nyata Dengan Bea Cukai



Layanan LARON BAJA kembali mendapatkan penghargaan. Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru dalam acara *coffee morning* sosialisasi pemaparan janji layanan dan standar pelayanan Bea Cukai Pasar Baru yang diselenggarakan di Aula Bea Cukai Pasar Baru, Kamis 12 Mei 2022. Dalam sambutannya, Kepala Kantor

Bea Cukai Pasar Baru, Setiaji Tenggamus menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas sinergi, dukungan, dan kerja sama yang baik dalam pengelolaan barang kiriman impor. Penghargaan tersebut diterima oleh Koordinator Kelompok Substansi Penindakan mewakili Kepala Balai Besar POM di Jakarta. LARON BAJA merupakan upaya BBPOM di Jakarta yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Pasar Baru dalam melakukan pengawasan barang kiriman untuk penggunaan pribadi. Dengan layanan tersebut, BBPOM di Jakarta hadir dalam upaya untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan mana serta menjaga daya saing produk lokal. Pemberian penghargaan tersebut diyakini sebagai dukungan untuk peningkatan kerja sama, kualitas layanan, dan sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jakarta.

### 3. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 BBPOM di Jakarta Sebagai Bentuk Komitmen Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2020. Prestasi ini menjadi pendorong untuk terus menguatkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi dan

melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja dalam melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan diantaranya Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 2 Juni 2022 dihadiri oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber Auditor SNI ISO 37001:2016 tersertifikasi, Andra Tetuko.

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan., Apt., M.Si dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa komitmen WBK tetap harus dijaga implementasinya dan terus memperkuat performa menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani salah satunya melalui penerapan SMAP. Kegiatan berjalan lancar dan interaktif dengan semangat dan komitmen seluruh pegawai untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan pendampingan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang akan dilanjutkan dengan dokumentasi, audit internal dan sertifikasi yang diperkirakan selesai pada Oktober 2022 untuk memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

#### **4. BBPOM di Jakarta Melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Komisi IX DPR RI**

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan obat dan makanan Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 bertempat di Jakarta Pusat.



Dalam kesempatan tersebut Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si menyampaikan pentingnya memilih pangan yang halal dan baik. Cara mengetahui pangan tersebut baik atau tidak dengan cara CEK KLIK (Cek Kemasan, Label,

Izin Edar, dan Kedaluarsa). Selain itu, pada kegiatan KIE tersebut Kepala BBPOM di Jakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi Yayan Cahyani S.Si, Apt menyampaikan materi terkait Keamanan Obat dan Makanan serta menekankan bagaimana peran serta masyarakat dalam keikutsertaannya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat juga turut berpartisipasi secara langsung untuk mempraktikkan pengecekan Nomor Izin Edar BPOM pada produk obat dan makanan melalui aplikasi BPOM Mobile.

#### **5. Rekomendasi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Balai Besar POM di Jakarta**

Balai Besar POM di Jakarta telah meraih predikat dari Kementerian PAN RB sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Prestasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan penguatan pengawasannya agar semangat dan konsistensi anti korupsi terus menyala. Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si menginisiasi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 di Balai Besar POM di Jakarta. Rangkaian

kegiatan telah berlangsung sejak 2 Juni 2022 yang dimulai dengan Awareness SMAP kepada seluruh pegawai, pendampingan intensif kepada tim SMAP untuk pembuatan dokumen selama bulan Juni-Agustus 2022 serta *Refreshment* dan Sosialisasi Dokumen Mutu SMAP kepada seluruh pegawai pada 13 September 2022.



Tahapan yang dilaksanakan untuk persiapan implementasi SMAP telah memadai untuk dapat memasuki tahapan akhir yaitu Audit Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 September 2022

untuk Audit Stage 1 dan 15 September 2022 untuk Audit *Stage 2* secara daring dengan lembaga sertifikasi PT Garuda Sertifikasi Indonesia. Hasil Audit adalah merekomendasikan BBPOM di Jakarta untuk memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 setelah memperbaiki hasil audit berupa 1 temuan minor.

## **6. Audit Surveilan 9001:2015 Sebagai Bentuk Komitmen dan Konsistensi Sistem Manajemen Mutu**

Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan telah diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015 dan akreditasi SNI ISO 17025:2017, proses bisnis di BBPOM di Jakarta telah direncanakan, dilaksanakan dan dimonitor kesesuaiannya dengan standar internasional. Untuk menjaga konsistensi ini, dilaksanakan audit surveilan ISO 9001:2015 pada tanggal 16 September 2022 secara daring dengan tim auditor dari PT Sucofindo yang terdiri dari 5 auditor yang dipimpin Bapak Holys.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si menyampaikan berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian Sistem Manajemen Mutu seraya terus meningkatkan kinerja agar

mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hasil pencapaian unit kerja yang memiliki daya ungkit berupa penghargaan yang diperoleh oleh individu maupun unit di tingkat BPOM maupun dari pihak eksternal sesuai ruang lingkup audit dipaparkan oleh Kepala BBPOM di Jakarta sebagai aspek positif yang berhasil diraih BBPOM di Jakarta.



Audit berjalan dengan efektif, efisien dan lancar tanpa kendala teknis yang berarti. Tim Manajemen Mutu BBPOM di Jakarta secara aktif dan kooperatif memberikan dokumen yang dibutuhkan dan menjawab pertanyaan yang diajukan auditor dengan sebaik baiknya. Berdasarkan audit yang dilaksanakan, Tim Auditor menetapkan bahwa tidak ada temuan dan observasi pada sistem mutu BBPOM di Jakarta dan Balai Besar POM di Jakarta masih menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan memadai dan konsisten. Tim audit merekomendasikan Balai Besar POM di Jakarta untuk tetap mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 sampai periode audit selanjutnya serta mengapresiasi 10 (sepuluh) prestasi BBPOM di Jakarta sebagai Aspek Positif.

#### **7. Perkuat Inovasi Layanan Publik Dengan Pagelaran Semarak Inovasi Obat dan Makanan Punya Kite BBPOM di Jakarta (*Passionate Jakarta*)**

Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Reformasi Birokrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada pengajuan pertama di Tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, BBPOM di Jakarta telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempermudah akses dan mendekatkan kepada masyarakat. Untuk memperkuat inovasi pelayanan publik yang telah dibangun, diselenggarakan Pagelaran Semarak Inovasi Obat dan Makanan Punya Kite BBPOM Jakarta (*Passionate Jakarta*) pada Kamis (22/09/2022) bertempat di Hotel Holiday Inn Suites dengan mengundang berbagai *stakeholder* di Provinsi DKI Jakarta serta

pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan sebagai mitra dan penerima manfaat inovasi pelayanan publik yang telah dibangun.



Pada sambutan pembukaannya, Kepala BBPOM di Jakarta, Susan Gracia Arpan, menyatakan bahwa BBPOM di Jakarta senantiasa berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan inovasi pelayanan publik dan sekaligus dilakukan launching inovasi-inovasi meliputi UMKM

Jawara, Jak Officer, Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling Jakarta), Sultan Betawi (Loket Konsultasi dan Layanan Informasi Sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta), Portal JakDigital, Sipiket (Sistem Pemantauan Sampel Pihak Ketiga), ISO 37001 (Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan), Monstera (*Biomolecular Testing of Pathogenic Bacteria*), dan Jak-ILC (*Jakarta Inter laboratory Comparison*).

*Stakeholder* yang hadir turut memberikan testimoni dan dukungan terhadap upaya BBPOM di Jakarta dalam perkuatan inovasi pelayanan publik antara lain Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo; Wakil Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto; Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara. Selain itu, diserahkan pula Nomor Izin Edar dan Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang dikeluarkan BBPOM di Jakarta kepada sarana UMKM Obat dan Makanan, yaitu Sambal Mbak Pintul, Kairo Foods, Naglasui, ALK Food, PT Tambang Digital Internasional, CV Dharma Kosmetik, Ade Pie, Wiwiek Wiral, dan CV Ain Elghur. Pada kegiatan ini, dilakukan pula penandatanganan komitmen zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melibatkan Badan POM, lintas sektor dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kepolisian, organisasi profesi dan UMKM.

Di akhir rangkaian kegiatan, dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan, masukan dan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima dari BBPOM Jakarta. Terdapat tiga standar pelayanan publik BBPOM di Jakarta meliputi Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Layanan Sertifikasi, dan Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak Ketiga. Sebagai hasil FKP ini diperoleh masukan dari penanggap perwakilan asosiasi, Wakil Ketua IAI, Atu Kurnia; perwakilan akademisi, Direktur Politeknik Kemenkes Jakarta II, Djoko Sulisty; dan perwakilan pengguna layanan, UMKM Ain Elghur, Nizam Liza. Setelah itu, telah ditandatangani bersama Berita Acara Hasil FKP Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta tahun 2022.

Dengan telah terselenggaranya *Passionate* Jakarta ini diharapkan dapat memberikan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan publik BBPOM di Jakarta serta memberikan apresiasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang telah bersinergi untuk mewujudkan Obat dan Makanan aman di wilayah Provinsi DKI Jakarta seraya terus menguatkan semangat meraih WBBM yang menjadi target capaian BBPOM di Jakarta pada tahun 2023.

## 8. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016



Balai Besar POM di Jakarta senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggung jawab predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN RB kepada Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2020, dilaksanakan implementasi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Setelah melewati rangkaian persiapan, sosialisasi dan audit sertifikasi, pada awal

Oktober 2022, BBPOM di Jakarta menerima Sertifikat Implementasi SMAP. Hal ini merupakan bukti kesungguhan Kepala BBPOM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si untuk bersama sama jajaran BBPOM di Jakarta menciptakan unit kerja yang bebas dari penyuaipan dan praktek KKN yang melanggar kode etik. Implementasi SMAP menjadi salah satu bahan pada studi tiru oleh Balai POM di Gorontalo pada 13 Oktober 2022. Kepala Balai POM di Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt., MM beserta tim melakukan diskusi terkait penerapan SMAP secara nyata di BBPOM di Jakarta.

Pengakuan berupa sertifikasi terhadap implementasi SMAP di BBPOM di Jakarta merupakan pilar penguat bersama implementasi 2 Standar Internasional yaitu ISO 9001: 2015 dan ISO 17025:2017. Diharapkan ketiga sistem ini dapat terintegrasi dan saling mendukung agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik di Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

#### **9. Peningkatan Koordinasi CJS Serta Refreshment Materi Penyidikan Dalam Penegakan Hukum di Wilayah DKI Jakarta**

Perkembangan modus kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta menuntut Penyidik PNS BBPOM di Jakarta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (*Criminal Justice System*) dan kompetensi penyidikan terkini. Adanya kendala dalam proses penyidikan dijadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi Penyidik PNS BBPOM di Jakarta dan menciptakan inovasi solusi.

Dengan inisiasi dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, tanggal 21 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat BBPOM di Jakarta telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan *refreshment* materi penyidikan guna peningkatan penegakan hukum di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh Penyidik PNS dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM dan BBPOM di Jakarta, serta Penyidik POLRI dari Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI dan Seksi Korwas PPNS Polda Metro Jaya.

Penyampaikan hasil monitoring dan evaluasi target perkara BBPOM di Jakarta oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM, penyampaian materi dari Kepala

Bagian Wassidik serta Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, petunjuk, serta pengungkapan permasalahan penyidikan semakin menghidupkan diskusi interaktif pada kegiatan tersebut.



Pada akhir kegiatan, disepakati 4 (empat) hal yaitu :  
(1) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM, Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, serta Seksi Korwas PPNS Polda Metro Jaya siap membantu penyelesaian serta percepatan perkara Penyidik PNS BBPOM di Jakarta; (2) Guna melengkapi kewenangan

Penyidik PNS dapat dimohonkan bantuan kepada Penyidik POLRI; (3) Dalam hal pengawasan kepada pelaku usaha dengan indikasi kejahatan Obat dan Makanan dapat didampingi oleh Penyidik POLRI; (4) Gelar Perkara dapat dilaksanakan dengan hanya dihadiri Penyidik PNS dan Korwas PPNS, bila perlu dapat dilaksanakan di Bagian Wassidik namun tidak diwajibkan.

#### **10. Pengawasan Keamanan Pangan (Food-Security) Dalam Rangka Pertemuan G20 “Research And Innovation Initiative Gathering” dan “G20 Research and Innovation Ministers” di Jakarta**



Balai Besar POM di Jakarta kembali melaksanakan kegiatan *food-security* dalam rangka pertemuan G20 yang bertempat di The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Berkoordinasi dengan BRIN (Badan Riset

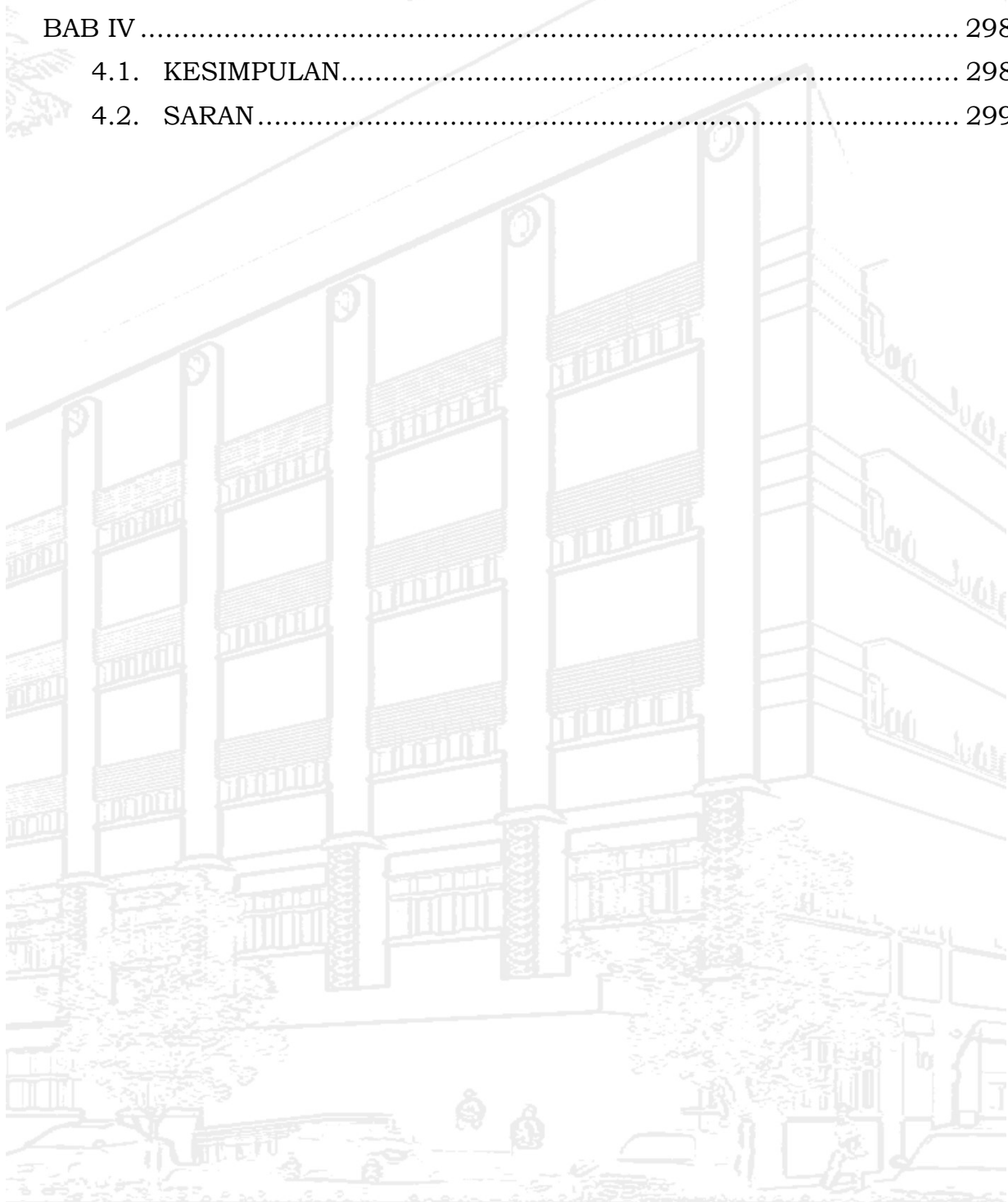
dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku tuan rumah penyelenggaraan G20 *Research and Innovation Initiative Gathering* (RIIG) dan G20 *Research and Innovation Ministers* (RIMM), petugas Balai Besar POM di Jakarta melakukan serangkaian pengujian parameter bahan berbahaya pada hidangan yang disajikan untuk para peserta dan tamu delegasi, diantaranya adalah Arsen, Sianida, Timbal, Nitrit, Formalin, Boraks, Kuning Metanil serta Rhodamin B. Balai Besar POM di Jakarta, yang diwakili oleh Imelda Christine Hutagalung, S.Si, Apt dan Theresia Widiastuti, S.Farm, Apt juga turut menghadiri undangan dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) sebagai narasumber untuk menyampaikan materi, teknis pelaksanaan serta diskusi terkait tentang *food-security* di Denkes (Detasemen Kesehatan) Paspampres, Tanah Abang, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2022. Selain itu, petugas Balai Besar POM di Jakarta beserta perwakilan dari Badan POM pusat juga turut melakukan inspeksi fasilitas dapur serta bahan baku yang digunakan di the Ritz Carlton guna memastikan keamanan, kebersihan serta higienitasnya. Hasil inspeksi dinyatakan aman dan memenuhi ketentuan.



# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....   | 1   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....  | 2   |
| HIGHLIGHT KINERJA .....   | 5   |
| DAFTAR TABEL.....   | 18  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | 0   |
| BAB I .....   | 4   |
| 1.1. LATAR BELAKANG.....  | 4   |
| 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....                             | 5   |
| 1.3. STRUKTUR ORGANISASI .....                                  | 7   |
| 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....                            | 10  |
| 1.5. PERMASALAHAN UTAMA.....                                    | 20  |
| 1.    Generasi <i>Stunting</i> Mengancam Masa Depan Bangsa..... | 20  |
| 2.    Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring..... | 20  |
| 3.    Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .....    | 21  |
| BAB II .....  | 23  |
| 2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS .....                     | 23  |
| 2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN.....                                 | 39  |
| 2.3. PERJANJIAN KINERJA .....                                   | 41  |
| 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA .....                      | 42  |
| 2.5. METODE PENGUKURAN.....                                     | 70  |
| BAB III .....   | 71  |
| 3.1. RENCANA KERJA TAHUNAN.....                                 | 71  |
| 3.2. SASARAN STRATEGIS I .....                                  | 77  |
| 3.3. SASARAN STRATEGIS II .....                                 | 114 |
| 3.4. SASARAN STRATEGIS III .....                                | 126 |
| 3.6. SASARAN STRATEGIS IV .....                                 | 149 |
| 3.7. SASARAN STRATEGIS V .....                                  | 196 |
| 3.8. SASARAN STRATEGIS VI .....                                 | 230 |
| 3.9. SASARAN STRATEGIS VII .....                                | 242 |
| 3.10. SASARAN STRATEGIS VIII .....                              | 252 |

|   |            |
|---|------------|
| 3.11. SASARAN STRATEGIS IX .....        | 268        |
| 3.12. SASARAN STRATEGIS X .....         | 273        |
| 3.13. SASARAN STRATEGIS XI .....        | 284        |
| 3.14. REALISASI ANGGARAN.....           | 292        |
| 3.15. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN ..... | 294        |
| <b>BAB IV .....</b>                     | <b>298</b> |
| 4.1. KESIMPULAN.....                    | 298        |
| 4.2. SARAN.....                         | 299        |



# DAFTAR TABEL

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Tabel 1.</b> Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....   | 3                                   |
| <b>Tabel 2.</b> Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Tabel 3.</b> Hasil Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....   | 17                                  |
| <b>Tabel 4.</b> Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta .....  | 26                                  |
| <b>Tabel 5.</b> Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 .....   | 39                                  |
| <b>Tabel 6.</b> Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 .....   | 67                                  |
| <b>Tabel 7.</b> Kriteria Pencapaian Kinerja.....  | 70                                  |
| <b>Tabel 8.</b> Pencapaian Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 .....  | 71                                  |
| <b>Tabel 9.</b> Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 .....  | 73                                  |
| <b>Tabel 10.</b> Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 .....  | 77                                  |
| <b>Tabel 11.</b> Capaian TE Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022.  | 82                                  |
| <b>Tabel 12.</b> Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022.....   | 84                                  |
| <b>Tabel 13.</b> Analisis Efisiensi Anggaran untuk Makanan Tahun 2022.....  | 89                                  |
| <b>Tabel 14.</b> Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 .....  | 92                                  |
| <b>Tabel 15.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2022 .....                | 95                                  |
| <b>Tabel 16.</b> Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022.....                    | 98                                  |
| <b>Tabel 17.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Jakarta tahun 2021 .....            | 103                                 |
| <b>Tabel 18.</b> Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022.....                                       | 107                                 |
| <b>Tabel 19.</b> analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021 .....  | 111                                 |
| <b>Tabel 20.</b> Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022..... | 114                                 |
| <b>Tabel 21.</b> Kriteria Indeks Persepsi .....   | 116                                 |
| <b>Tabel 23.</b> Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....                       | 126                                 |
| <b>Tabel 23.</b> Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 .....           | 132                                 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Tabel 24.</b> Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....  | 141 |
| <b>Tabel 25.</b> Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada Balai Besar POM di Jakarta.....   | 142 |
| <b>Tabel 26.</b> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....       | 150 |
| <b>Tabel 27.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2022 .....    | 154 |
| <b>Tabel 28.</b> Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta .....                              | 156 |
| <b>Tabel 29.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022..... | 161 |
| <b>Tabel 30.</b> Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....                                    | 173 |
| <b>Tabel 31.</b> Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan .....  | 177 |
| <b>Tabel 32.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022.....                                   | 179 |
| <b>Tabel 33.</b> Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2022 .....  | 180 |
| <b>Tabel 34.</b> Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2022 s/d Triwulan 3 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta .....  | 184 |
| <b>Tabel 35.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022.....                          | 186 |
| <b>Tabel 36.</b> Capaian Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 .....  | 188 |
| <b>Tabel 37.</b> Kriteria Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Publik.....   | 188 |
| <b>Tabel 38.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....                                 | 192 |
| <b>Tabel 39.</b> Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 .....  | 196 |
| <b>Tabel 40.</b> Pengukuran tingkat efektivitas KIE .....  | 197 |
| <b>Tabel 41.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.....           | 203 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabel 42.</b> Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....   | 210 |
| <b>Tabel 43.</b> Realisasi bulanan dan Triwulan Sosialisasi Keamanan Pangan ...   | 211 |
| <b>Tabel 44.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022..... | 215 |
| <b>Tabel 45.</b> Realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....  | 217 |
| <b>Tabel 46.</b> Realisasi bulanan dan triwulan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman tahun 2022.....  | 218 |
| <b>Tabel 47.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....                                      | 221 |
| <b>Tabel 48.</b> Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....  | 223 |
| <b>Tabel 49.</b> Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan progress tahapan .....   | 225 |
| <b>Tabel 50.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.....                   | 228 |
| <b>Tabel 51.</b> Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 .....  | 230 |
| <b>Tabel 52.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....  | 233 |
| <b>Tabel 53.</b> Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 .....   | 236 |
| <b>Tabel 54.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....                    | 240 |
| <b>Tabel 55.</b> Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2022 .....   | 253 |
| <b>Tabel 56.</b> Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM .....   | 254 |
| <b>Tabel 57.</b> Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM .....   | 254 |
| <b>Tabel 58.</b> Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 .....   | 259 |
| <b>Tabel 59.</b> Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP.....  | 264 |
| <b>Tabel 60.</b> Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.....  | 268 |
| <b>Tabel 61.</b> Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022 .....   | 274 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Tabel 62.</b> Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2022 ..... | 277 |
| <b>Tabel 63.</b> Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022 .....  | 279 |
| <b>Tabel 64.</b> Realisasi persentase terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel tahun 2022.....  | 285 |
| <b>Tabel 65.</b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan .....   | 286 |
| <b>Tabel 66.</b> Indikator nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).....  | 287 |
| <b>Tabel 67.</b> Realisasi Anggaran per sasaran strategis tahun 2022 .....   | 292 |



# DAFTAR GAMBAR

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Gambar 1.</b> Strukur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta.....  | 7                                   |
| <b>Gambar 2.</b> Diagram Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Gender Tahun 2022 .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Gambar 3.</b> Diagram Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2022 .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Gambar 4.</b> Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....  | 15                                  |
| <b>Gambar 5.</b> Jumlah Sarana Produksi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....  | 16                                  |
| <b>Gambar 6.</b> Jumlah Sarana Distribusi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....  | 16                                  |
| <b>Gambar 7.</b> Peta Strategi Level II BSC Balai Besar POM di Jakarta.....  | 25                                  |
| <b>Gambar 8.</b> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta .....   | 29                                  |
| <b>Gambar 9.</b> Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....  | 79                                  |
| <b>Gambar 10.</b> Perbandingan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Balai lainnya.....   | 80                                  |
| <b>Gambar 11.</b> Perbandingan realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 .....   | 86                                  |
| <b>Gambar 12.</b> Perbandingan Capaian dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan dengan lain yang sejenis/setara dan target nasional.....  | 87                                  |
| <b>Gambar 13.</b> Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2021 dan target tahun 2024 .....                                       | 93                                  |
| <b>Gambar 14.</b> Perbandingan realisasi persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai lain .....  | 94                                  |
| <b>Gambar 15.</b> Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....  | 101                                 |
| <b>Gambar 16.</b> Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain .....                              | 102                                 |
| <b>Gambar 17.</b> Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat .....   | 109                                 |
| <b>Gambar 18.</b> Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dan tahun 2017-2020.....   | 109                                 |
| <b>Gambar 19.</b> Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dan tahun 2021.....                         | 118                                 |
| <b>Gambar 20.</b> Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara ..... | 120                                 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Gambar 21.</b> Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 .....   | 128 |
| <b>Gambar 22.</b> Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 dengan Balai Lain .....  | 129 |
| <b>Gambar 23.</b> Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta .....  | 134 |
| <b>Gambar 24.</b> Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara .....  | 135 |
| <b>Gambar 25.</b> Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 .....                                     | 143 |
| <b>Gambar 26.</b> Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara.....  | 144 |
| <b>Gambar 27.</b> Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 ..... | 152 |
| <b>Gambar 28.</b> Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan Balai Lain yang Setara .....                                      | 153 |
| <b>Gambar 29.</b> Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 .....   | 158 |
| <b>Gambar 30.</b> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 dengan Balai Lainnya .....   | 160 |
| <b>Gambar 31.</b> Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2022 .....   | 166 |
| <b>Gambar 32.</b> Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain .....   | 167 |
| <b>Gambar 33.</b> Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2021 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 .....                              | 175 |
| <b>Gambar 34.</b> Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain.....   | 176 |
| <b>Gambar 35.</b> Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 .....                            | 182 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Gambar 36.</b> Perbandingan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dibandingkan dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional Tahun 2022 ..... | 183 |
| <b>Gambar 37.</b> Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dan tahun 2022 .....  | 189 |
| <b>Gambar 38.</b> Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara .....   | 190 |
| <b>Gambar 39.</b> Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta .....   | 198 |
| <b>Gambar 40.</b> Perbandingan Tingkat Efektivitas KIE Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara.....  | 199 |
| <b>Gambar 41.</b> Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat.....   | 200 |
| <b>Gambar 42.</b> Pelaksanaan kegiatan pembinaan UMK Pangan di daerah destinasi wisata Kepulauan Seribu .....   | 201 |
| <b>Gambar 43.</b> Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Balai Besar POM di Jakarta dengan target .....                                       | 206 |
| <b>Gambar 44.</b> Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara .....               | 206 |
| <b>Gambar 45.</b> Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM Jakarta .....  | 213 |
| <b>Gambar 46.</b> Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021 .....                                | 214 |
| <b>Gambar 47.</b> Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dan 2022 .....   | 219 |
| <b>Gambar 48.</b> Perbandingan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara.....   | 220 |
| <b>Gambar 49.</b> Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021.....   | 226 |
| <b>Gambar 50.</b> Perbandingan realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai Lainnya.....   | 227 |
| <b>Gambar 51.</b> Perbandingan realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 .....  | 231 |
| <b>Gambar 52.</b> Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai Lainnya.....   | 232 |
| <b>Gambar 53.</b> Perbandingan capaian dan realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan 2020.....   | 237 |
| <b>Gambar 54.</b> Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Jakarta .....   | 238 |
| <b>Gambar 55.</b> Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 dan target akhir periode Renstra RPJMN 2020 – 2024 .....  | 244 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Gambar 56.</b> Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2021 dengan Balai lain.....                | 246 |
| <b>Gambar 57.</b> Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024..... | 255 |
| <b>Gambar 58.</b> Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain.....                             | 256 |
| <b>Gambar 59.</b> Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019-2022.....  | 262 |
| <b>Gambar 60.</b> Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain.....                            | 263 |
| <b>Gambar 61.</b> Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 ....   | 270 |
| <b>Gambar 62.</b> Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain..... | 271 |
| <b>Gambar 63.</b> Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di BBPOM Jakarta.....           | 275 |
| <b>Gambar 64.</b> Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.....            | 276 |
| <b>Gambar 65.</b> Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal di BBPOM Jakarta.....             | 282 |
| <b>Gambar 66.</b> Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain.....            | 282 |
| <b>Gambar 67.</b> Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 202.....  | 287 |
| <b>Gambar 68.</b> Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara.....             | 288 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full-spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai empat inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

## **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi dengan mengalihkan jabatan administratif menjadi jabatan fungsional seperti yang digambarkan dalam gambar 1 berikut:

Berdasarkan gambar 1 dan 2 tersebut, nampak bahwa perubahan yang signifikan adalah penghapusan jabatan struktural Eselon 3 (Kepala Bidang) dan Eselon 4 (Kepala Seksi) dalam rangka memangkas birokrasi sehingga diharapkan kinerja SDM akan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

## 1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Sertifikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum serta Kelompok Pejabat Fungsional. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

Secara umum, struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dalam melakukan pengujian Obat dan Makanan secara kimia dan mikrobiologi. Adapun Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;

2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
  2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional terkait sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan serta sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Adapun Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
  2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
  3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Adapun Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Adapun Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan mengenai aspek strategis yang dimaksud:

### **a. Lingkungan Internal**

Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Pada Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024, berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2021, presentase pemenuhan kebutuhan SDM di Balai Besar POM di Jakarta yaitu sebesar 78%. Seiring dengan perampingan struktur organisasi dan perubahan peraturan terkait perhitungan analisis beban kerja, dilakukan review kembali terhadap perhitungan analisis beban kerja dan presentase pemenuhan SDM pada september 2022 dengan memproyeksikan pegawai yang belum diangkat dalam jabatan fungsional serta memperhitungkan pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan belum dapat diproyeksikan dalam jabatan fungsional tertentu.

Hasil perhitungan analisis beban kerja pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 berikut:

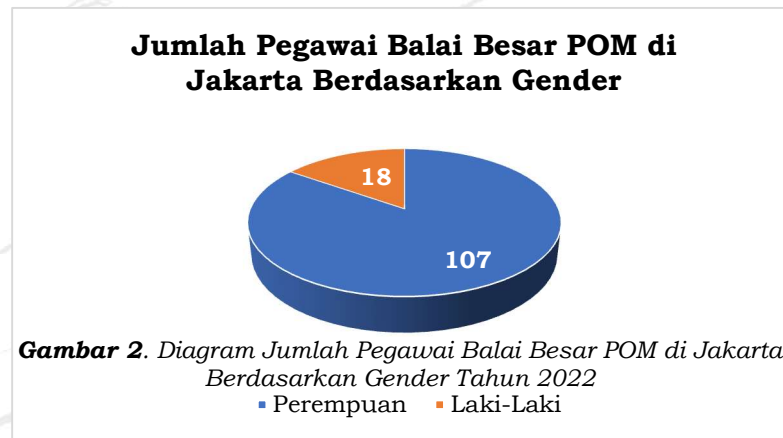
| NO | SUBSTANSI/BAGIAN | STANDAR KEBUTUHAN SDM | JUMLAH PEGAWAI | KEKURANGAN SDM |
|----|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. | Pengujian        | 46                    | 48             | (-2)           |
| 2. | Pemeriksaan      | 37                    | 29             | 8              |
| 3. | Penindakan       | 24                    | 15             | 9              |
| 4. | Infokom          | 24                    | 10             | 14             |
| 5. | Tata Usaha       | 27                    | 23             | 4              |
| 6. | Total            | 158                   | 125            | 33             |

1.

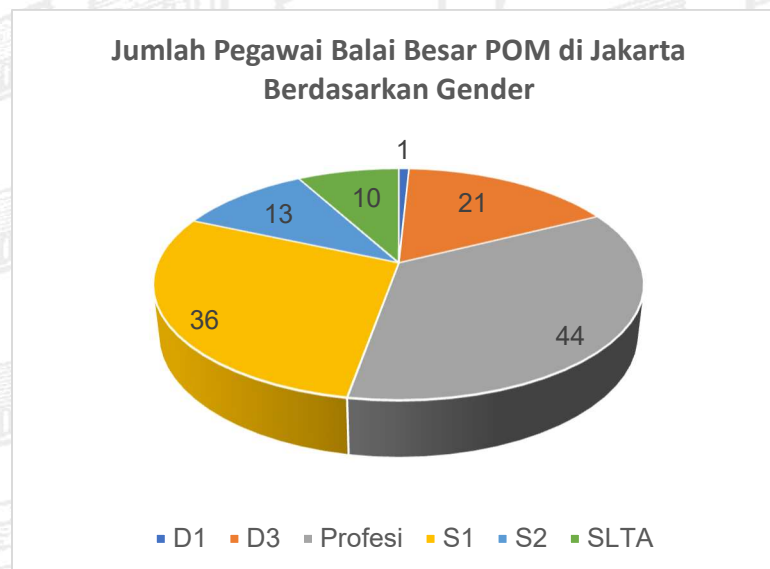
**Tabel 2.** Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 158 orang, sedangkan pegawai yang ada per 31 Desember 2022 berjumlah 125 orang, sehingga masih dibutuhkan pegawai sejumlah 33 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang optimal di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta. Jumlah pegawai eksisting mengalami penambahan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat redistribusi pegawai di tahun 2022 dari Unit Kerja lain yang dirotasi/mutasi ke Balai Besar POM di Jakarta. Pemenuhan kebutuhan SDM pada tahun 2022 di Balai Besar POM di Jakarta sebesar 78,5%. Pada kelompok substansi pengujian jumlah pegawai eksisting melebihi dari kebutuhan, hal ini dikarenakan pada kelompok substansi pengujian akan ada pegawai yang pensiun pada tahun 2023 sehingga diperlukan pegawai pengganti untuk ditempatkan di fungsi pengujian agar dapat melaksanakan tugas di fungsi pengujian dalam rangka pencapaian target.

Berdasarkan gender, pegawai Balai Besar POM Jakarta terdiri dari 107 orang perempuan dan 18 orang laki-laki dengan proporsi 85,60% perempuan dan 14,40% laki-laki sebagaimana tercantum dalam gambar 4 berikut.



Adapun berdasarkan strata pendidikan, jumlah distribusi pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

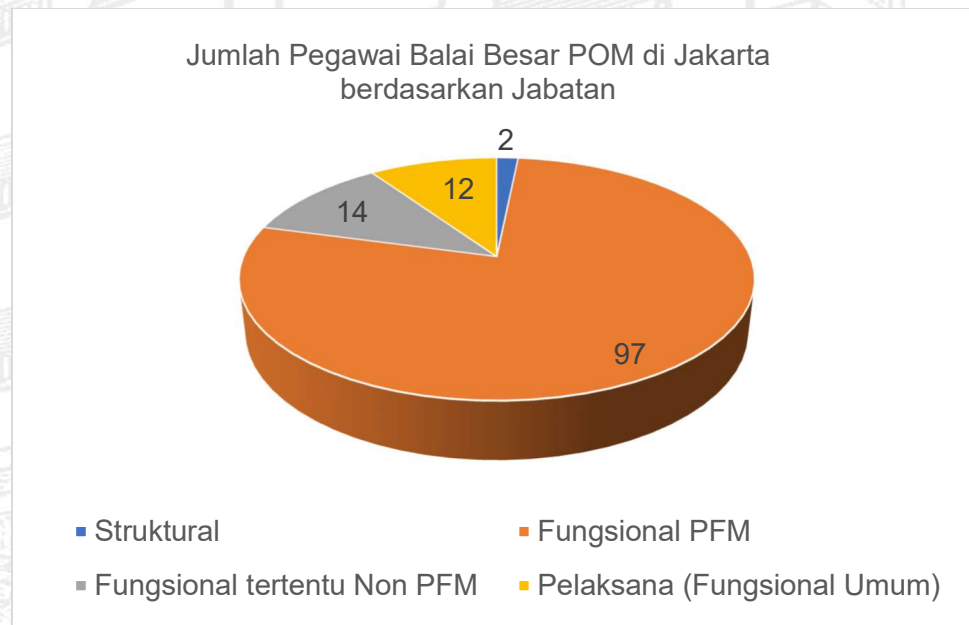


**Gambar 3.** Diagram Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2022

Dari gambar 5, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan di bawah tingkat sarjana sebanyak 32 orang. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang

berbasis saintifik seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, bahwa untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut minimal Pendidikan adalah S1 (Sarjana). Hal ini menjadikan pegawai yang saat ini telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Pendidikan di bawah tingkat Sarjana, akan diprioritaskan untuk ditingkatkan pendidikannya.

Berdasarkan jabatannya, pegawai BBPOM di Jakarta terbagi menjadi beberapa jabatan fungsional tertentu seperti tercantum dalam Gambar 6.



**Gambar 6.** Diagram Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Dari Gambar 6 di atas, dapat diketahui bahwa sebesar 90,4% pegawai telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Jabatan Fungsional Tertentu lain yang diampu oleh Balai Besar POM di Jakarta sesuai kebutuhan. Masih terdapat 12 orang pegawai yang menduduki jabatan pelaksana atau belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dikarenakan belum memenuhi persyaratan dalam pengangkatan jabatan tersebut dan perlu ditingkatkan kompetensinya.

## 2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m<sup>2</sup>, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

## 3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta diantaranya adalah mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017, digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020, program Kerling Jakarta sejak tahun 2021, fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020, layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021 serta Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM yang mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

### b. Lingkungan Eksternal

Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

## 1. Kondisi Geografis dan Demografis

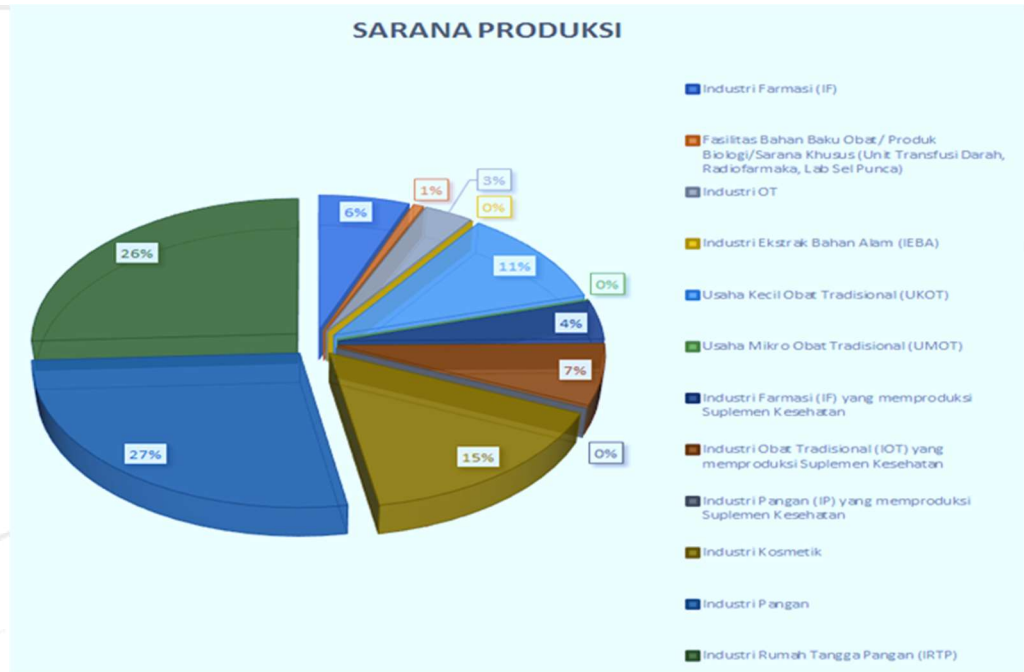
Provinsi DKI Jakarta terletak pada  $6^{\circ}12'$  LS dan  $106^{\circ}48'$  LS dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km<sup>2</sup>. Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,25 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.937 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022. Adapun peta wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 7.



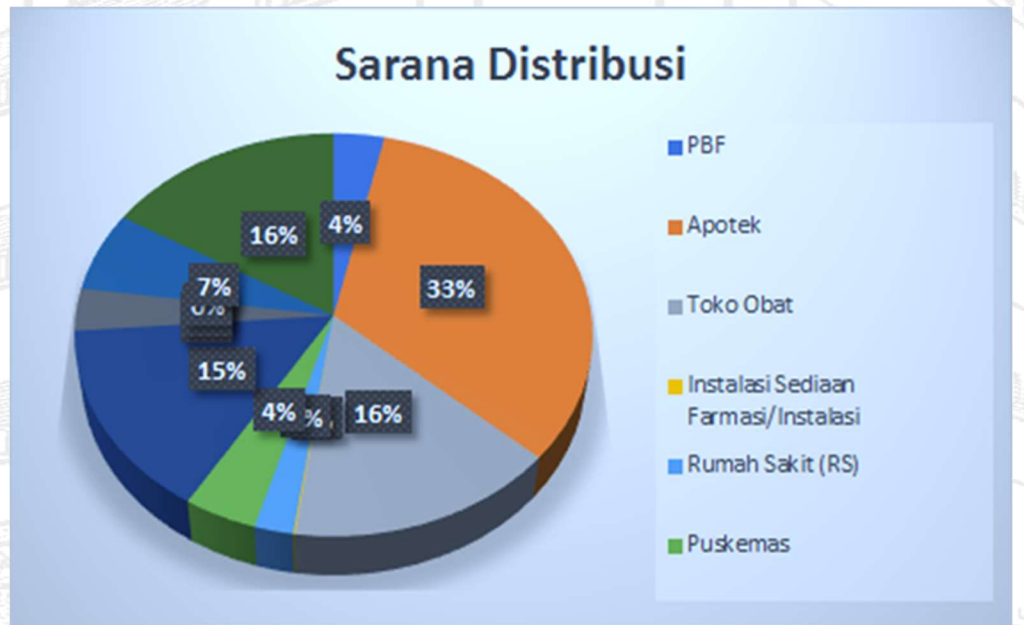
**Gambar 4.** Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta

## 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9 berikut.



**Gambar 5.** Jumlah Sarana Produksi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022



**Gambar 6.** Jumlah Sarana Distribusi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** Hasil Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta

| KEKUATAN  | KELEMAHAN  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan</li> <li>- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB</li> <li>- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i></li> <li>- Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>- Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan</li> <li>- <i>Mobile lab</i> dan mini laboratorium</li> <li>- Integritas pelayanan publik</li> <li>- Fasilitas laboratorium yang memadai</li> <li>- Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial</li> <li>- Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha</li> <li>- Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis</li> <li>- Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien</li> <li>- Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian</li> <li>- ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu</li> <li>- Sarana prasarana belum optimal</li> <li>- Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal</li> <li>- Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi</li> <li>- Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum</li> <li>- Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>penindakan dan penegakan hukum,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai</li> <li>- <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah</li> <li>- Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017</li> <li>- Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015</li> </ul>  |  |
| <b>PELUANG</b>  | <b>TANTANGAN</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan</li> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat</li> <li>- Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat</li> <li>- Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar</li> <li>- Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan</li> <li>- Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi</li> <li>- Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i></li> <li>- Besarnya pangsa pasar obat tradisional</li> <li>- Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan</li> <li>- Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera</li> <li>- Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah</li> <li>- Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional</li> <li>-</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p>peningkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia</li> <li>- Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i></li> <li>- Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan</li> <li>- Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi</li> <li>- Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik</li> <li>- Perkembangan iklan yang begitu cepat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i></li> <li>- Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024</li> <li>- Peningkatan daya saing pelaku usaha</li> <li>- Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan</li> <li>- Modus pelanggaran semakin kompleks</li> <li>- Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan</li> <li>- Adanya program Nasional (JKN dan SKN)</li> <li>- Implementasi program fortifikasi pangan</li> <li>- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perubahan terhadap aspek apapun pada produk terapeutik, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metoda, manufaktur, spesifikasi untuk obat dan bahan baku,</li> </ul> |
|---|---|

### 1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

#### 1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

*Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia pada tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

Badan POM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik

(internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

### 3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

### 4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, Car Free Day, talkshow, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile, dan penyebaran informasi melalui website BPOM.

### 5. Reformasi Birokrasi

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dalam rangka memenuhi predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

#### 6. Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan mengacu pada misi Badan POM. telah ditetapkan misi Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah

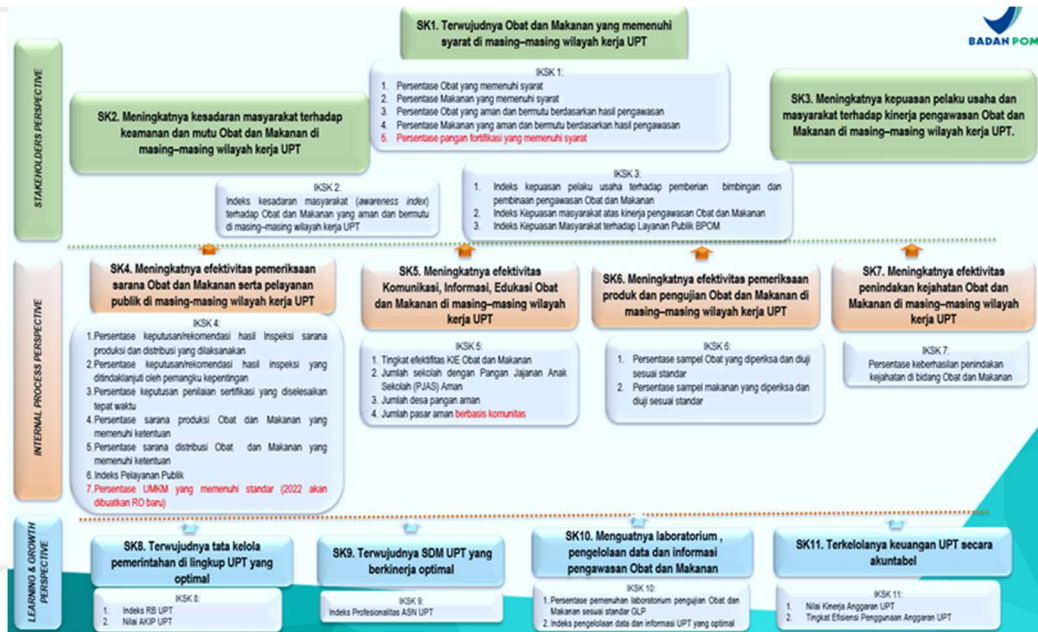
dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customers & Stakeholders*, maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:



**Gambar 7.** Peta Strategi Level II BSC Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala Badan POM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2020-2024), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta dapat mencapai sasaran strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Badan POM sehubungan dengan Balai Besar POM di Jakarta menetapkan 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja pada tahun 2020. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta

| Sasaran Strategis  | Indikator   | Target Kinerja |       |       |       |       |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
|  |   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>   |   |                |       |       |       |       |
| <b>Stakeholder</b>   |   |                |       |       |       |       |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 86             | 80    | 81    | 82    | 83    |
|  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 78             | 95    | 95.5  | 96    | 96.5  |
|  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 86             | 80    | 81    | 82    | 83    |
|  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 78             | 81    | 83    | 84    | 86    |
|  | Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat  | -              | 88    | 89    | 90    | 90    |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                     | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 75             | 85    | 87    | 89    | 91    |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan   | 82             | 86.6  | 87.7  | 88.8  | 89.9  |
|  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan   | 72             | 74.98 | 76.65 | 78.33 | 80.01 |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 88,5           | 90    | 91    | 92    | 93    |
| Meningkatnya efektivitas   | Persentase keputusan/rekomendasi  | 87             | 89    | 90    | 91    | 93    |

| Sasaran Strategis  | Indikator   | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--|---|----------------|------|------|------|------|
|  |   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta               | hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan                                       |                |      |      |      |      |
|  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan        | 55,5           | 75   | 79   | 82   | 85   |
|  | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                              | 83             | 85   | 87   | 89   | 91   |
|  | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                   | 46             | 60   | 63   | 65   | 70   |
|  | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                 | 55             | 73   | 75   | 78   | 80   |
|  | Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta   | 3,51           | 4.20 | 4,30 | 4,40 | 4,51 |
|  | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | -              | -    | 77   | 79   | 81   |
| <b>Internal Process</b>  |   |                |      |      |      |      |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 70             | 93   | 94.4 | 95.8 | 97.3 |
|  | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 20             | 40   | 65   | 90   | 115  |
|  | Jumlah desa pangan aman   | 7              | 14   | 21   | 28   | 36   |
|  | Jumlah pasar aman berbasis komunitas  | 1              | 2    | 3    | 4    | 6    |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di  | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 90             | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                     | 89             | 100  | 100  | 100  | 100  |

| Sasaran Strategis  | Indikator   | Target Kinerja |               |      |       |      |
|--|---|----------------|---------------|------|-------|------|
|  |   | 2020           | 2021          | 2022 | 2023  | 2024 |
| wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta   |   |                |               |      |       |      |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 32             | 54            | 58   | 61    | 65   |
| <b>Learning and Growth</b>   |   |                |               |      |       |      |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal                                | Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta  | 88             | 82.4          | 83.4 | 84.4  | 85.4 |
|  | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta   | 81             | 79.1          | 80   | 81    | 82   |
| Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta                           | 75             | 84.25         | 84.5 | 84.75 | 85   |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan                        | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82             | 77            | 82   | 87    | 92   |
|  | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal   | 1,51           | 2             | 2,25 | 2,5   | 3    |
| Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel  | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                               | 93             | 91.9          | 92.5 | 93.7  | 94.9 |
|  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                | Efisien (95%)  | Efisien (95%) | -    | -     | -    |

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdasarkan renja dapat dijelaskan pada gambar 11 sebagai berikut:



**Gambar 8.** Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2020-2024), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan penjabaran masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Terdapat 3 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

1. Sasaran Strategis I, yaitu **terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen atau masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- i. Pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- ii. Kedua, penilaian pra-edar (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- iii. Ketiga, pengawasan purna-edar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Balai Besar POM di Jakarta.
- iv. Keempat, pengujian produk di laboratorium. Produk hasil *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna

mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi atau tidak memenuhi syarat.

- v. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full-spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Adapun keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 81%;**
- 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 95,5%;**
- 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 81%;**
- 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 83%; dan**
- 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat yang ditargetkan sebesar 89%.**

2. Sasaran Strategis II, yaitu **meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja

utama (IKU) yaitu **indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 87 pada akhir tahun 2022.**

3. Sasaran Strategis III, yaitu **meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Badan POM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Namun di sisi lain, layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87,7 pada tahun 2022;
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 76,65 pada tahun 2022; dan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan POM dengan target sebesar 91 pada tahun 2022.

- b. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Terdapat 4 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif proses internal, yaitu:

1. Sasaran Strategis IV, yaitu **meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full-spectrum*) yang mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan

Makanan yang konsisten atau memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 90% pada akhir tahun 2022;**
  - 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 79% pada akhir tahun 2022;**
  - 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 87% pada akhir tahun 2022;**
  - 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 63% pada akhir tahun 2022;**
  - 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 75% pada akhir tahun 2022;**
  - 6. Indeks pelayanan publik dengan target 4,30 pada akhir tahun 2022; dan**
  - 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 77 pada akhir tahun 2022.**
2. Sasaran Strategis V, yaitu **meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu, melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian

sasaran strategis ini dilakukan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,4 pada akhir tahun 2022;**
  - 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 65 pada akhir tahun 2022;**
  - 3. Jumlah desa pangan aman dengan target 21 pada akhir tahun 2022; dan**
  - 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 3 pada akhir tahun 2022.**
3. Sasaran Strategis VI, yaitu **meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Disamping itu, Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2022; dan**
  - 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2022.**
4. Sasaran Strategis VII, yaitu **meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi

ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU), yaitu **persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 58% pada akhir 2022.**

c. Perspektif Pembelajaran (*Learning & Growth Perspective*)

Terdapat 4 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif pembelajaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis VIII, yaitu **terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 area perubahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM.

Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain: (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis; (ii) penguatan organisasi; dan (iii) dukungan anggaran.

Adapun sumber daya, yang meliputi *5M (man, material, money, method, and machine)* merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta dengan target 83,4 pada akhir tahun 2022; dan**

**2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 80 pada akhir tahun 2022.**

2. Sasaran Strategis IX, yaitu **terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (ii) pengadaan; (iii) pola karir, pangkat dan jabatan; (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin; (v) promosi-mutasi; (vi) penghargaan, penggajian dan tunjangan; (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 84,5 pada tahun 2022.**

3. Sasaran Strategis X, yaitu **menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan

dukungan pelaksanaan tugas Badan POM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum dimutakhirkan secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 82% pada tahun 2022; dan**
2. **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2,25 pada tahun 2022.**
4. Sasaran Strategis XI, yaitu **terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga, salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis XI, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilannya adalah **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 92,5 sebesar pada tahun 2022.**

## 2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut.

**Tabel 5.** Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                       | TARGET |
|-------------------|---|--------|
| (2)               | (3)                                     | (4)    |
|                   | 01-Persentase Obat yang memenuhi syarat | 81     |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> |
|---|--|---------------|
| <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>    |
| 01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | 02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 95,5          |
|   | 03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 81            |
|   | 04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 83            |
|   | 05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89            |
| 02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                     | 06-Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 87            |
| 03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan   | 87,7          |
|   | 08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan   | 76,65         |
|   | 09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 91            |
| 04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta            | 10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan  | 90            |
|   | 11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan  | 79            |
|   | 12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu  | 87            |
|   | 13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan   | 63            |
|   | 14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan   | 75            |
|   | 15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta   | 4,30          |
| 05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi  | 16-Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik   | 77            |
|   | 17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94,4          |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|---|--|--------|
| (2)   | (3)  | (4)    |
| Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | 18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman                   | 65     |
|   | 19-Jumlah desa pangan aman   | 21     |
|   | 20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 3      |
| 06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 100    |
|   | 22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 100    |
| 07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta             | 23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 58     |
| 08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal  | 24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta  | 83,4   |
|   | 25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta   | 80     |
| 09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | 26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta                           | 84,5   |
| 10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan                                    | 27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82     |
|   | 28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal   | 2,25   |
| 11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel  | 29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                               | 92,5   |

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp43,705,622,000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh dua rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022

dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta.

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program berdasarkan Reviu Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 tahun 2014, Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

#### **2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertera pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021**

| No. | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target |      |      |       | Anggaran<br>(Rupiah) |
|-----|--|---|--------|------|------|-------|----------------------|
|     |  |   | B03    | B06  | B09  | B12   |                      |
| 1   | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 81     | 81   | 81   | 81    | 465.152.450          |
|     |  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 95,5   | 95,5 | 95,5 | 95,5  | 298.193.000          |
|     |  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 81     | 81   | 81   | 81    | 465.152.450          |
|     |  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 83     | 83   | 83   | 83    | 298.193.000          |
|     |  | Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89     | 89   | 89   | 89    | 50.898.400           |
| 2   | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                  | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu   |        |      |      | 87    | 318.225.000          |
| 3   | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |        |      |      | 87.7  | 46.325.000           |
|     |  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 |        |      |      | 76.65 | 371.262.500          |
|     |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta                       |        |      |      | 91    | 82.596.000           |
| 4   | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 90     | 90   | 90   | 90    | 396.496.750          |
|     |  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 79     | 79   | 79   | 79    | 396.496.750          |
|     |  | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 87     | 87   | 87   | 87    | 295.830.000          |

| No. | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target                   |                          |                          |      | Anggaran<br>(Rupiah) |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|----------------------|
|     |  |  | B03                      | B06                      | B09                      | B12  |                      |
|     |  | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  | 63                       | 63                       | 63                       | 63   | 160.788.000          |
|     |  | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                      | 75                       | 75                       | 75                       | 75   | 632.205.500          |
|     |  | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta   |                          |                          |                          | 4,3  | 371.262.500          |
|     |  | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. |                          |                          |                          | 77   | 85.159.000           |
| 5   | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta   | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan   | 94,4                     | 94,4                     | 94,4                     | 94,4 | 2.603.617.000        |
|     |  | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman  | 30%<br><i>(progress)</i> | 70%<br><i>(progress)</i> | 70%<br><i>(progress)</i> | 60   | 767.240.000          |
|     |  | Jumlah desa pangan aman  | 25%<br><i>(progress)</i> | 40%<br><i>(progress)</i> | 65%<br><i>(progress)</i> | 21   | 1.097.149.000        |
|     |  | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya   | 25%<br><i>(progress)</i> | 70%<br><i>(progress)</i> | 70%<br><i>(progress)</i> | 3    | 110.081.000          |
| 6   | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 10%                      | 40%                      | 70%                      | 100% | 398.702.100          |
|     |  | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 10%                      | 40%                      | 70%                      | 100% | 277.407.600          |
| 7   | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta             | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                    | 10%                      | 40%                      | 45%                      | 58   | 1.444.888.000        |
| 8   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal   | Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta   |                          |                          |                          | 83,4 | 91.936.000           |
|     |  | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta  |                          |                          |                          | 80   | 51.154.000           |

| No. | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target |      |      |      | Anggaran<br>(Rupiah) |
|-----|---|--|--------|------|------|------|----------------------|
|     |   |  | B03    | B06  | B09  | B12  |                      |
| 9   | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal                  | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta                                  |        |      |      | 84,5 | 27.090.178.000       |
| 10  | Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i> |        |      |      | 82   | 6.770.065.000        |
|     |   | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal          | 2,25   | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 137.915.000          |
| 11  | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel                   | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                                      | 77     | 80   | 86   | 92,5 | 28.600.000           |

## 2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.** Kriteria Pencapaian Kinerja

| Kriteria                  | Capaian                   | Ket       | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan   | >120%                     | Abu Gelap |                        |
| Memenuhi ekspektasi       | $100\% \leq x \leq 120\%$ | Hijau     | Efektif                |
| Belum memenuhi ekspektasi | $80\% \leq x < 100\%$     | Kuning    | Kurang Efektif         |
| Tidak memenuhi ekspektasi | $x < 80\%$                | Merah     | Tidak Efektif          |

Adapun penetapan penilaian capaian kinerja ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah; dan
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. RENCANA KERJA TAHUNAN

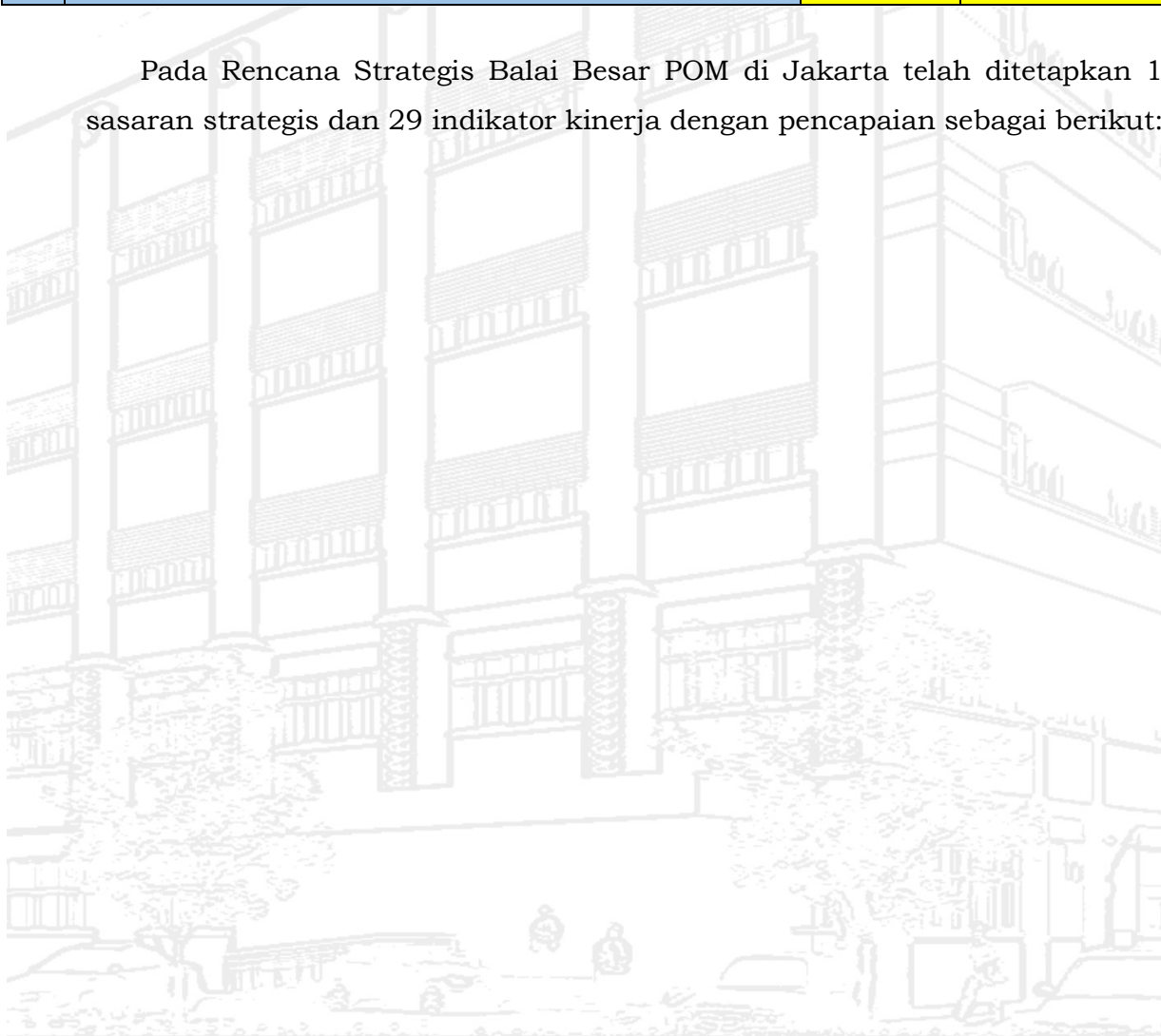
Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta semua sasaran strategis telah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya sebagaimana tercantum dalam tabel 8 berikut.

**Tabel 8.** Pencapaian Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS  | CAPAIAN (NPS) | KRITERIA                  |
|----|--|---------------|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | 96,55         | Tidak Memenuhi Ekspektasi |
| 2. | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                  | 104,64        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 3. | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 106,21        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 4. | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta            | 104,64        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 5. | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                       | 109,75        | Memenuhi Ekspektasi       |

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | CAPAIAN (NPS) | KRITERIA                  |
|-----|--|---------------|---------------------------|
| 6.  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 100,17        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7.  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta             | 99,68         | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8.  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal  | 104,12        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 9.  | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | 104,16        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 10. | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan                                    | 115,99        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 11. | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel  | 99,29         | Tidak Memenuhi Ekspektasi |

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:



**Tabel 9.** Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | 2022 (BBPOM Jakarta) |           |             |                           |
|----|--|---|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|    |  |   | Target               | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                  |
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 81,00%               | 80,39%    | 99,25       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |
|    |  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 95,50%               | 94,16%    | 98,597      | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |
|    |  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 81,00%               | 75,00%    | 92,59       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |
|    |  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 83,00%               | 88,00%    | 106,02      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat  | 89,00%               | 76,80%    | 86,29       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                  | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu   | 87                   | 91,04     | 104,64      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 87,7                 | 95,1      | 108,44      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 76,65                | 80,22     | 104,66      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta                       | 91                   | 96,03     | 105,53      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil  | 90,00%               | 102,83%   | 114,26      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | 2022 (BBPOM Jakarta) |           |             |                           |
|----|--|---|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|    |  |   | Target               | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                  |
|    | Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta   | inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan   |                      |           |             |                           |
|    |  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 79,00%               | 79,93%    | 101,18      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 87,00%               | 97,80%    | 112,41      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 63,00%               | 71,31%    | 113,19      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 75,00%               | 84,22%    | 112,29      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta  | 4,3                  | 4,72      | 109,77      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik | 77                   | 80,95     | 105,13      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 5  | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94,4                 | 95,06     | 100,70      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 65                   | 65        | 100,00      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Jumlah desa pangan aman   | 21                   | 21        | 100,00      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 3                    | 3         | 100,00      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di  | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100%                 | 99,52%    | 99,52       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | 2022 (BBPOM Jakarta) |           |             |                           |
|----|--|--|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|    |  |  | Target               | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                  |
|    | wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta   | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                      | 100%                 | 99,83%    | 99,83       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                | 58%                  | 60,39%    | 104,12      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal                               | Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta   | 83,4                 | 89,98     | 107,89      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta  | 80                   | 80,34     | 100,43      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta                                  | 84,5                 | 85,24     | 100,88      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
| 10 | Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                        | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i> | 82                   | 85,27     | 103,99      | MEMENUHI EKSPEKTASI       |
|    |  | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal          | 2,25                 | 2,880     | 128,00      | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN   |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel  | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                                      | 92,5                 | 91,84     | 99,29       | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI |

Dari 29 indikator kinerja, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 7 indikator mencapai target dengan kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Kriteria Memenuhi Ekspektasi menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

## 3.2. SASARAN STRATEGIS I

Capaian sasaran strategis I, yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

#### 1.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 10. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)        | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 81                | 80,39                | 99,25              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap obat yang disampling secara acak. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No.80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat disampling sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan.

Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- Produk kadaluarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai

memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

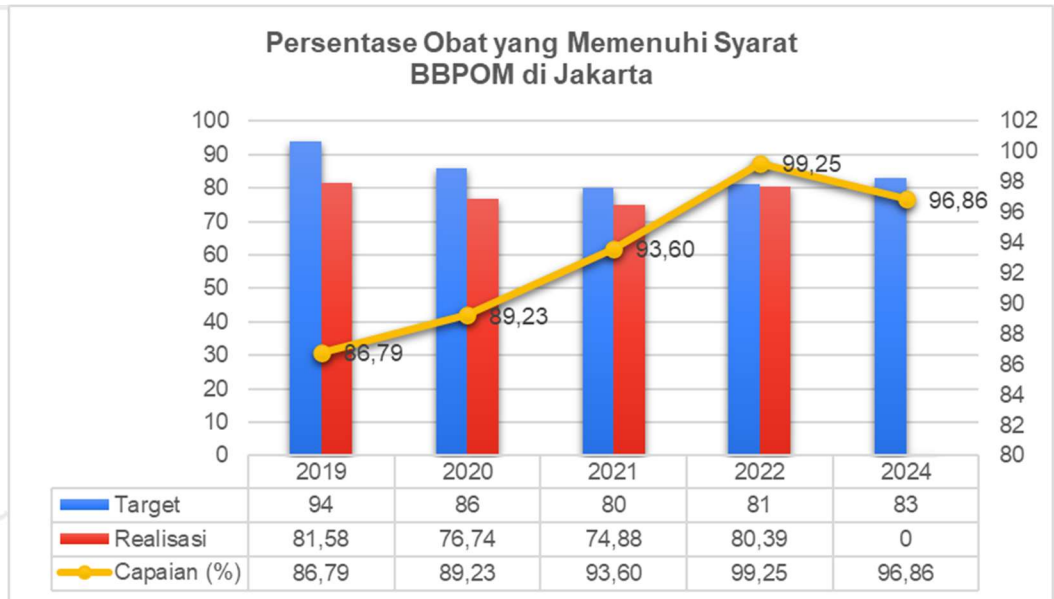
- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 adalah 99.25 % dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

### **1.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” bisa dibandingkan mulai tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 sebesar 89,23% (cukup), sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 93,60% (baik), Tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 99,25% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 83% maka realisasi tahun 2022 ini masih di bawah target.

Untuk tahun 2022 target ditetapkan sebesar 81%. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan triwulan berjalan yang menunjukkan bahwa kondisi riil persentase obat yang memenuhi syarat di DKI Jakarta masih rendah.

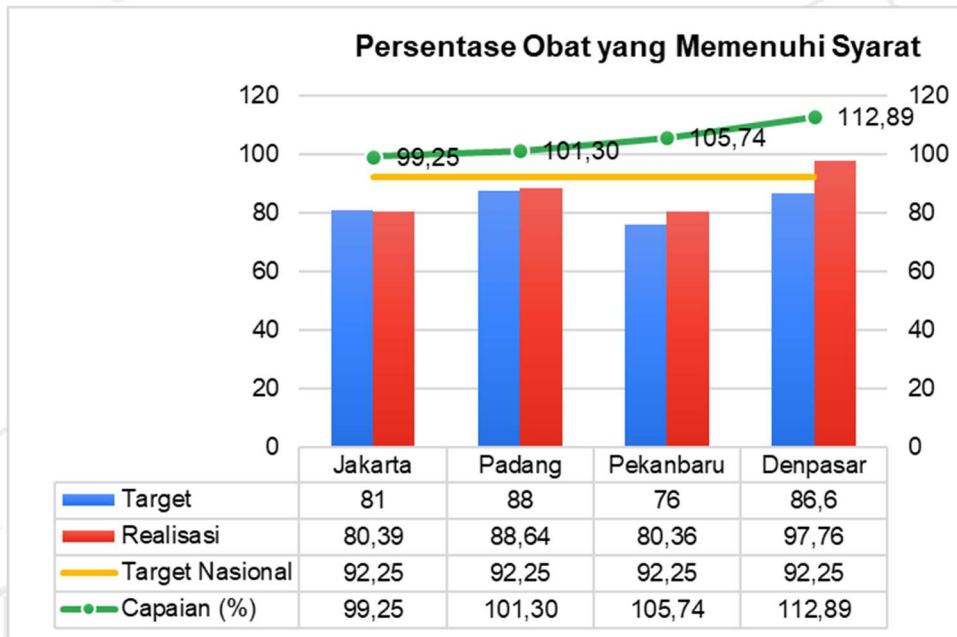


**Gambar 9.** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2022 ini terdapat 320 sampel (19.61%) yang hasil evaluasi penandaannya tidak memenuhi ketentuan penandaan, terutama sampel kosmetik 284 sampel. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan lebih banyak dibanding yang tidak memenuhi syarat pengujian. Banyaknya sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif.

Berdasarkan hasil pengujian terdapat 19 sampel (1,16%) dari 1632 sampel yang tidak memenuhi syarat. Produk Obat Tradisional terdapat 7 sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi (TMS Enterobacteriace) 7 sampel tidak memenuhi syarat pengujian kimia (3 sampel TMS Etanol, 2 sampel TMS Metanol, 1 sampel TMS BKO Dexamethason, 1 sampel TMS BKO Parasetamol). Pada produk Kosmetik terdapat 2 sampel TMS Tioglikolat, sedangkan pada produk Suplemen Kesehatan terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu 1 sampel TMS Vitamin D3 dan 1 sampel TMS Asam benzoate.

### 1.3 Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



**Gambar 10.** Perbandingan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Balai lainnya

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta 99,25% (Belum memenuhi ekspektasi), Balai Besar POM di Padang 101,30%, Balai Besar POM di Pekanbaru 105.74% dan Balai Besar POM di Denpasar 112.89%. Ketiga Balai Besar POM tersebut memiliki kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Capaian dari Balai Besar POM di Jakarta masih di bawah Balai Besar POM lain yang setara.

### 1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya. Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif.

Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relatif lebih baik. Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian. Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah provinsi DKI Jakarta. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi/kosmetik/obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP/Good Manufacturing Practice*), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik;
2. Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan;
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang; dan

5. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

### 1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BPOM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 11.** Capaian TE Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Indikator                            | Output |           |       | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE   | Capaian |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|------|------|---------|
|                                      | Target | Realisasi | %     | Target           | Realisasi   | %     |      |      |         |
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 81,00  | 80,39     | 99,25 | 455.244.300      | 451.672.950 | 99,22 | 1,00 | 0,00 | 100%    |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “efisien”, karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut. Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat yang diperoleh dari sampling acak, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

### 1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam butir d di atas merupakan kegiatan yang paling efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Peningkatan kompetensi personil juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Harus dapat dipastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara valid (akurat), sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan). Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.

### **1.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase capaian sebagai bukti keberhasilan program yang dilaksanakan BBPOM di Jakarta sebagaimana terlampir pada table berikut. Pendampingan secara berkelanjutan akan terus dilaksanakan sehingga diharapkan di tahun 2023, capaian akan meningkat dan dapat memenuhi ekspektasi.

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |   |                  |
|----|---|--|---|------------------|
|    |   | Selesai*   | Belum**   |                  |
|    |   |  | Rencana Aksi  | Timeline         |
| 1  | Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan | Telah dilakukan pendampingan pre market oleh Poksi Pemeriksaan terhadap 7 UMKM produksi Kosmetik selama tahun 2022. Namun masih perlu dilanjutkan lagi di tahun 2023 | Poksi Pemeriksaan akan lebih mengintensifkan pendampingan pre market kepada produsen Kosmetik dan obat tradisional. | Akhir tahun 2023 |

## 1.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

## 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

### 2.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap makanan yang disampling secara acak. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

**Tabel 12.** Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)           | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 95,5              | 94,16                | 98,60              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

| No | Kriteria  |
|----|---|
| 1  | Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) |
| 2  | Produk kadaluarsa   |
| 3  | Produk rusak  |
| 4  | Tidak memenuhi ketentuan penandaan  |
| 5  | Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian   |

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

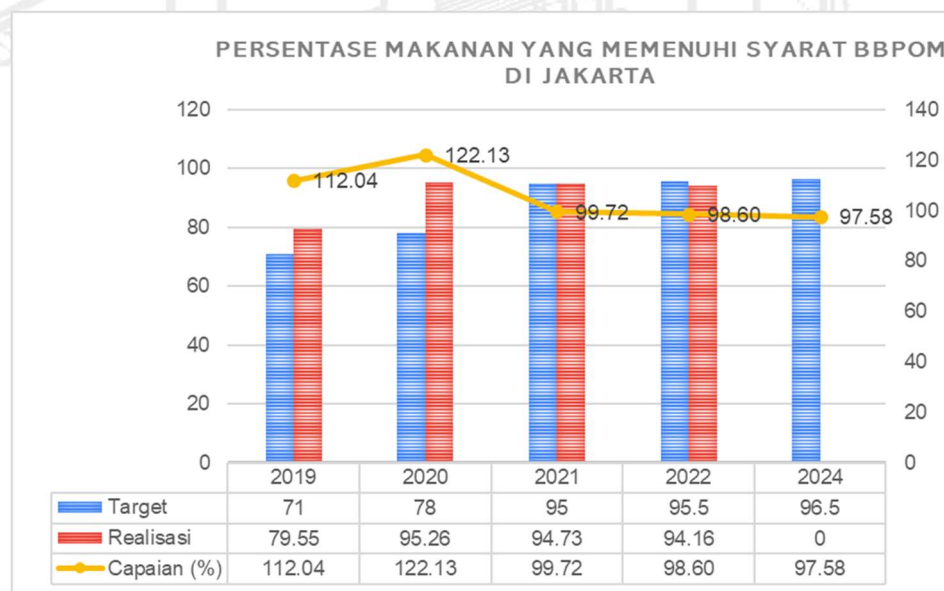
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan :

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium
- c. Sampel makanan mencakup sampel balai dan Loka

Persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2023 hampir mendekati target yang ditetapkan, yaitu 94.16% dengan capaian 98.60% terhadap target sehingga masuk dalam kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

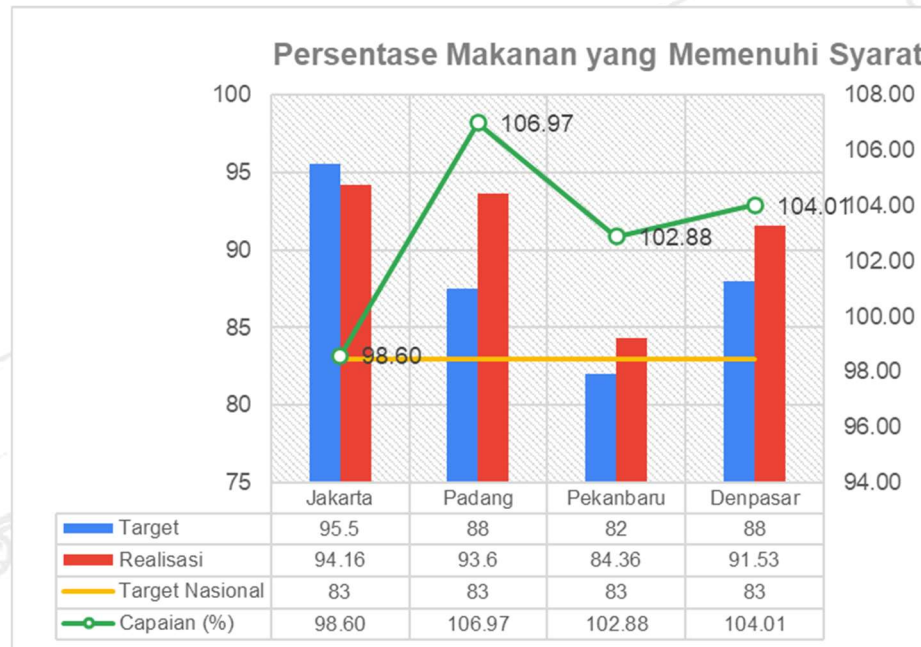
## 2.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



**Gambar 11.** Perbandingan realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan tahun 2019-2021

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi Indikator dan persentase capaian diawal periode Renstra tahun 2019-2020 mengalami peningkatan lalu mulai menurun di tahun 2021-2022 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah makanan yang tidak memenuhi syarat beredar di wilayah Jakarta. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 96.5% maka realisasi tahun 2022 ini masih di bawah target.

### 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara dan target nasional



**Gambar 12.** Perbandingan Capaian dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan dengan lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target nasional dan paling tinggi bila dibandingkan dengan BBPOM Padang, BBPOM Pekan Baru dan BBPOM Denpasar. Apabila realisasi dibandingkan dengan target, maka capaian BBPOM di Jakarta paling rendah dibandingkan dengan BBPOM lain karena target yang ditetapkan sangat tinggi. Hal ini menyebabkan capaian IKU termasuk dalam kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI.

### 2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum tercapainya persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat disebabkan :

1. Meningkatnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi ketentuan (TMK Label). Berdasarkan evaluasi hasil pengujian 770 sampel yang masuk di tahun 2022, sebanyak 13 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan (TMK Label), 28 sampel tidak memenuhi syarat mutu yaitu 6 sampel TMS Sulfit, 3 sampel TMS Asam benzoate, 9 sampel TMS HMF, 2 sampel TMS Enzim diastase – HMF, 1 sampel TMS Kafein, 2 sampel TMS Enterobacteriaceae, 2 sampel TMS ALT-AKK, 2 sampel TMS AKK, 1 sampel TMS ALT dan 4 sampel tidak memenuhi syarat mutu dan ketentuan (TMK label)
2. Meningkatnya jumlah makanan yang tidak memenuhi syarat seiring dengan meningkatnya jumlah makanan yang disampling per tahun menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat masih ada yang tidak memenuhi syarat. Beberapa produk agar-agar/jelly, madu, gula pasir dan gula merah yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat pada tahun ini dan memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di masyarakat dan produk pangan yang TMS Mikrobiologi menambah jumlah yang TMS di tahun 2022.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) dilakukan dengan:

1. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

2. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
3. Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar /Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.
5. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta guna memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan.

### **1.5 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2022.

**Tabel 13.** Analisis Efisiensi Anggaran untuk Makanan Tahun 2022

| No | Indikator                               | Output |       |       | Input (anggaran) |             |       | IE          | TE           |
|----|---|--------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------------|--------------|
|    |   | T      | R     | %     | T                | R           | %     |             |              |
| 1  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 95.50  | 94.16 | 98.59 | 256,188,000      | 255,306,708 | 99.66 | <b>0.99</b> | <b>-0.01</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 98,93%, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “Tidak efisien”, karena capaian output lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut. Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan yang diperoleh dari sampling acak, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

**1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja.**

Kegiatan pengawasan, penyidikan, KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas, jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

**1.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                    |   |                  |
|----|---|--|---|------------------|
|    |   | Selesai*   | Belum**   |                  |
|    |   |  | Rencana Aksi  | Timeline         |
| 1  | Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi | Telah dilaksanakan namun perlu ditingkatkan lagi | Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi | Akhir tahun 2023 |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                     |  |                  |
|----|---|---|--|------------------|
|    |   | Selesai*  | Belum**  |                  |
|    |   |   | Rencana Aksi   | Timeline         |
|    | ketentuan) penandaan untuk agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. |   | ketentuan) penandaan untuk agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek |                  |
| 2  | Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.  | Telah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan lagi | Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.                                     | Akhir tahun 2023 |

### 1.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

## 2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

### 3.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14.** *Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022*

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                      | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                  |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 81                | 75                   | 92,59              | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

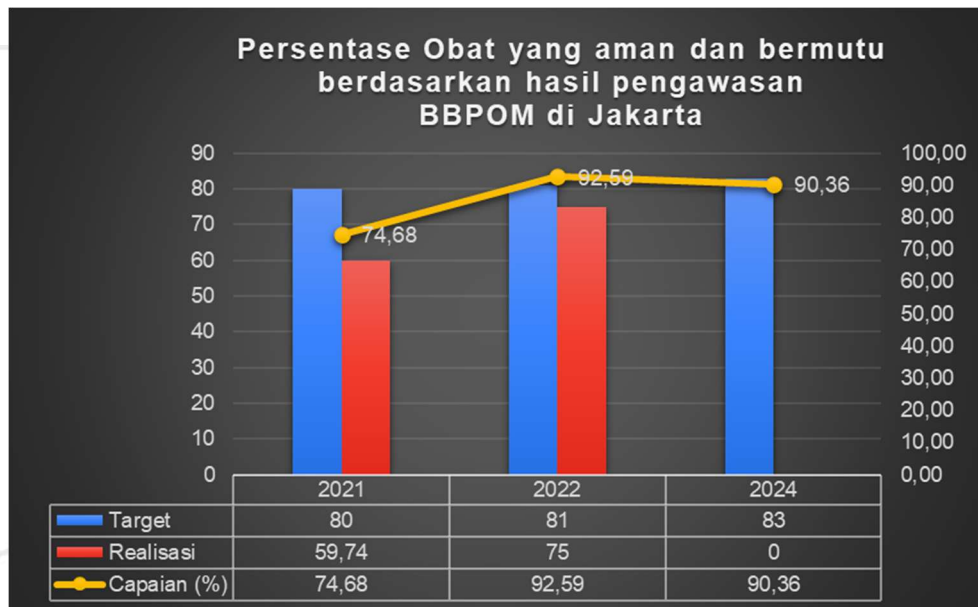
Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah 92.59% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

### **3.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

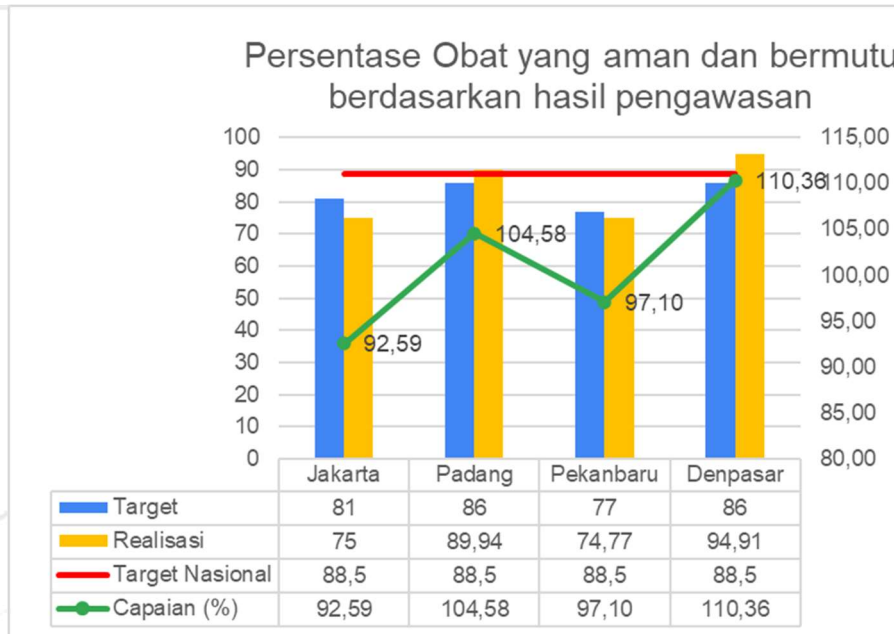
Berdasarkan gambar di atas, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 92.59% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74.68%. Capaian tahun 2022 mendapat kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Untuk akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 ditetapkan target 83%.



**Gambar 13.** Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2021 dan target tahun 2024

Dari hasil pengawasan, masih banyak ditemukan sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan. Ditemukan 152 sampel dari 608 sampel targeted atau 25.0% yang tidak memenuhi ketentuan penandaan (sebagian besar sampel kosmetik, 119 sampel) dan 10 sampel (1.64%) tidak memenuhi syarat pengujian yaitu 3 sampel Obat Tradisional tidak memenuhi syarat pengujian Mikrobiologi (2 sampel TMS APM Enterobacteriace, 1 sampel Angka Kapang Khamir), 6 sampel tidak memenuhi syarat pengujian kimia (5 sampel TMS Etanol, 1 sampel TMS Metanol, etanol dan Sildenafil). Sedangkan untuk produk Suplemen Kesehatan terdapat 1 sampel tidak syarat pengujian (TMS Vitamin D3)

### **3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**



**Gambar 14.** Perbandingan realisasi persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Balai lain

Dari gambar bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai Besar POM di Jakarta 92.59% (Belum memenuhi ekspektasi), Balai Besar POM di Padang 104.58%, Balai Besar POM di Pekanbaru 97.10% dan Balai Besar POM di Denpasar 110.36% semuanya memiliki kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Capaian Balai Besar POM di Jakarta berada di bawah balai lain yang setara.

### **3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta berada di bawah Balai lain yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih cukup banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan, terutama kosmetik dan obat tradisional. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui

evaluasi premarket yang komprehensif, untuk itu diperlukan pengawasan post market yang ketat guna melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Terhadap hal ini BBPOM di Jakarta telah berupaya melaksanakan berbagai program pembinaan dan pengawasan terkait produksi Obat yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

### 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 15.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2022

| Indikator  | Output |           |       | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE    | Capaian       |
|--|--------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|------|-------|---------------|
|  | Target | Realisasi | %     | Target           | Realisasi   | %     |      |       |               |
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 81.00  | 75.00     | 92.59 | 455,244,300      | 451,672,950 | 99.22 | 0.93 | -0.07 | Tidak Efisien |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -0.07 dengan capaian tingkat efisiensi 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “tidak efisien”, karena capaian *output* lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan *output*-nya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut. *Output* didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat yang diperoleh dari *sampling targeted*, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan *targeted*. Demikian juga untuk indikator persentase obat atau makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

### **3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Peningkatan / penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.

Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relative lebih baik.

Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian.

Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- a. Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi / kosmetik / obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP / *Good Manufacturing Practice*), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- b. Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin
- c. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
- e. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

**3.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut      |  |                  |
|----|---|--------------------|--|------------------|
|    |   | Selesai*           | Belum**  |                  |
|    |   |                    | Rencana Aksi   | Timeline         |
| 1  | Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan                                 | Sudah dilaksanakan | Dilakukan pendampingan pre market terhadap UMKM produksi Kosmetik                                    | Akhir tahun 2022 |
| 2  | Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.                                   | Sudah dilaksanakan | penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. | Akhir tahun 2022 |
| 3  | Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. | Sudah dilaksanakan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN  | Akhir tahun 2022 |

**3.8 Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

#### **4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

##### **4.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16.** Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>                                  | <b>Target Tahun 2022</b> | <b>Realisasi Tahun 2022</b> | <b>Capaian Tahun 2022</b> | <b>Kriteria</b>    |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 83                       | 88                          | 106,02                    | Memenuhi Ekspetasi |

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan

menggunakan *sampling targeted / purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

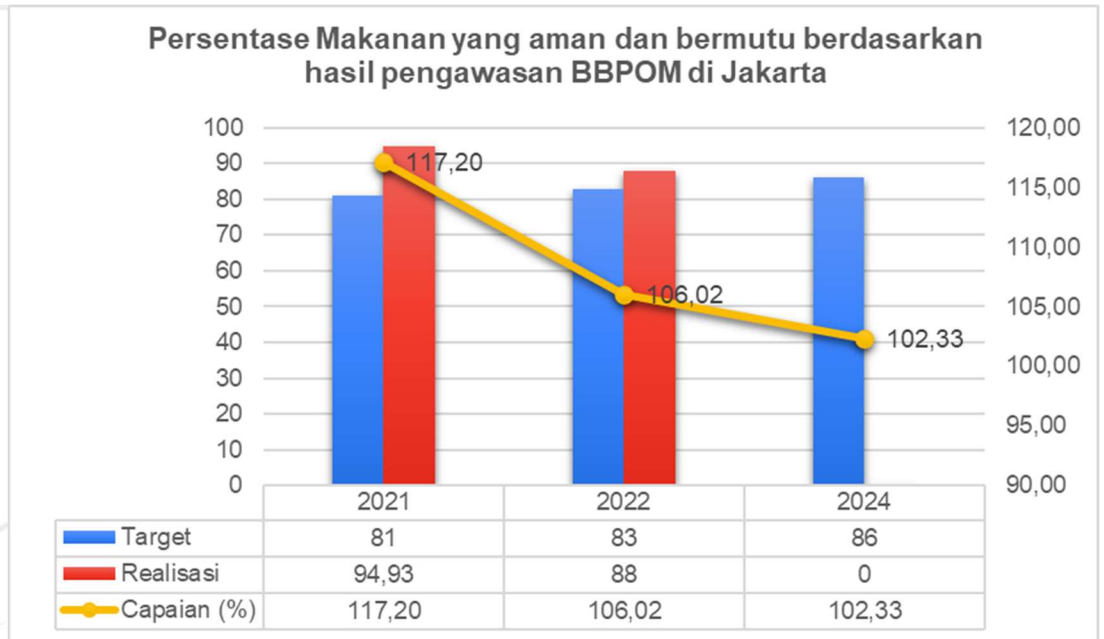
- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 117,20% dengan kriteria “sangat baik”.

#### **4.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Realisasi indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada tahun 2022 sebesar 88% menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 94,93%. Menurunnya realisasi indikator dipengaruhi oleh meningkatnya target di tahun 2022 yaitu 83% sehingga mempengaruhi dalam realisasi capaian di tahun 2022 yaitu 106,02%.



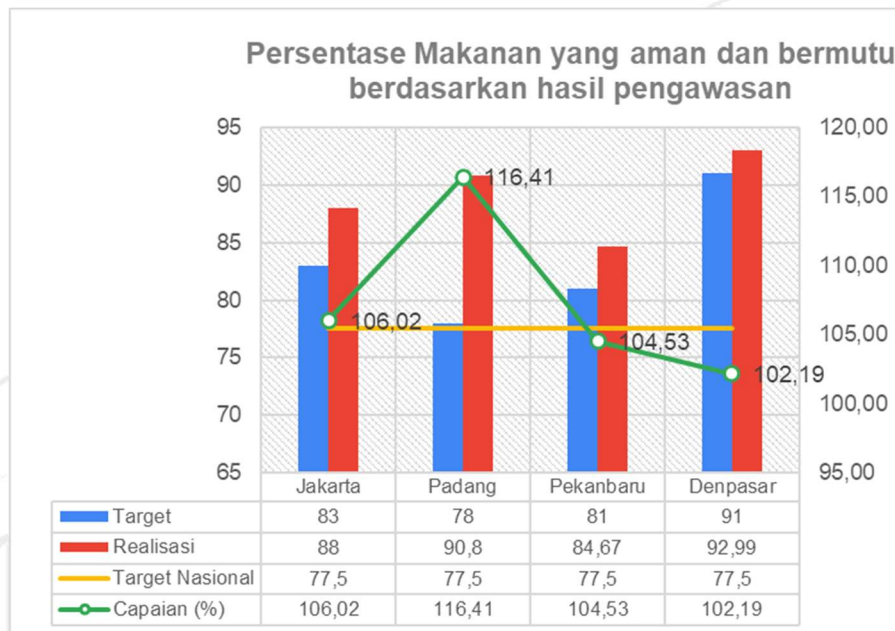
**Gambar 15.** Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan proyeksi terhadap target periode akhir renstra, dengan meningkatnya target periode akhir renstra menjadi 86% maka realisasi capaian kinerja akan menurun menjadi 102,33% dan meskipun demikian masih dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI.

#### **4.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara**

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu di wilayah Jakarta sudah melebihi

target nasional. Capaian BBPOM di Jakarta berada di urutan no.2 dari Balai lain yang setara dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI.



**Gambar 16.** Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain

#### **4.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan** **Penyebab menurunnya kinerja disebabkan :**

Meningkatnya jumlah makanan yang tidak aman dan bermutu di wilayah Jakarta pada tahun 2022. Hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat sebanyak 27 sampel disumbang dari jenis pangan targeted local spesifik, Targeted lab air, PJAS, Kasus, dan UMKM.

Meningkatnya persentase target tiap tahun dan jumlah sampel yang meningkat mempengaruhi persentase realisasi dan capaian kinerja tahunan BBPOM di Jakarta

Nilai target per tahun bila dibandingkan dengan nilai target dari Balai lain yang sejenis/setara, nilai target Jakarta terlalu tinggi sehingga mempengaruhi nilai capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada Tahun 2022 jumlah sampel pangan *targeted* yang masuk ke laboratorium sebanyak 225 sampel dan semuanya telah selesai uji

dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 198 sampel (88.00%) dan 27 sampel makanan (12%) tidak memenuhi syarat. Jumlah sampel yang tidak memenuhi ketentuan label sebanyak 3 sampel. Sampel makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi TMS Bisphenol A (6), TMS Siklambat (3), TMS Kuning FCF (1), TMS Logam As (1); TMS Enzim diastase (1); TMS Aspartam, Sakarin, Siklambat Benzoat (1), TMS Aspartam-Siklambat-Benzot (3) TMS Sulfit-Apsartam-Siklambat-Benzoat (2), TMS E.coli dan Coliform(1), TMS APM *E.Coli* (2), TMS *Coliform* (6). Pada tahun 2022 Laboratorium Pangan menerima sampel target kasus kemasan pangan dalam jumlah banyak karena rencana penetapan regulasi terkait kemasan pangan. Pengujian kemasan pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta, khususnya di Laboratorium pangan,

#### 4.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Jakarta tahun 2022.

**Tabel 17.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Jakarta tahun 2021

| No | Indikator   | Output |       |        | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE   | Cap<br>T |
|----|---|--------|-------|--------|------------------|-------------|-------|------|------|----------|
|    |   | T      | R     | %      | T                | R           | %     |      |      |          |
| 1  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 83.00  | 88.00 | 106.02 | 256,188,000      | 255,306,708 | 99.66 | 1.06 | 0.06 | 100      |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “Efisien”, karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut. *Output* didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan yang diperoleh dari sampling targeted, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak

dipisahkan antara yang acak dan *targeted*. Demikian juga untuk indikator persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

#### **4.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Proses/Teknik sampling dan kondisi di sarana distribusi dan produsen juga mempengaruhi hasil pengujian di laboratorium. Pada Implementasi Regionalisasi di tahun 2022, Laboratorium Pangan Balai Besar POM Jakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Air dan Laboratorium spesifik Mikotoksin. Program perencanaan pengadaan alat khususnya untuk pengujian parameter uji untuk lab Air, verifikasi metoda Analisa, bimbingan teknis internal dan eksternal, magang dan peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium yang terkait dengan pengujian Regionalisasi menjadi perhatian khusus. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas tersebut meningkatkan *cost* / biaya yang dikeluarkan dalam pembelian suku cadang, reagent, dan alat dalam jumlah banyak, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih baik.

#### 4.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut                                      |   |                  |
|----|--|--|---|------------------|
|    |  | Selesai*   | Belum**   |                  |
|    |  |  | Rencana Aksi  | Timeline         |
| 1  | Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan | Melakukan Pemdampingan dan pengawasan UMKM Pangan dan pelaku usaha pangan lainnya | Akhir tahun 2023 |
| 2  | Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan  | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan | Melakukan Bimtek Pengawasan Iklan dan penandaan                                   | Akhir tahun 2023 |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                      |  |                  |
|----|---|--|--|------------------|
|    |   | Selesai*   | Belum**  |                  |
|    |   |  | Rencana Aksi   | Timeline         |
|    | dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.  |  |  |                  |
| 3  | Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.                                   | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan | Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. |                  |
| 4  | Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN  | Akhir tahun 2023 |

#### **4.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

### 5.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18.** Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                      | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 89                | 76,8                 | 86,29              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar  $KIO_3$ , NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar  $KIO_3$  sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS. Hasil pemeriksaan pada poin-c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus berikut:

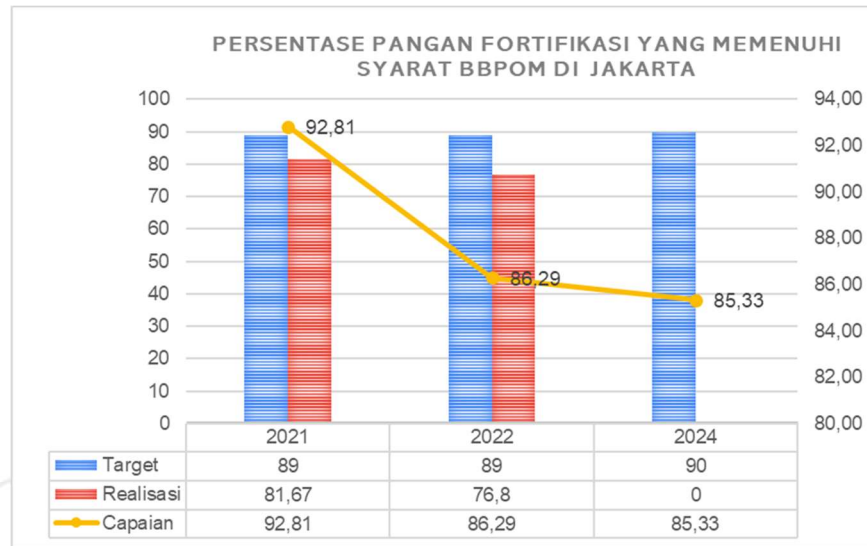
$$\% \text{ Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 76,80% dengan capaian 86,29 % terhadap target dan masuk dalam kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

## **5.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

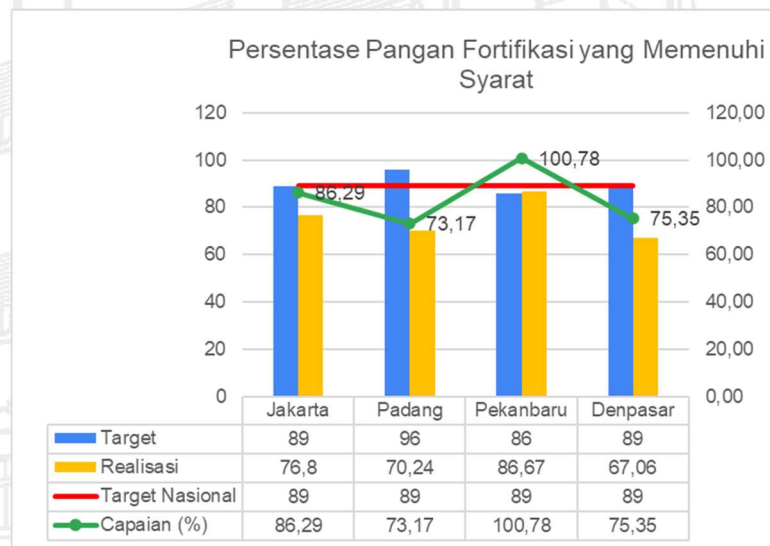
Berdasarkan grafik tersebut, realisasi indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak menunjukkan adanya peningkatan persentase realisasi. Sedangkan Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 terjadi penurunan terhadap target yang sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta adalah 76.8%, masih jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu 89%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaian tahun 2022 termasuk kategori “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 85,33% maka

realisasi tahun 2022 ini masih di bawah target



**Gambar 17.** Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

### 5.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/Setara dan Target Nasional



**Gambar 18.** Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dan tahun 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa target tahunan BBPOM di Jakarta dan target Nasional untuk indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah sama yaitu 89% sedangkan target balai yang lain

nilai target per tahun lebih kecil. Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta menduduki urutan kedua tertinggi dari BBPOM Padang, BBPOM Pekanbaru dan BBPOM Denpasar.

Meningkatnya jumlah pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat menyebabkan menurunnya realisasi persentase pangan fortifikasi dan capaian kinerja terhadap target pangan fortifikasi menunjukkan bahwa pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat banyak beredar di wilayah Jakarta.

#### **5.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Pada tahun 2022 seluruh sampel Pangan Fortifikasi telah selesai diuji. Berdasarkan evaluasi, produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebanyak 29 sampel (23.20%) yaitu 21 sampel garam dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar  $KIO_3$ , NaCl dan kadar air dan 8 sampel tepung terigu. Dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar Vitamin B2, B12, dan logam Fe. Jumlah sampel garam yang tidak memenuhi syarat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 10 menjadi 21 sampel.

Hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, adalah intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK

(tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

### 5.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 19.** analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2021

| No | Indikator  | Output |       |       | Input (anggaran) |            |       | IE          | TE           |
|----|--|--------|-------|-------|------------------|------------|-------|-------------|--------------|
|    |  | T      | R     | %     | T                | R          | %     |             |              |
| 1  | Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | 89.00  | 76.80 | 86.29 | 50,338,400       | 49,739,221 | 98.81 | <b>0.87</b> | <b>-0.13</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.13 dengan capaian tingkat efisiensi 87,33%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

### 5.6 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji selalu ditingkatkan antara lain dengan mengembangkan metode uji Identifikasi Fe Elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh

terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu. Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual, sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat dijamin validitasnya. Dengan demikian hasil pengawasan post market melalui sampling dan pengujian dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan secara lebih intensif dan pengawasan secara lebih ketat.

### 5.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |   |                  |
|----|---|---|---|------------------|
|    |   | Selesai*  | Belum**   |                  |
|    |   |   | Rencana Aksi  | Timeline         |
| 1. | Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan | Sudah dilaksanakan, namun perlu lebih diintensifkan | Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan | Akhir tahun 2023 |
| 2  | Peningkatan kemampuan   | Sudah dilaksanakan uji skrining awal Fe             | -   |                  |

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |   |                  |
|----|--|--|---|------------------|
|    |  | Selesai*   | Belum**                                       |                  |
|    |  |  | Rencana Aksi                                  | Timeline         |
|    | uji sampel fortifikasi                                   | elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam.        |   |                  |
| 3  | Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN | Akhir tahun 2023 |

### 5.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

### 3.3. SASARAN STRATEGIS II

Capaian sasaran strategis II, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

#### 6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

##### 6.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku.

**Tabel 20.** Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria            |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | 87                | 91,04                | 104,64             | Memenuhi Ekspektasi |

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan

bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural).

Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah

tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah responden di Provinsi DKI Jakarta adalah 450 responden dari total sampel sebanyak 16340 rumah tangga (1634 blok sensus terdiri atas 474 kabupaten/kota, 1452 kecamatan, dan 1628 desa secara nasional). Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 21.** Kriteria Indeks Persepsi

| Kategori    | Interval Indeks |
|-------------|-----------------|
| Tidak Baik  | < 45            |
| Kurang Baik | 45 - 60         |
| Cukup Baik  | 60 - 75         |
| Baik        | 75 - 90         |
| Sangat Baik | ≥ 90            |

Sedangkan cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100$$

Keterangan:

$I_i$  = skor faktor ke- $i$

$I_{\min}$  = skor faktor minimal

$I_{\max}$  = skor faktor maksimal

$n$  = banyaknya responden

Hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 diperoleh sebesar 91,04 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 87,00 diperoleh capaian sebesar 104,64% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas Efektif. Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di

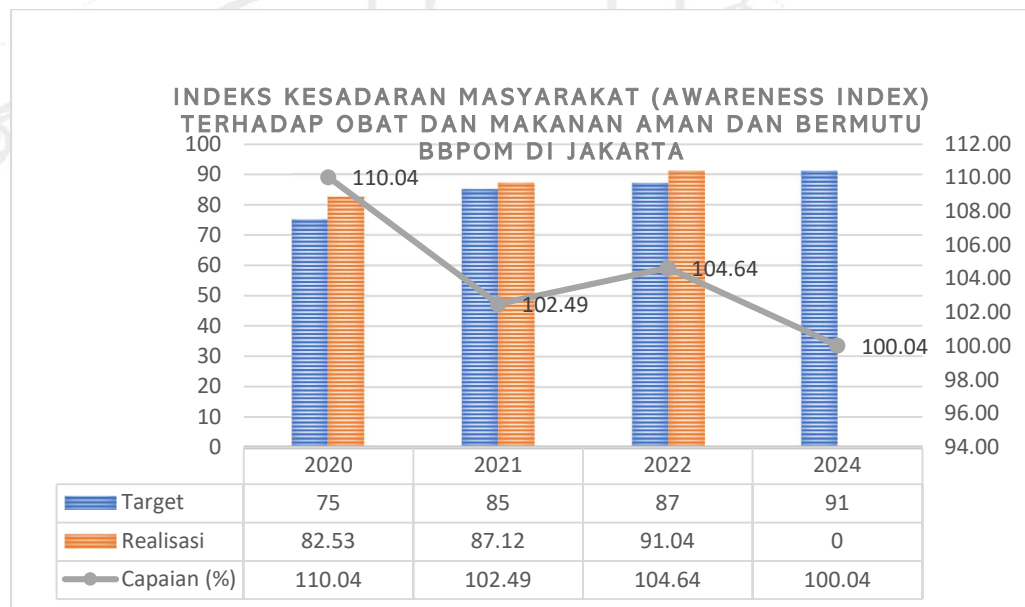
wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 merupakan capaian indeks tertinggi secara nasional dari 34 provinsi. Indeks kesadaran masyarakat ini dibentuk dari 3 (tiga) indikator pengukuran, yaitu:

1. Pengetahuan, diperoleh indeks pengetahuan sebesar 93,48 dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini merupakan nilai indeks pengetahuan masyarakat tertinggi secara nasional. Indeks pengetahuan masyarakat tertinggi berdasarkan produk adalah produk pangan olahan sebesar 95,50 (Sangat Baik) diikuti dengan produk Obat sebesar 95,38 (Sangat Baik), produk Kosmetik sebesar 93,23 (Sangat Baik), dan produk Suplemen Kesehatan sebesar 91,65 (Sangat Baik). Indeks pengetahuan masyarakat berdasarkan produk terendah adalah produk Obat Tradisional sebesar 90,08 dengan kategori indeks Sangat Baik. Hasil indeks pengetahuan per kategori produk masyarakat Jakarta secara keseluruhan masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan yang bermutu sudah Sangat Baik.
2. Sikap, diperoleh indeks sikap sebesar 83,89 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Indeks sikap per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 84,75 (Baik) diikuti produk Suplemen Kesehatan sebesar 83,77 (Baik), produk Kosmetik sebesar 83,54 (Baik), Obat Tradisional sebesar 83,46 (Baik), dan produk Pangan Olahan sebesar 83,35 (Baik). Hal ini mengindikasikan meskipun pengetahuan masyarakat mengenai produk pangan menghasilkan nilai tertinggi belum disertai dengan sikap masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan bermutu.
3. Perilaku, diperoleh indeks perilaku masyarakat sebesar 83,99 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. Indeks perilaku per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 86,61 (Baik), kemudian berturut-turut diikuti oleh produk Pangan Olahan sebesar 84,33 (Baik), Kosmetik sebesar 83,34 (Baik), Suplemen Kesehatan sebesar 82,49 (Baik), dan Obat Tradisional sebesar 81,88 (Baik). Hal

ini mengindikasikan bahwa perilaku masyarakat dalam menyimpan produk, dan membaca label/kemasan/dus/brosur dari Obat Tradisional aman dan bermutu masih lebih rendah dibandingkan komoditi Obat dan Makanan lainnya.

Dari nilai indikator pembentuk pengukuran, diketahui indikator tertinggi berasal dari pengetahuan dengan nilai 92,54 dan terendah berasal dari sikap sebesar 89,05.

## 6.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



**Gambar 19.** Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dan tahun 2021

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2022. Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 sebesar 91,04 (Sangat Baik) meningkat sebanyak 3,92 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 87,12 (Baik). Begitupun jika

dibandingkan dengan indeks tahun 2020 sebesar 82,53 (Baik), nilai indeks tahun 2021 meningkat sebanyak 4,59 poin.

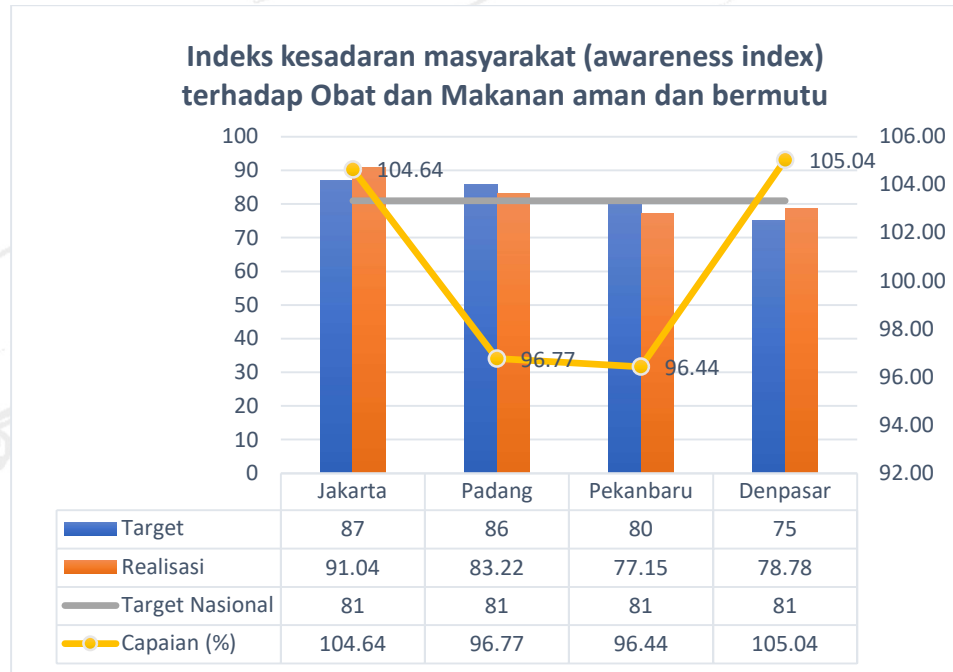
Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020-2022 sudah melampaui target kinerja secara berturut-turut sebesar 110,04%, 102,49%, dan 104,64%. Apabila realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 sebesar 91,04 dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 91, dapat dihitung capaian kinerja sebesar 100,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Dengan hasil ini maka BBPOM di Jakarta optimis mencapai target Renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara kontinu.

### **6.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 sebesar 91,04 (Sangat Baik) merupakan nilai indeks tertinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar tahun 2022 secara berturut-turut sebesar 91,04 (Sangat Baik), 83,22 (Baik), 77,15 (Baik), dan 78,78 (Baik).

Capaian kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar tahun 2022 secara berturut-turut diperoleh sebesar 104,64% (Memenuhi eksepektasi), 96,77% (Belum memenuhi ekspektasi), 96,44% (Belum memenuhi eksepektasi), dan 105,04% (Memenuhi ekspektasi).

Hanya capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Denpasar yang memiliki kriteria Memenuhi Ekspektasi. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 81, hanya realisasi indeks BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Padang yang telah melampaui target.



**Gambar 20.** Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara

#### **6.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Secara demografi, wilayah DKI Jakarta yang merupakan wilayah urban memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibanding wilayah rural. Akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu cenderung sangat mudah untuk diperoleh.

2. Adanya korelasi positif antara aspek pengetahuan dan perilaku. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ditunjukkan dengan nilai indeks pengetahuan yang tinggi, berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sehingga nilai indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tinggi.
3. Masih adanya pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mencari informasi terkait produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama mengenai Obat dan Vaksin COVID-19 dan suplemen Kesehatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh
4. Adanya perkuatan sinergi dengan *stakeholder* terkait dalam pemberian penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini BBPOM di Jakarta menggandeng Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah (tingkat kota maupun provinsi) antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Kominfo, Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI), akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan media melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan.
5. Keragaman tema materi/ pesan penyuluhan dan KIE yang disampaikan ke masyarakat yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
6. Peningkatan penggunaan media KIE dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM kepada masyarakat seperti pemanfaatan videotron yang ditampilkan di

tempat-tempat umum wilayah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

7. Peningkatan konten/ materi informasi edukasi melalui media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan tagline KataBPOM, Cek KLIK, dan BPOM Mobile.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan penyuluhan dan KIE Obat dan Makanan dengan *Stakeholder* terkait terutama unsur penta heliks dalam pengawasan Obat dan Makanan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media.
- 2) Peningkatan strategi penyuluhan dan KIE dengan cara mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta dan memerhatikan kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah.
- 3) Memanfaatkan media KIE yang banyak diakses masyarakat seperti media luar ruang melalui pemasangan poster, banner, dan videotron di tempat-tempat umum.
- 4) Menyusun konten/materi penyuluhan dan KIE untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, misalnya melalui infografis atau videografis mengenai nomor izin edar, bahan berbahaya, label produk Obat dan Makanan.
- 5) Menggencarkan promosi tagline KataBPOM dan Cek KLIK melalui berbagai media.

### **6.5 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kesadaran

masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022:

| Indikator   | Output |       |        | Input (anggaran) |             |        | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|-------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R     | %      | T                | R           | %      |             |             |             |
| Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 87     | 91,04 | 104,64 | 168.065.100      | 165.510.641 | 98,48% | <b>1,06</b> | <b>0,06</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal serta sumber daya manusia yang memadai di bidang komunikasi dan informasi Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

#### **6.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Intensifikasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui berbagai program inovasi, seperti Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan

Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta).

- 2) Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.
- 3) Gencarnya promosi Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan menggunakan tagline KataBPOM dan Cek KLIK pada materi dan infografis yang telah disusun.

#### 6.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut   |              |          |
|----|--|---|--------------|----------|
|    |  | Selesai   | Belum        |          |
|    |  |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Penyusunan program KIE terkait semua komoditi Obat dan Makanan   | Telah disusun perencanaan pelaksanaan KIE Obat dan Makanan periode tahun 2022   | -            | -        |
| 2  | Sosialisasi tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan agar masyarakat lebih sadar akan perannya dalam sistem | Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan tahun 2022 melalui berbagai media (tatap muka, <i>zoom meeting</i> , media cetak/elektronik) sesuai perencanaan | -            | -        |
|    |  | Pelaksanaan bimbingan teknis terkait Obat dan   | -            | -        |

| No | Rekomendasi                               | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
|    | pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. | Makanan melalui berbagai program intervensi dan pendampingan pelaku usaha Obat dan Makanan pada tahun 2022   |              |          |
|    |   | Pelaksanaan Pagelaran Semarak Inovasi Obat dan Makanan Punya Kite BBPOM Jakarta ( <i>Passionate Jakarta</i> ) dengan mengundang berbagai <i>stakeholder</i> di Provinsi DKI Jakarta serta pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan untuk sosialisasi inovasi pelayanan publik serta sistem pengawasan keamanan Obat dan Makanan pada 22 September 2022 | -            | -        |

### 6.8 Evaluasi Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja tahun 2022 terkait Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro

Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

### 3.4. SASARAN STRATEGIS III

Capaian sasaran strategis III, yaitu meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

#### 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

##### 7.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 87,7              | 95,1                 | 108,44             | Memenuhi Ekspetasi |

**Tabel 22.** Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha.

Dasar pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021

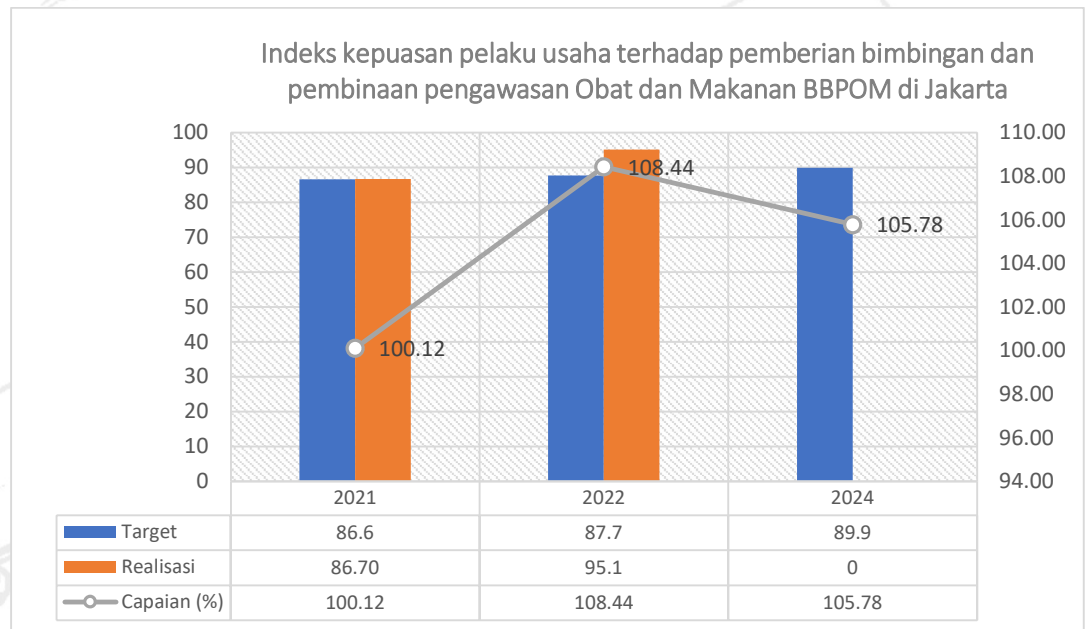
Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://surveiprkom.pom.go.id>.

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan triwulan ketiga sebesar 95,10 dan jika dibandingkan dengan target 2022 sebesar 87,7 maka capaian 108,44 %. dengan jumlah kegiatan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dan jumlah responden sebanyak 1236 (seribu dua ratus tiga puluh enam ) responden.

## **7.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

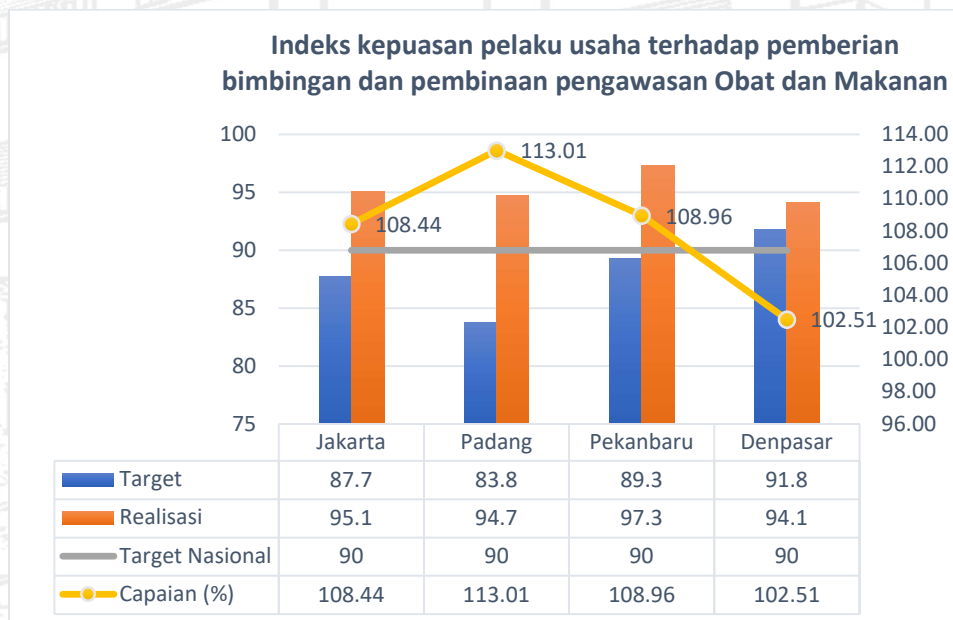
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dari 86,70 menjadi 95,10 dan jika dilihat target tahun 2024 BBPOM Jakarta dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha dengan mempertahankan

konsistensi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha



**Gambar 21.** Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

### 7.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



**Gambar 22.** Perbandingan Indeks kepatuhan (*Compliance Index*) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 dengan Balai Lain

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara melebihi target nasional. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis maka realisasi dan capaian BBPOM di Jakarta menempati urutan kedua pada indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM di Jakarta mendapatkan penghargaan dari Badan POM untuk balai dengan jumlah responden survey dan jumlah penyelenggaraan terbanyak. Jumlah responden sebanyak 1236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) dan jumlah penyelenggaraan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kegiatan

#### **7.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2022 yang semula sebesar 86,5 pada tahun 2021 menjadi 87,7.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan *desk* CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, *desk* registrasi, baik secara luring maupun daring.

#### **7.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

- 1) Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha pada tahun ini Balai Besar POM di Jakarta, secara kontinu melaksanakan desk CAPA untuk perbaikan hasil audit ataupun diskusi terkait perbaikan dokumen untuk pemenuhan dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB untuk berkomunikasi kepada pelaku usaha terhadap dokumen yang telah disampaikan melalui sistem e-sertifikasi CPPO

- 2) Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan kegiatan Kerling Jakarta dan Sultan Betawi untuk memberikan informasi bagi pelaku usaha. Kerling Jakarta merupakan kegiatan jemput bola di mana tim Balai Besar POM di Jakarta mengunjungi lokasi-lokasi kantor Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi, sedangkan untuk Sultan Betawi layanan diberikan di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha.
- 3) Kegiatan desk registrasi yang diselenggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang pada triwulan ketiga 2022 telah diselenggarakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022, tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022, dan tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dan luring
- 4) Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk memperluas layanan terhadap UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha jika akan memerlukan pelayanan.
- 5) Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke *booth* BBPOM di Jakarta yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

#### **7.6 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

- 1) Kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan Balai Besar POM di Jakarta meningkat seiring dengan banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan *feedback* segera dari Balai Besar POM di Jakarta
- 2) Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pelayanan Balai Besar POM di Jakarta juga meningkat dengan diselenggarakannya

pelayanan prima dalam bentuk *desk* CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen dalam rangka permohonan izin penarapan CPPOB maupun desk registrasi

- 3) Kegiatan fasilitasi pelaku usaha UMKM pangan, produksi obat tradisional dan produksi kosmetik juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Jakarta
- 4) Kegiatan Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang bertujuan mendekatkan pelayanan dengan pelaku usaha diharapkan kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan bimbingan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta semakin meningkat

### **7.7 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta *stakeholder* dan masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## **8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

### **8.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut ini adalah realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 23.** Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                       | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 76,65             | 80,22                | 104,66             | Memenuhi Ekspetasi |

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

| Kategori    | Interval Indeks |
|-------------|-----------------|
| Tidak Baik  | < 45            |
| Kurang Baik | 45 – 60         |
| Cukup Baik  | 60 – 75         |
| Baik        | 75 – 90         |
| Sangat Baik | ≥ 90            |

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

$I_i$  = skor faktor ke-i

$I_{\min}$  = skor faktor minimal

$I_{\max}$  = skor faktor maksimal

n = banyaknya responde

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 diperoleh sebesar 96,03 dengan kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan target sebesar 91,00 diperoleh capaian sebesar 105,53% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas Efektif. Nilai indeks ini diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap 251 responden.

Nilai indeks ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

| Unsur Pelayanan |                                    | Nilai |
|-----------------|------------------------------------|-------|
| U1              | Persyaratan                        | 94,62 |
| U2              | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur    | 94,62 |
| U3              | Waktu Penyelesaian                 | 95,84 |
| U4              | Biaya/Tarif                        | 95,88 |
| U5              | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 95,75 |
| U6              | Kompetensi Pelaksana               | 96,88 |
| U7              | Perilaku Pelaksana                 | 97,41 |

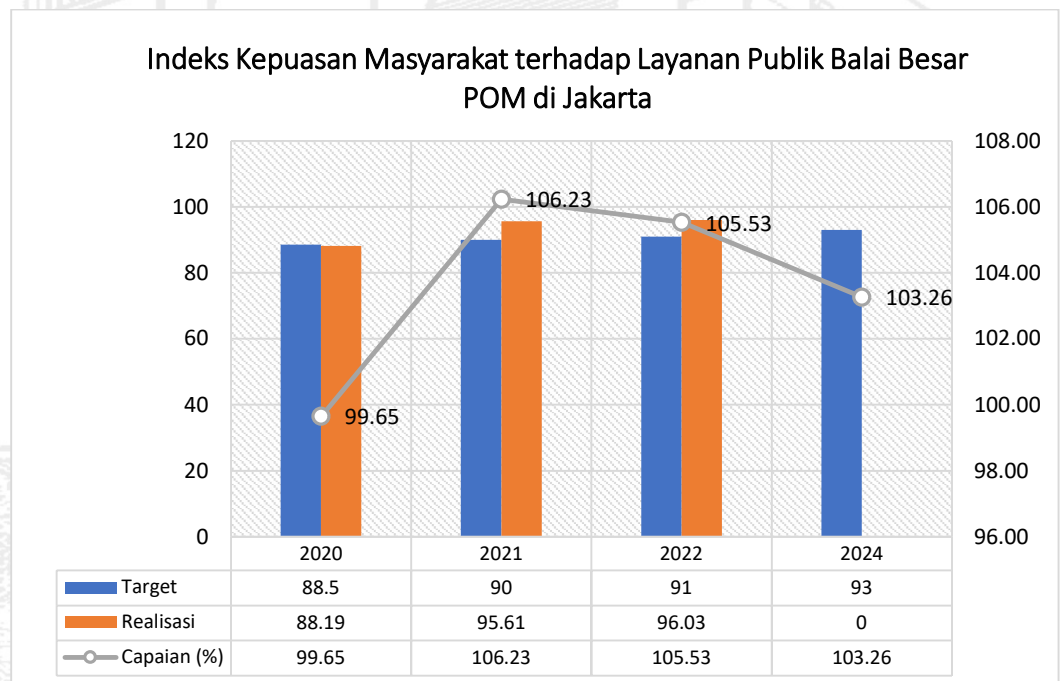
|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| U8    | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 96,61        |
| U9    | Sarana dan Prasarana                     | 96,68        |
| Nilai |  | <b>96,03</b> |

Dari nilai per unsur diketahui bahwa unsur pelayanan perilaku pelaksana memperoleh nilai tertinggi sedangkan unsur persyaratan dan sistem, mekanisme, dan prosedur memperoleh nilai terendah.

### 8.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari 2020-2022 secara berturut-turut sebesar 88,19 (Baik), 95,61 (Sangat Baik) dan 96,03 (Sangat Baik).

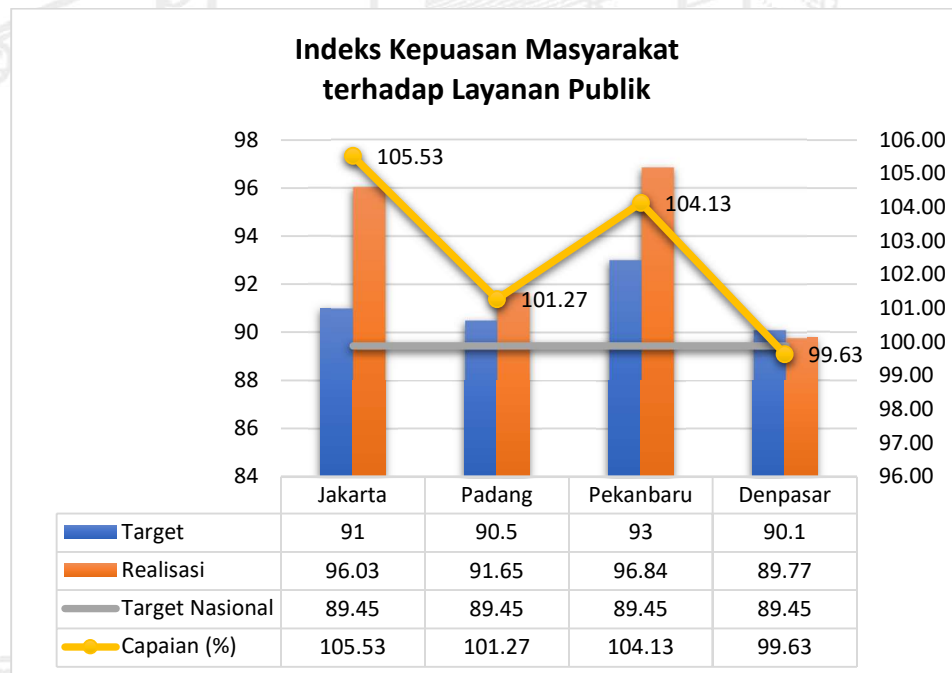
Capaian kinerja pada tahun 2020-2022 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu secara berturut-turut sebesar 99,65%, 106,23%, dan 105,53%.



**Gambar 23.** Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 sebesar 96,03 telah melampaui target akhir renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 93 dengan capaian kinerja sebesar 103,26% dengan kriteria telah Memenuhi ekspektasi dan kesimpulan efektivitas Efektif. Dengan hasil ini maka BBPOM di Jakarta optimis mencapai target Renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara kontinu.

### 8.3 Realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



**Gambar 24.** Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Nilai indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 secara berurutan, yaitu 96,84 untuk BBPOM di Pekanbaru, 96,03 untuk BBPOM di Jakarta, 91,65 untuk BBPOM di Padang, dan 89,77 untuk BBPOM di Denpasar, sehingga diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada BBPOM di Pekanbaru.

Capaian kinerja indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 yang memenuhi ekspektasi secara berurutan, yaitu 105,53% untuk BBPOM di Jakarta, 104,13% untuk BBPOM di Pekanbaru. 101,27 untuk BBPOM di Padang. Sedangkan, capaian indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 di wilayah kerja BBPOM di Denpasar diperoleh sebesar 99,63% dengan kriteria kinerja Belum memenuhi ekspektasi. Apabila dibandingkan dengan target nasional, nilai indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 di wilayah BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar semuanya telah melampaui target.

#### **8.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berikut ini penyebab keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemberian layanan publik BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal baik secara tatap muka maupun secara online dengan melalui Whatsapp, media sosial (*Instagram, Facebook, dan Twitter*) dan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Telah diadakannya konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.
- 3) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta melalui media cetak koran, media sosial dan tayangan media luar ruang seperti *banner* dan videotron yang mudah diakses masyarakat.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana BBPOM di Jakarta sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima

sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan yang mudah diakses dan transparan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- 1) Peningkatan akses layanan informasi berbasis digital baik melalui subsite maupun portal Jakdigital.
- 2) Diadakannya sosialisasi mengenai ruang lingkup parameter uji kepada penerima layanan.

### 8.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

| Indikator   | Output |       |        | Input (anggaran) |           |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|-------|--------|------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R     | %      | T                | R         | %     |             |             |             |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 91     | 96,03 | 105,53 | 3.069.000        | 3.065.625 | 99,89 | <b>1,06</b> | <b>0,06</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan layanan publik baik secara *offline* dan *online* serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan publik

dalam rangka pencapaian *output* indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta yang meningkat.

### **8.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan rencana aksi tindak lanjut (RATL) terhadap pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2022 serta monitoring dan evaluasi terhadap RATL yang dilakukan per triwulan sebagai komitmen BBPOM di Jakarta dalam memberikan pelayanan prima dan memperbaiki kinerja secara terus-menerus.
- 2) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau.

### **8.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi yang baik sehingga aliran | Pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam pengelolaan informasi, media social, dan komunikasi serta | -            | -        |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
|    | informasi dapat lebih persuasif.  | <i>workshop</i> pelayanan publik prima.   |              |          |
| 2  | Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.  | Diadakannya <i>e-kiosk</i> sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , dan <i>Twitter</i> BPOM di Jakarta                                 | -            | -        |
| 3  | Melakukan kaji ulang terkait dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak stakeholder untuk mendapatkan saran perbaikan melalui Forum Konsultasi Publik. | Telah diadakan Forum Konsultasi Publik untuk melakukan kaji ulang dan penetapan standar pelayanan dengan masukan dari berbagai kalangan, meliputi perwakilan asosiasi, perwakilan akademisi, perwakilan pengguna layanan, dan lintas sektor terkait pada 22 September 2022. | -            | -        |
| 4  | Sosialisasi prosedur/alur pelayanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.  | Diadakannya <i>e-kiosk</i> sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , dan <i>Twitter</i>   | -            | -        |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
|    |   | BBPOM di Jakarta   |              |          |
| 5  | Melakukan kaji ulang terkait <i>timeline</i> yang ditetapkan secara internal.                                   | Dilakukan kaji ulang dan revisi terhadap <i>timeline</i> pelayanan publik pada SOP Mikro                 | -            | -        |
| 6  | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar pelayanan dengan realisasi pelaksanaan pelayanan. | Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan publik (layanan informasi dan pengaduan) per triwulan | -            | -        |

## 8.8 Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## 9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

### 9.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

**Tabel 24.** Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                           | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria            |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91                | 96,03                | 105,53             | Memenuhi Ekspektasi |

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 diperoleh sebesar 96,03 dengan kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan target sebesar 91,00 diperoleh capaian sebesar 105,53% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas Efektif. Nilai indeks ini diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap 251 responden.

Nilai indeks ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

| Unsur Pelayanan |                                 | Nilai |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| U1              | Persyaratan                     | 94,62 |
| U2              | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 94,62 |
| U3              | Waktu Penyelesaian              | 95,84 |
| U4              | Biaya/Tarif                     | 95,88 |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| U5    | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan       | 95,75        |
| U6    | Kompetensi Pelaksana                     | 96,88        |
| U7    | Perilaku Pelaksana                       | 97,41        |
| U8    | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 96,61        |
| U9    | Sarana dan Prasarana                     | 96,68        |
| Nilai |  | <b>96,03</b> |

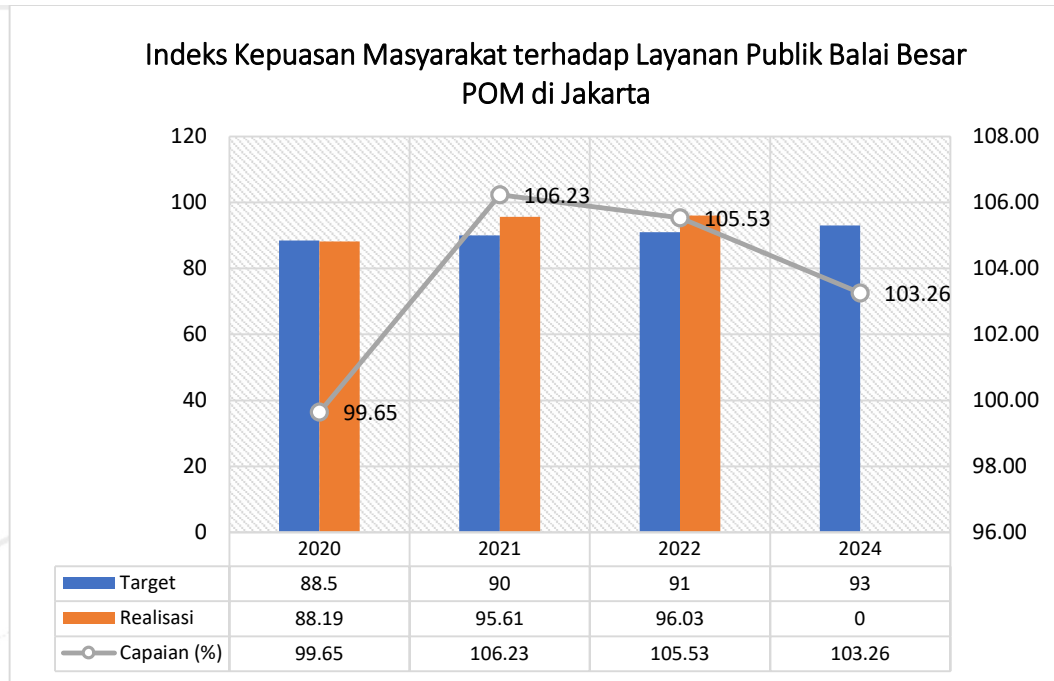
**Tabel 25.** Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada Balai Besar POM di Jakarta

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis pelayanan dan per unsur pelayanan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

| Jenis Pelayanan                 | U1     | U2     | U3    | U4     | U5     | U6     | U7     | U8    | U9     | Nilai SKM per Layanan |
|---------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------|
| Pengujian                       | 100,00 | 100,00 | 97,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | <b>98,77</b>          |
| Layanan Informasi dan Pengaduan | 94,58  | 94,58  | 95,83 | 95,85  | 95,72  | 96,85  | 97,39  | 96,65 | 96,65  | <b>96,01</b>          |

## 9.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Berikut ini adalah grafik indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024:



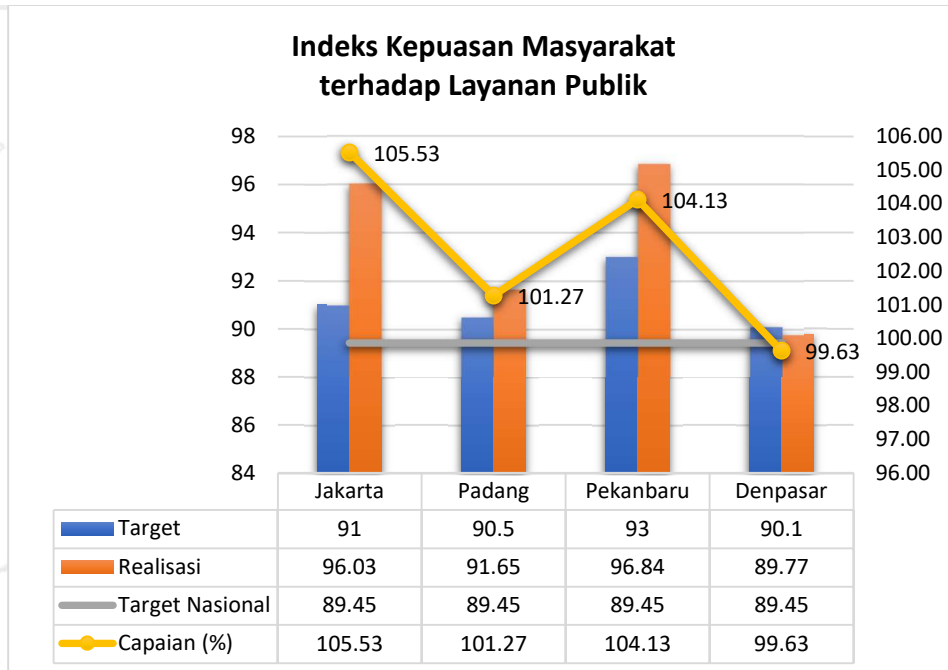
**Gambar 25.** Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari 2020-2022 secara berturut-turut sebesar 88,19 (Baik), 95,61 (Sangat Baik) dan 96,03 (Sangat Baik).

Capaian kinerja pada tahun 2020-2022 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu secara berturut-turut sebesar 99,65%, 106,23%, dan 105,53%.

Realisasi indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 sebesar 96,03 telah melampaui target akhir renstra RPJMN 2020-2024 sebesar 93 dengan capaian kinerja sebesar 103,26% dengan kriteria telah Memenuhi ekspektasi dan kesimpulan efektivitas Efektif. Dengan hasil ini maka BBPOM di Jakarta optimis mencapai target Renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara kontinu.

### **9.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara**



**Gambar 26.** Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Nilai indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 secara berurutan, yaitu 96,84 untuk BBPOM di Pekanbaru, 96,03 untuk BBPOM di Jakarta, 91,65 untuk BBPOM di Padang, dan 89,77 untuk BBPOM di Denpasar, sehingga diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada BBPOM di Pekanbaru.

Capaian kinerja indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 yang memenuhi ekspektasi secara berurutan, yaitu 105,53% untuk BBPOM di Jakarta, 104,13% untuk BBPOM di Pekanbaru. 101,27 untuk BBPOM di Padang. Sedangkan, capaian indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 di wilayah kerja BBPOM di Denpasar diperoleh sebesar 99,63% dengan kriteria kinerja Belum memenuhi ekspektasi. Apabila dibandingkan dengan target nasional, nilai indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 di wilayah BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar semuanya telah melampaui target.

#### **9.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berikut ini penyebab keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemberian layanan publik BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal baik secara tatap muka maupun secara online dengan melalui Whatsapp, media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter) dan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Telah diadakannya konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.
- 3) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta melalui media cetak koran, media sosial dan tayangan media luar ruang seperti banner dan videotron yang mudah diakses masyarakat.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana BBPOM di Jakarta sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan yang mudah diakses dan transparan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- 1) Peningkatan akses layanan informasi berbasis digital baik melalui subsite maupun portal Jakdigital.
- 2) Diadakannya sosialisasi mengenai ruang lingkup parameter uji kepada penerima layanan.

#### **9.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

| Indikator   | Output |       |        | Input (anggaran) |           |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|-------|--------|------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R     | %      | T                | R         | %     |             |             |             |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 91     | 96,03 | 105,53 | 3.069.000        | 3.065.625 | 99,89 | <b>1,06</b> | <b>0,06</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan layanan publik baik secara *offline* dan *online* serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian output indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta yang meningkat.

### **9.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan rencana aksi tindak lanjut (RATL) terhadap pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2022 serta monitoring dan evaluasi terhadap RATL yang dilakukan per triwulan sebagai komitmen BBPOM di Jakarta dalam memberikan pelayanan prima dan memperbaiki kinerja secara terus-menerus

- 2) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau.

### 9.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|--|--|--------------|----------|
|    |  | Selesai  | Belum        |          |
|    |  |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi yang baik sehingga aliran informasi dapat lebih persuasif. | Pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam pengelolaan informasi, media social, dan komunikasi serta <i>workshop</i> pelayanan publik prima.   | -            | -        |
| 2  | Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.                     | Diadakannya <i>e-kiosk</i> sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , dan <i>Twitter</i> BBPOM di Jakarta | -            | -        |
| 3  | Melakukan kaji ulang terkait   | Telah diadakan Forum Konsultasi Publik untuk   | -            | -        |

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|--|--|--------------|----------|
|    |  | Selesai  | Belum        |          |
|    |  |  | Rencana Aksi | Timeline |
|    | dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak stakeholder untuk mendapatkan saran perbaikan melalui Forum Konsultasi Publik. | melakukan kaji ulang dan penetapan standar pelayanan dengan masukan dari berbagai kalangan, meliputi perwakilan asosiasi, perwakilan akademisi, perwakilan pengguna layanan, dan lintas sektor terkait pada 22 September 2022.               |              |          |
| 4  | Sosialisasi prosedur/alur pelayanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.   | Diadakannya <i>e-kiosk</i> sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , dan <i>Twitter</i> BBPOM di Jakarta | -            | -        |
| 5  | Melakukan kaji ulang terkait <i>timeline</i> yang ditetapkan secara internal.  | Dilakukan kaji ulang dan revisi terhadap <i>timeline</i> pelayanan publik pada SOP Mikro   | -            | -        |
| 6  | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar pelayanan dengan realisasi   | Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan publik (layanan informasi dan pengaduan) per triwulan   | -            | -        |

| No | Rekomendasi            | Tindak Lanjut |              |          |
|----|------------------------|---------------|--------------|----------|
|    |                        | Selesai       | Belum        |          |
|    |                        |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    | pelaksanaan pelayanan. |               |              |          |

### 9.8 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta *stakeholder*, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## 3.6. SASARAN STRATEGIS IV

Capaian sasaran strategis IV, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

### 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

#### 10.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berikut ini adalah tabel realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.

**Tabel 26.** Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 90                | 102,83               | 114,26             | Memenuhi Ekspetasi |

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud dengan keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; dan
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;

Sedangkan pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha; dan

2. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Adapun persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$**

1. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

3. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

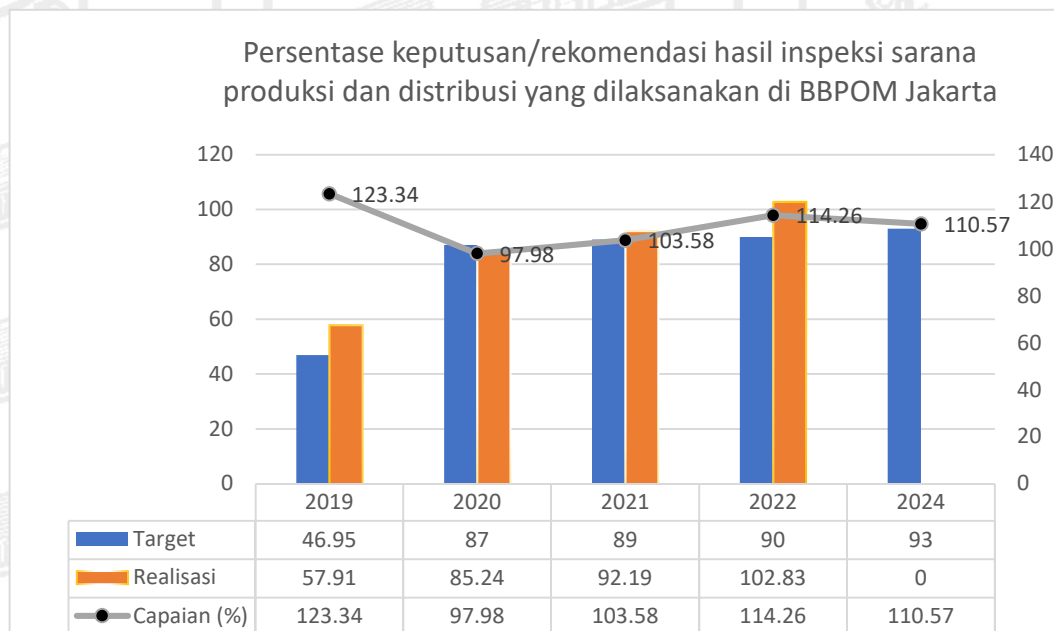
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2022 melebihi dari target

yang ditetapkan, yaitu 102,83 dengan capaian 114% terhadap target sehingga masuk dalam kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI

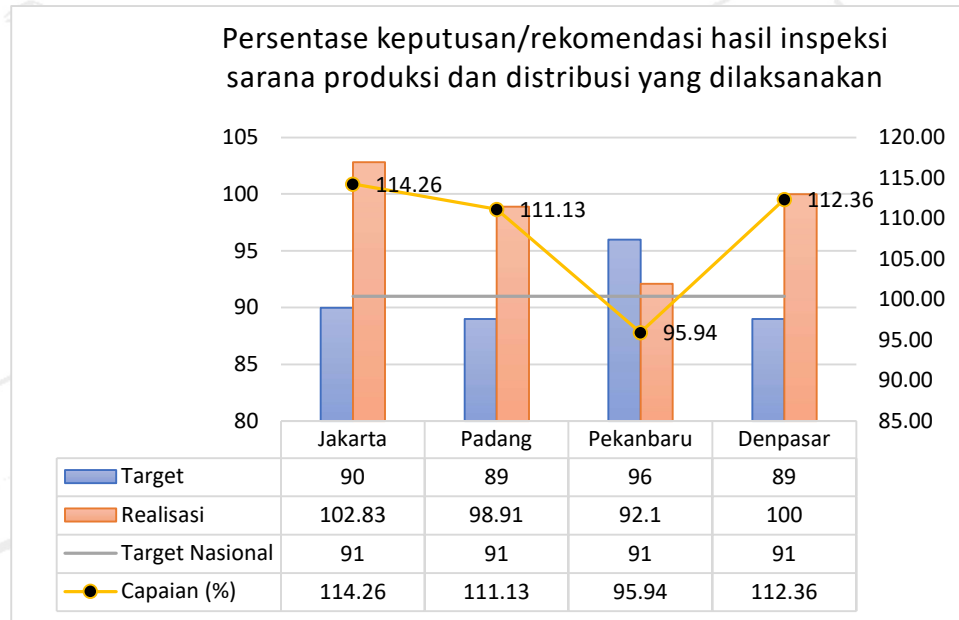
### 10.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi Indikator meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan respon terhadap tindak lanjut baik dari pelaku usaha maupun lintas sektor. Demikian juga dengan capaian kinerja, terdapat peningkatan capaian meskipun target juga meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan semakin baiknya performa kinerja BBPOM Jakarta dalam pencapaian target indikator ini. Berdasarkan proyeksi terhadap target periode akhir renstra, target dapat tercapai dengan capaian 110,57% dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI



**Gambar 27.** Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

### 10.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



**Gambar 28.** Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan Balai Lain yang Setara

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah jauh melebihi target nasional dan paling tinggi bila dibandingkan dengan BBPOM Padang, BBPOM Pekan Baru, dan BBPOM Denpasar. Capaian BBPOM di Jakarta paling tinggi diantara Balai lain dan masuk dalam kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BBPOM Jakarta pada indikator ini berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja Badan POM.

### 10.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja dikarenakan sebagai berikut:

1. Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh Balai Besar POM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan;
2. Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan; dan
3. Pusat semakin responsif terhadap rekomendasi dari Balai Besar POM di Jakarta sehubungan dengan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun laporan dari Balai.

### 10.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2022:

**Tabel 27.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2022

| Indikator  | Output |        |         | Input (anggaran) |             |        | IE   | TE   | Capaian TE |
|--|--------|--------|---------|------------------|-------------|--------|------|------|------------|
|  | T      | R      | %       | T                | R           | %      |      |      |            |
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 90     | 102,83 | 114,26% | 309.634.250      | 307.879.352 | 99,43% | 1,15 | 0,15 | Efisien    |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,15 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran.

Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

#### **10.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

- 1) Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (*Spreadsheet*) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada sistem ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- 2) Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan SRIKANDI, spreadsheet Diskoria yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha BBPOM di Jakarta.
- 3) Adanya kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam *spreadsheet* Roti Buai (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta).
- 4) Adanya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

#### **10.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut      |   |               |
|----|--|--------------------|---|---------------|
|    |  | Selesai*           | Belum**   |               |
|    |  |                    | Rencana Aksi  | Timeline      |
| 1  | Mendorong tindak lanjut dari BPOM pusat terkait rekomendasi inspeksi yang dilaksanakan pusat | Sudah dilaksanakan | Tindak lanjut dari pusat akan ditunggu sampai akhir TW IV karena terkait keterlambatan respon | Desember 2022 |

#### **10.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## **11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

### **11.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut ini adalah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

**Tabel 28.** *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>   | <b>Target Tahun 2022</b> | <b>Realisasi Tahun 2022</b> | <b>Capaian Tahun 2022</b> | <b>Kriteria</b>    |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 79                       | 79,93                       | 101,18                    | Memenuhi Ekspetasi |

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;

- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- 3) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- 4) Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- 5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/$
- 7) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(59,87\%+100\%)/2$
- 8) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 79,94

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

$A = 267/446 \times 100\%$

$A = 59,87\%$

B. Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

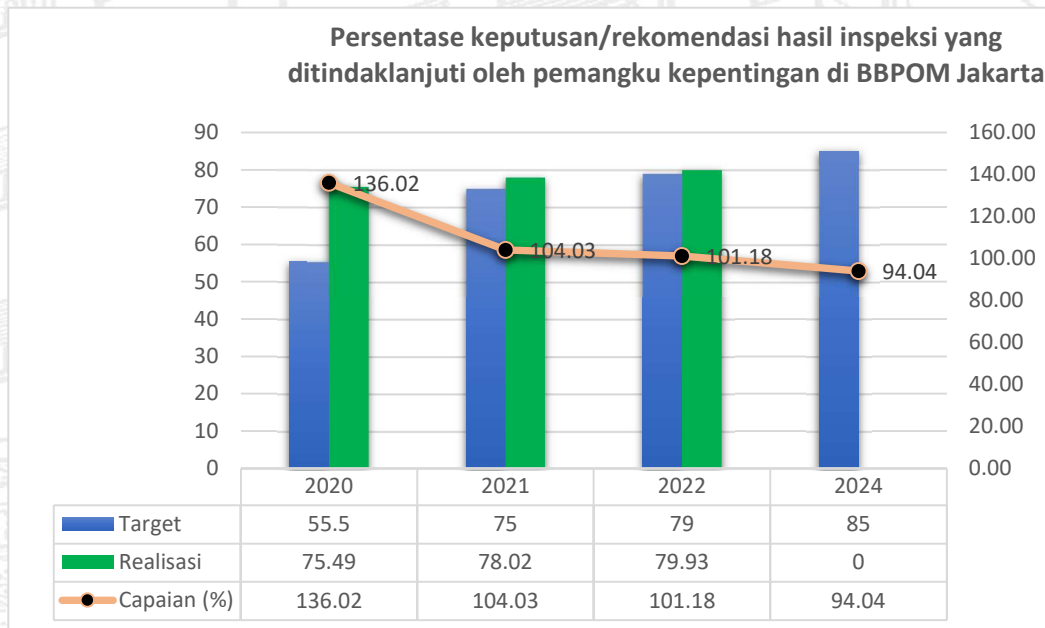
B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/  
 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x  
 100%

$$B = 22/22 \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,93% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu lebih dari 79%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 101,18 % dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI”.

**11.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-**



**2024**

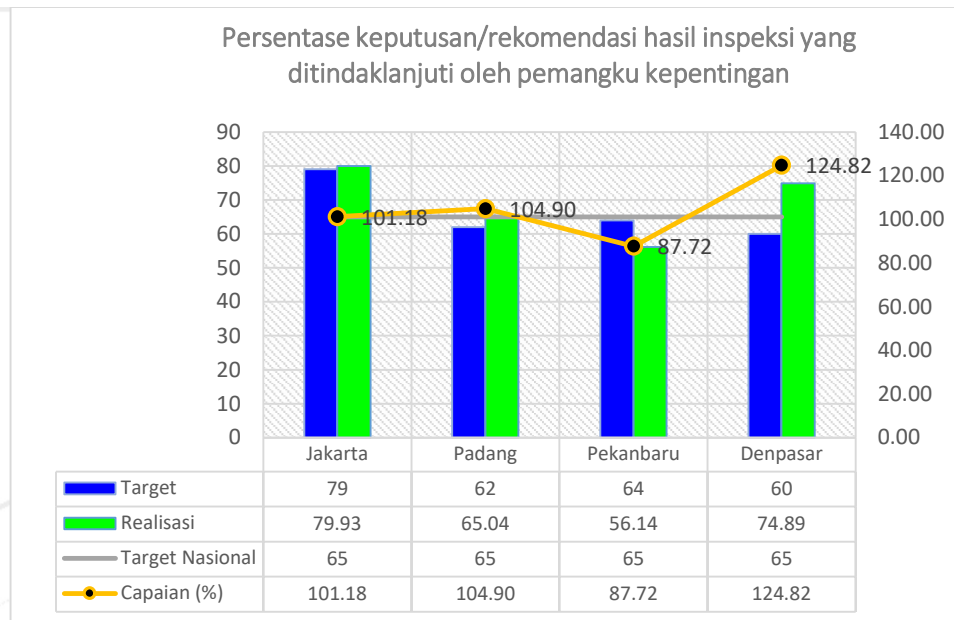
**Gambar 29.** Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

*antara Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024*

Realisasi indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 75,49 tahun 2020, 78,02 tahun 2021 dan 79,93 pada tahun 2022. Capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan target yang signifikan, yaitu dari 75 pada tahun 2021 menjadi 79 pada tahun 2022. Namun Realisasi ini tetap mencapai target yaitu dengan capaian 101,18% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Proyeksi capaian terhadap target akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024 adalah 94,04% sehingga perlu disusun rencana tindak lanjut untuk mencapai target tersebut.

### **11.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah mencapai target nasional sama dengan Balai Besar POM di Surabaya (dengan kriteria Baik), Balai Besar POM di Bandung (kriteria Cukup) dan Balai Besar POM di Makassar (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Semuanya telah mencapai melebihi target nasional (60 %).



**Gambar 30.** Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 dengan Balai Lainnya

Realisasi BBPOM di Jakarta paling tinggi dibandingkan BBPOM Denpasar, BBPOM Padang dan BBPOM Pekanbaru. Demikian juga dengan target, BBPOM Jakarta memiliki target paling tinggi dibandingkan BBPOM Pekanbaru, BBPOM Padang dan BBPOM Denpasar. Target dan Realisasi BBPOM Jakarta juga jauh melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BBPOM Jakarta pada indikator ini berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja Badan POM.

#### 11.4 Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

| Keputusan/Rekomendasi  | Rekomen dasi | Tindak Lanjut | Realisasi (%) | Rata-Rata Realisasi (%) |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | 446          | 267           | 59,87         | 79,93                   |

|   |    |    |     |  |
|---|----|----|-----|--|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | 22 | 22 | 100 |  |
|---|----|----|-----|--|

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat disimpulkan penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah banyaknya tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terhadap rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, melalui aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta juga dengan BPOM pusat, sudah berjalan dengan baik sehingga seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Sedangkan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha masih perlu ditingkatkan karena hanya 59,87%. Hal ini disebabkan lambatnya respon pelaku usaha terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Jakarta. Sebagian pelaku usaha yang merupakan instansi pemerintah memerlukan waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan sebagai bentuk respon terhadap rekomendasi BBPOM di Jakarta karena terkait perbaikan sarana prasarana

### 11.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022:

**Tabel 29.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022

| Indikator  | Output |       |         | Input (anggaran) |             |        | IE   | TE   | Capaian TE |
|--|--------|-------|---------|------------------|-------------|--------|------|------|------------|
|  | T      | R     | %       | T                | R           | %      |      |      |            |
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang | 79     | 79,93 | 101,18% | 316.632.000      | 314.721.257 | 99,40% | 1,02 | 0,02 | Efisien    |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

#### **11.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- 1) Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam *spreadsheet* Roti Buaia (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta)
- 2) Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
- 3) Koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pembinaan sarana, misal pembinaan sarana pelayanan kefarmasian oleh Dinas/Suku Dinas Kesehatan terkait dengan memberikan tembusan surat rekomendasi tindak lanjut
- 4) Kegiatan pendampingan secara komprehensif terhadap tindaklanjut yang dilakukan lintas sektor terkait dengan Kegiatan Pertemuan dan rapat evaluasi serta pendampingan smart BPOM
- 5) Kegiatan pendampingan pemenuhan tool pengawasan PIRT yang dilakukan secara bertahap

### 11.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Selesai*     | Tindak Lanjut   |                      |
|----|--|--------------|---|----------------------|
|    |  |              | Belum**   |                      |
|    |  |              | Rencana Aksi  | Timeline             |
|    | Mendorong respon tindak lanjut dari pihak sarana terhadap surat yang diterbitkan BBPOM di Jakarta Dalam Progress CAPA Sepanjang tahun 2022 | Dalam proses | sarana yang dihitung selain CAPA yang disampaikan via surat resmi, dihitung juga yang disampaikan via email walaupun tanpa surat resmi, juga CAPA yang diselesaikan (closed) di sarana saat pemeriksaan | Sepanjang tahun 2022 |

### 11.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

### 12.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 87                | 97,8                 | 112,42             | Memenuhi Ekspetasi |

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;

2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
5. Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik;
6. Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK; dan
7. Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2022 sebanyak 97,80% dari target yang ditetapkan 87%, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan dua tahun 2022 sebesar 112,41% dengan kriteria “sangat baik”.

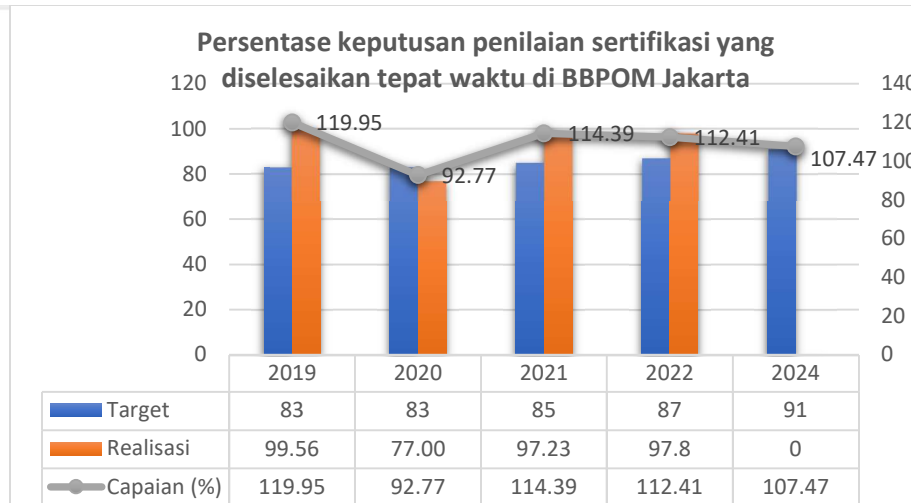
Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan selama tahun 2022 sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan). Sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan ) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2022 dan 50 (lima puluh ) merupakan keputusan dari permohonan tahun sebelumnya. Dari 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) keputusan memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan dan 18

(delapan belas) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Permohonan yang diterima sampai selama tahun 2022 sejumlah 742 (tujuh ratus empat puluh dua) dan masih terdapat permohonan yang diterima tahun 2022 akan diselesaikan di tahun 2023 sebanyak 54 (lima puluh empat). Adanya permohonan yang diterima tahun 2022 yang akan diselesaikan tahun 2023 karena pelaku usaha belum menyelesaikan tindakan perbaikan atas audit yang dilakukan dan karena terdapat permohonan yang diterima di akhir tahun sehingga akan diaudit tahun 2023

Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan empat tahun 2022 sebanyak 81 (empat puluh sembilan) dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu

### **12.2 Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun tahun sebelumnya dan target akhir periode renstra 2020-2024**

Berdasarkan tabel di atas capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari 85% menjadi 87%. Namun jika dilihat dari angka realisasi mengalami kenaikan dari 97,23% menjadi 97,8%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai Besar POM di Jakarta.



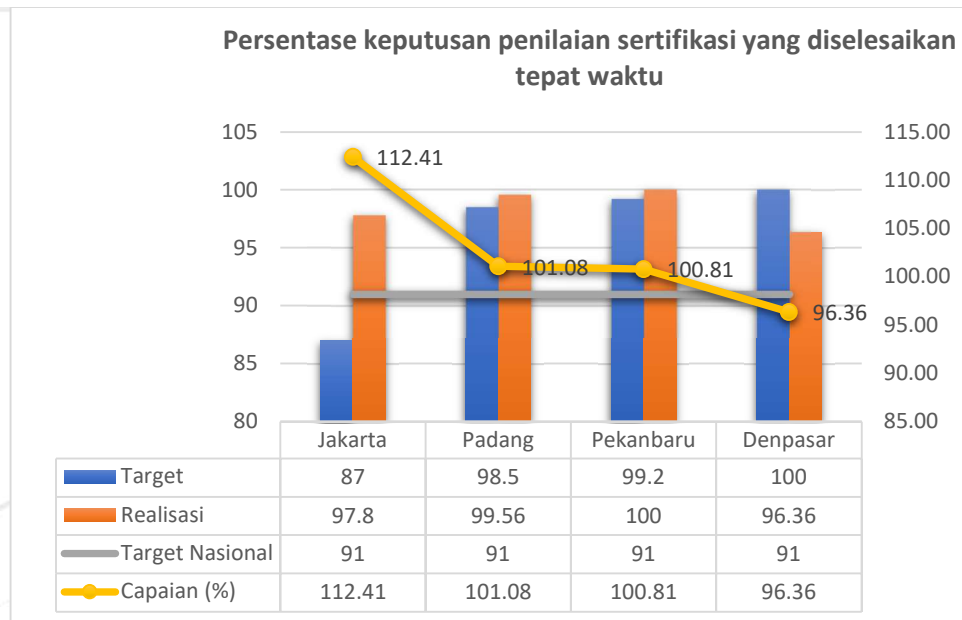
**Gambar 31.** Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2022

Jika melihat target capaian pada tahun 2024 BBPOM di Jakarta diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2024.

### 12.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Berikut adalah grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lain yang sejenis/setara:

Berdasarkan grafik, realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan balai lain yang setara melebihi target nasional, Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.



**Gambar 32.** Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain

#### **12.4 Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- 1) Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.
- 2) Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan

sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

- 3) Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2021 yang lalu merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan berlakunya sistem yang baru ini masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dan bingung bagaimana mengatasinya, begitu juga dengan petugas

#### **12.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan di tahun 2022 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain

- 1) Balai Besar POM di Jakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta
- 2) Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
- 3) Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar

POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan *desk CAPA* dan *desk CPPOB* diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. *Desk CAPA* dan *desk CPPOB* sampai dengan triwulan empat 2022 telah diselenggarakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan data sebagai berikut:

| Triwulan   | Tanggal pelaksanaan                                   |
|------------|---|
| Triwulan 1 | 10 Januari 2022<br>25 Februari 2022<br>28 Maret 2022, |
| Triwulan 2 | 16 Juni 2022  |
| Triwulan 3 | 12 Juli 2022<br>9 Agustus 2022<br>12 Agustus 2022     |
| Triwulan 4 | 29 Desember 2022                                      |

- 4) Di samping pelayanan prima dalam bentuk *Desk CAPA* dan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen izin penerapan CPPOB BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Sampai dengan triwulan empat *desk* registrasi telah dilaksanakan

sebanyak 9 (sembilan) kali baik secara daring maupun luring. Setelah kegiatan tersebut sampai triwulan keempat telah diterbitkan sebanyak 545 (lima ratus lima puluh empat) Nomor Izin edar (NIE) pangan olahan

| TW   | Tanggal pelaksanaan  |
|------|--|
| TW 1 | 16 Maret 2022  |
| TW 2 | 24 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022<br>20 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022   |
| TW 3 | 25 Juli 2022 sampai dengann 26 Juli 2022<br>24 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agsutus 2022<br>21 September 2022 sampai dengan 22 September 2022 |
| TW 4 | 19 Oktober 2022 dan 20 Oktober 2022<br>30 November 2022<br>13 Desember 2022 dan 14 Desember 2022   |

- 5) Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu. Adapun pelaksanaan kerling sampai dengan triwulan keempat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| No | Tanggal            | Lokasi                                    |
|----|--------------------|---|
| 1  | 10 Agustus 2022    | Kantor Walikota Jakarta Pusat             |
| 2  | 11 Agustus 2022    | Kantor Walikota Jakarta Utara             |
| 3  | 24 Agustus 2022    | Kantor Kecamatan Duren Sawit              |
| 4  | 1 September 2022   | RPTRA Manunggal                           |
| 5  | 22 Sepetember 2022 | Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta |
| 6  | 22 Desember 2022   | Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat       |
| 7  | 27 Desember 2022   | Dinas PPKUKM DKI Jakrta                   |

- 6) Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta

- 7) Kerjasama dan advokasi lintas sektor dalam membantu pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta
- 8) Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.
- 9) Inovasi Jak-Officer dimana dilakukan pelatihan pendampingan Ijin Penerapan CPPOB kepada tenaga pendamping kewirausahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Selain itu juga dilakukan pelatihan tentang bagaimana perijinan obat dan makanan kepada tenaga CRO dan AJIB (Antar Jemput Ijin Bermotor) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sehingga menjadi perpanjangan tangan Balai Besar POM di Jakarta jika ada pelaku usaha yang menanyakan tentang perijinan obat dan makanan.
- 10) Inovasi UMKM Jaw@ra yang merupakan percepatan dalam ijin edar produk UMKM secara masif dengan target yang tinggi, sehingga banyak pelaku usaha yang terbantu dan cepat dalam pemenuhan Ijin Penerapan CPPOB, pemenuhan CPOTB bertahap dan pemenuhan CPKB

#### **12.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

- 1) Sebagian sarana memiliki pemahaman yang rendah terhadap persyaratan baik karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
- 2) Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.
- 3) Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit

- 4) Beberapa kendala pada sistem *online* yang menyebabkan beberapa data hilang pada system, sehingga harus mengulang kembali proses input sampai evaluasi sampai terbit rekomendasi

### **12.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

- 1) Dengan telah dilakukannya Bimbingan Teknis bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta maka kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat.
- 2) Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratan CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA
- 3) Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penarapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- 4) Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan presepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Kelompok subtansi Pemeriksaan dan Kelompok subtansi Infokom
- 5) Lebih mengaktifkan lagi inovasi Samson (Satu jam saja *Sharing Online*) di hari Jumat untuk membahas beberapa aturan terbaru dan berbagi pengalaman antar inspektur sebagai salah satu upaya percepatan pemenuhan kompetensi dan *refresh* kompetensi petugas

**13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.**

**13.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut ini adalah realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

*Tabel 30. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022*

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                       | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 63                | 71,31                | 113,19             | Memenuhi Ekspetasi |

1. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

2. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

1. Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major; dan
2. Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan *form* yang berbeda dengan sarana produksi IOT

### 3. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

### 4. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

### 5. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

1. Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B; dan
2. Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

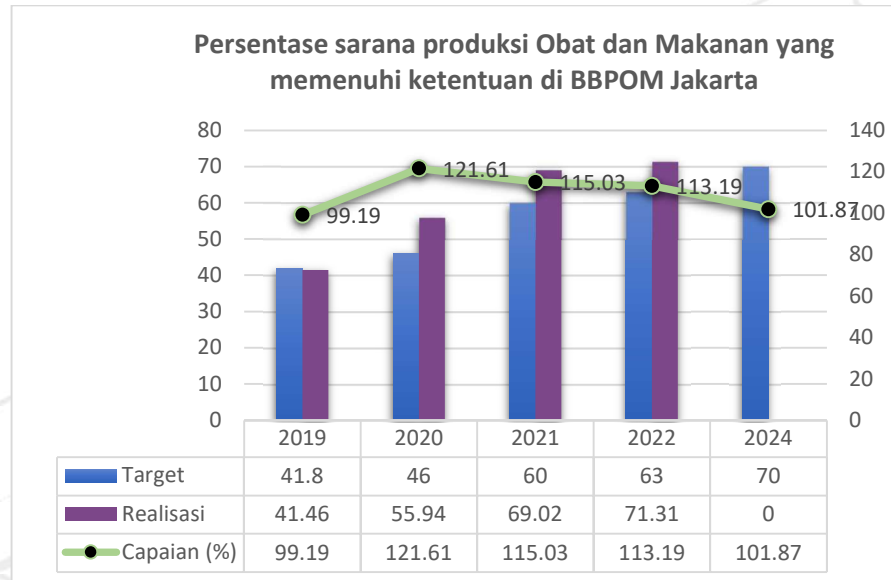
$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan =  $261/366 \times 100\%$

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 71,31%

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 71,31%, melebihi target 63% dengan capaian 113, 19% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI

### 13.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



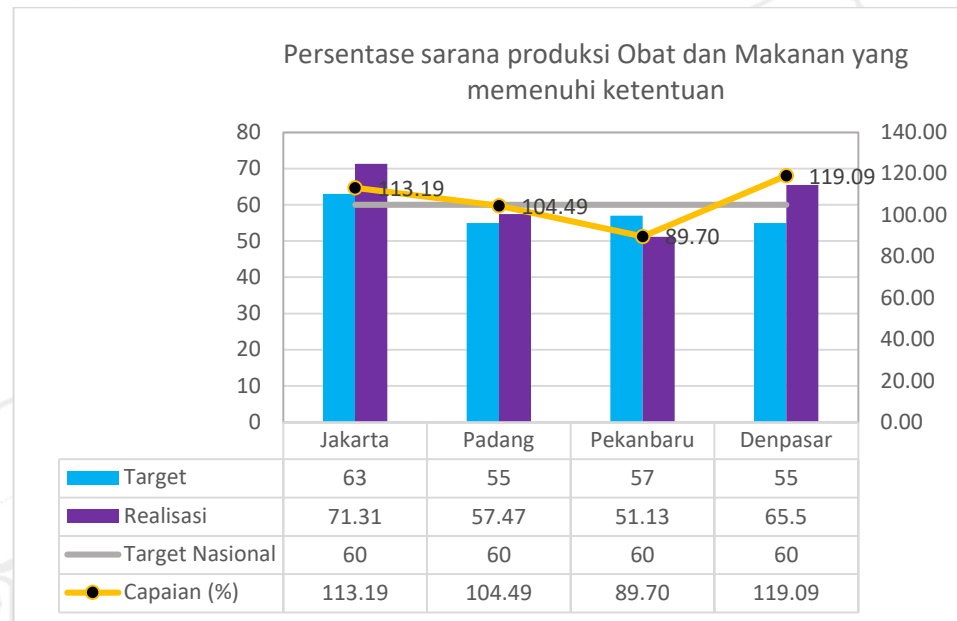
**Gambar 33.** Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 20212 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam grafik. BBPOM Jakarta berkomitmen meningkatkan kinerja sehingga penetapan target meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan realisasi yang tidak sebanding dengan kenaikan target menyebabkan penurunan capaian kinerja. Namun demikian, penurunan capaian tersebut tidak signifikan yaitu dari 115,03% pada tahun 2021 menjadi 113,19% pada tahun 2022, dan masih berada pada kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Berdasarkan proyeksi terhadap target RPJMN 2020-2024, BBPOM Jakarta mampu mencapai target dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI dengan mempertahankan kinerja yang telah dilakukan.

### 13.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik dibawah Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM Jakarta paling

tinggi bila dibandingkan BBPOM Denpasar, BBPOM Padang dan BBPOM Pekanbaru.



**Gambar 34.** Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain

Capaian indikator tidak dapat dibandingkan antar UPT karena perbedaan target yang cukup signifikan antar UPT. Secara umum, BBPOM Jakarta, BBPOM Denpasar dan BBPOM Padang berhasil mencapai target dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI sedangkan BBPOM Pekanbaru masih perlu melakukan perbaikan untuk mencapai target karena BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi Indikator BBPOM Jakarta dan BBPOM Denpasar berada di atas target Nasional Badan POM. BBPOM Jakarta dan BBPOM Denpasar menetapkan target indikator yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan target nasional.

#### **13.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh berdasarkan data hasil pemeriksaan sarana produksi selama periode Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 31.** Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

| No    | SARANA PRODUKSI   | JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA | HASIL PEMERIKSAAN |            |
|-------|---|------------------------------|-------------------|------------|
|       |   |                              | MK                | MK         |
| 1     | Industri Farmasi  | 22                           | 18                | 4          |
| 2     | Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) | 8                            | 8                 | 0          |
| 3     | Industri Obat Tradisional (IOT)   | 10                           | 7                 | 3          |
| 4     | Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)  | 0                            | 0                 | 0          |
| 5     | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)   | 34                           | 29                | 5          |
| 6     | Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 4                            | 3                 | 1          |
| 7     | Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan   | 2                            | 2                 | 0          |
| 8     | Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan   | 5                            | 2                 | 3          |
| 9     | Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan  | 0                            | 0                 | 0          |
| 10    | Industri Kosmetik   | 44                           | 36                | 8          |
| 11    | Industri Pangan   | 160                          | 125               | 35         |
| 12    | Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)   | 77                           | 31                | 46         |
| TOTAL |   | <b>366</b>                   | <b>261</b>        | <b>105</b> |

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, hasil pemeriksaan TMK paling banyak pada sarana produksi pangan, baik industri pangan maupun IRTP. Hal ini disebabkan oleh Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi ketentuan cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

- 1) Melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan
- 2) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.

### 13.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi (CPOB), industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional/IOT (CPOTB), industri kosmetik (CPKB), industri pangan (CPPOB), dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas;
2. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran; dan
3. Desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

### 13.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022:

**Tabel 32.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022

| Indikator   | Output |       |         | Input (anggaran) |             |         | IE   | TE   | Capaian TE |
|---|--------|-------|---------|------------------|-------------|---------|------|------|------------|
|   | T      | R     | %       | T                | R           | %       |      |      |            |
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 63     | 71,31 | 113,19% | 135.006.000      | 133.652.515 | 99,00 % | 1,14 | 0,14 | Efisien    |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,14 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

### 13.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- 2) Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.

- 3) Desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

### 13.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi                                      | Tindak Lanjut      |  |          |
|----|--|--------------------|--|----------|
|    |  | Selesai*           | Belum**  |          |
|    |  |                    | Rencana Aksi   | Timeline |
|    | Pelatihan peningkatan kapasitas inspektur pangan | Sudah dilaksanakan | Tindak lanjut akan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkala | -        |

### 13.9 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

14.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2022

**Tabel 33.** Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 75                | 84,22                | 112,29             | Memenuhi Ekspetasi |

- 1) Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)
- 2) Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
- 3) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
- 4) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 5) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- 6) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 7) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 8) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

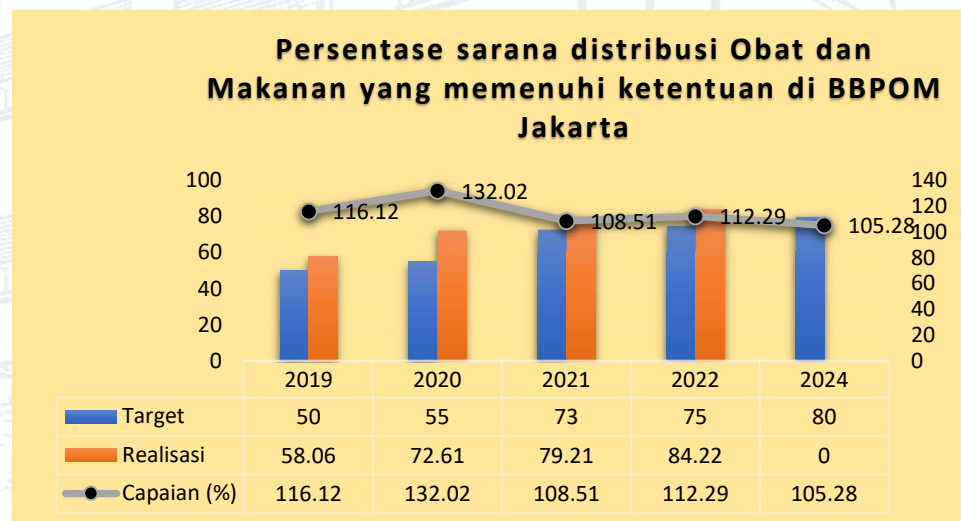
$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan =  $1297/1540 \times 100\% = 84,22$

Realisasi Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 84,22%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga capaian 112,29% dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat semakin meningkat sejak tahun 2019 yaitu 58,06%, 72,61%, 79,21%, 84,22%. Kenaikan target setiap tahun diiringi dengan kenaikan kinerja sehingga target selalu tercapai pada periode 2019-2022. Capaian kinerja tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 dari 108,51% menjadi 112,29% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Berdasarkan proyeksi terhadap target RPJMN 2020-2024, BBPOM diprediksi dapat mencapai target pada tahun 2024 dengan mempertahankan kinerja saat ini

#### 14.2 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

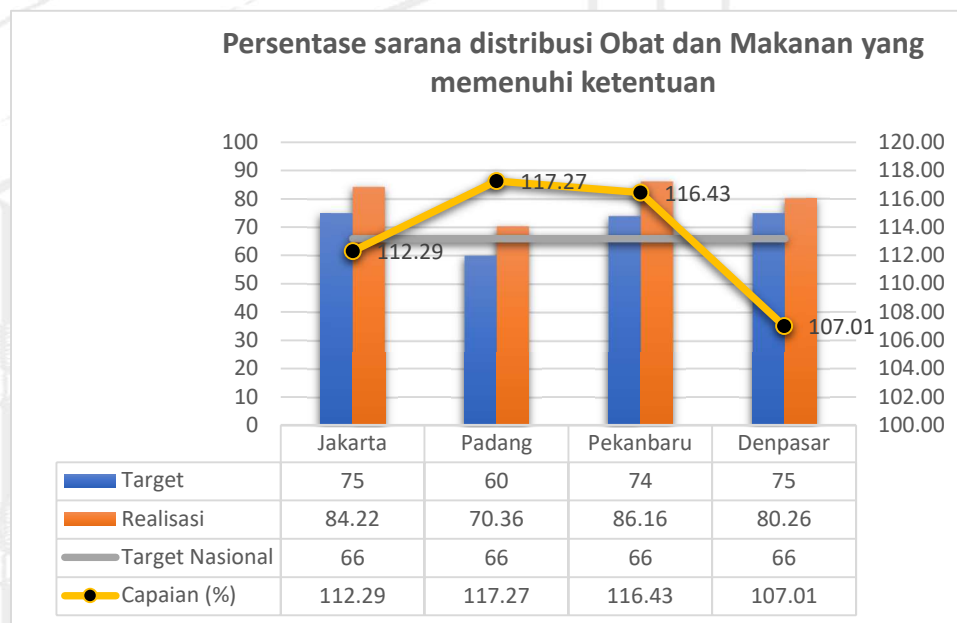


**Gambar 35.** Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat semakin meningkat sejak tahun 2019 yaitu 58,06%,

72,61%, 79,21%, 84,22%. Kenaikan target setiap tahun diiringi dengan kenaikan kinerja sehingga target selalu tercapai pada periode 2019-2022. Capaian kinerja tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 dari 108,51% menjadi 112,29% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Berdasarkan proyeksi terhadap target RPJMN 2020-2024, BBPOM diprediksi dapat mencapai target pada tahun 2024 dengan mempertahankan kinerja saat ini

### 14.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara



**Gambar 36.** Perbandingan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dibandingkan dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional Tahun 2022

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tertinggi dicapai oleh BBPOM Pekanbaru dengan realisasi 86,16%, diikuti oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM Denpasar dan BBPOM Padang. Seluruh UPT tersebut telah mencapai target masing-masing dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI serta realisasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan, yaitu 66%

#### 14.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 34.** Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2022 s/d Triwulan 3 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

| No           | SARANA DISTRIBUSI  | JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA | HASIL PEMERIKSAAN |            |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------|
|              |  |                              | MK                | TMK        |
| 1            | Pedagang Besar Farmasi (PBF)                                 | 114                          | 89                | 25         |
| 2            | Apotek   | 171                          | 151               | 20         |
| 3            | Toko Obat  | 84                           | 76                | 8          |
| 4            | Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) | 7                            | 7                 | 0          |
| 5            | Rumah Sakit (RS)   | 75                           | 69                | 6          |
| 6            | Puskemas   | 94                           | 92                | 2          |
| 7            | Klinik   | 89                           | 59                | 30         |
| 8            | Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)                         | 0                            | 0                 | 0          |
| 9            | Fasilitas Distribusi Obat Tradisional                        | 139                          | 128               | 11         |
| 10           | Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan                      | 39                           | 30                | 9          |
| 11           | Fasilitas Distribusi Kosmetik                                | 250                          | 194               | 56         |
| 12           | Fasilitas Distribusi Pangan                                  | 487                          | 402               | 76         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1540</b>                  | <b>1297</b>       | <b>243</b> |

Berdasarkan data tersebut, sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan cukup banyak dibandingkan jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan

pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- 1) Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mandatory untuk PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- 2) Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat termasuk dalam pengawalan recall produk mengandung EG DEG pada sarana pelayanan kefarmasian
- 3) Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan sarana dengan hasil pemeriksaan TMK yang tinggi yaitu distribusi pangan, distribusi kosmetik, klinik, pedagang besar farmasi dan apotek. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Maraknya peredaran pangan tanpa izin edar pada periode-periode tertentu, misal menjelang Lebaran serta Natal dan Tahun Baru
- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha distribusi kosmetik terhadap ketentuan terutama pada ritel di pasar tradisional
- 3) Ketidakepatuhan pengelolaan obat di klinik karena tidak adanya Apoteker Penanggungjawab atau kurangnya pemahaman APJ terhadap peraturan

Hal-hal yang telah dilakukan

- 1) Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian output.
- 2) Koordinasi lebih intensif dengan stake holder terkait

#### **14.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022.

**Tabel 35.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022

| Indikator   | Output |       |         | Input (anggaran) |             |        | IE   | TE   | Capaian TE |
|---|--------|-------|---------|------------------|-------------|--------|------|------|------------|
|   | T      | R     | %       | T                | R           | %      |      |      |            |
| Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 75     | 84,22 | 112,29% | 484.262.500      | 482.106.189 | 99,55% | 1,13 | 0,13 | Efisien    |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,09 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

#### **14.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- 1) Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- 2) Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

#### 14.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut      |  |                      |
|----|--|--------------------|--|----------------------|
|    |  | Selesai*           | Belum**  |                      |
|    |  |                    | Rencana Aksi   | Timeline             |
| 1  | Tindak lanjut pola pemeriksaan sarana distribusi secara rutin terhadap sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Sudah dilaksanakan | Tindak lanjut terus menerus akan dilaksanakan secara berkala | Sepanjang tahun 2022 |

#### 14.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

### 15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

#### 15.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut disajikan tabel capaian indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

**Tabel 36.** Capaian Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Indeks Pelayanan Publik       | 4,3               | 4,72              | 109,77             | Memenuhi Ekspetasi |

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

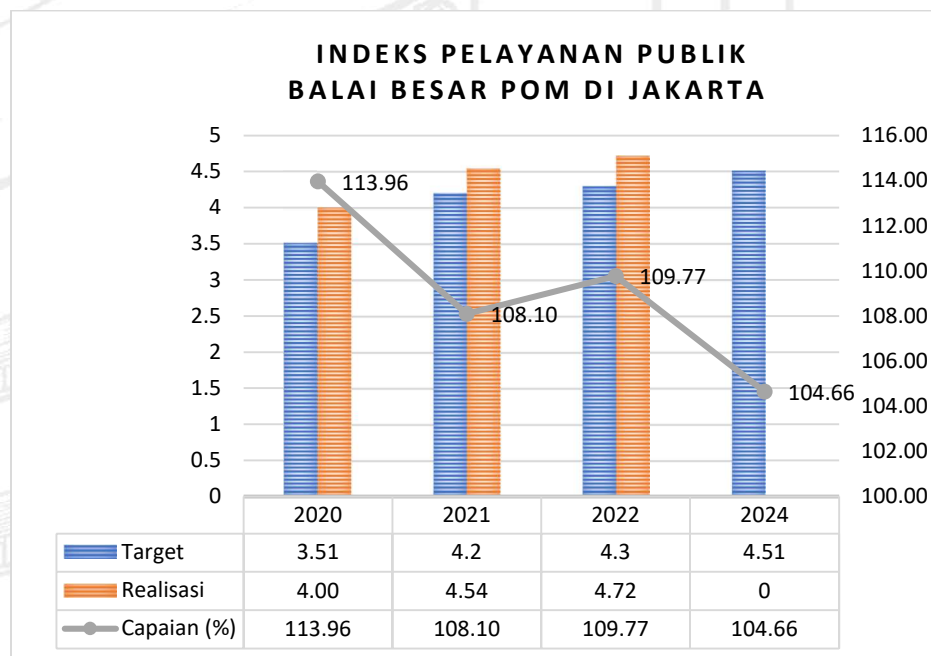
**Tabel 37.** Kriteria Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Publik

| Range Nilai | Kategori | Makna                  |
|-------------|----------|------------------------|
| 0 – 1,00    | F        | Gagal                  |
| 1,01 – 1,50 | E        | Sangat Buruk           |
| 1,51 – 2,00 | D        | Buruk                  |
| 2,01 – 2,50 | C-       | Cukup (dengan catatan) |
| 2,51 – 3,00 | C        | Cukup                  |
| 3,01 – 3,50 | B-       | Baik (dengan catatan)  |
| 3,51 – 4,00 | B        | Baik                   |
| 4,01 – 4,50 | A-       | Sangat Baik            |
| 4,51 – 5,00 | B        | Pelayanan Prima        |

Hasil penilaian internal indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 4,72 dengan kategori

A, Pelayanan Prima. Hasil ini sudah melampaui target sebesar 4,30 dengan nilai capaian sebesar 109,77%, kriteria Memenuhi eksekusi dengan kesimpulan efektivitas kinerja Efektif. Dengan hasil ini, BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai Pelayanan Prima dan menjadi 5 (lima) besar UPP UPT BPOM terbaik tahun 2022 setelah BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Surabaya, dan BBPOM di Serang.

### 15.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



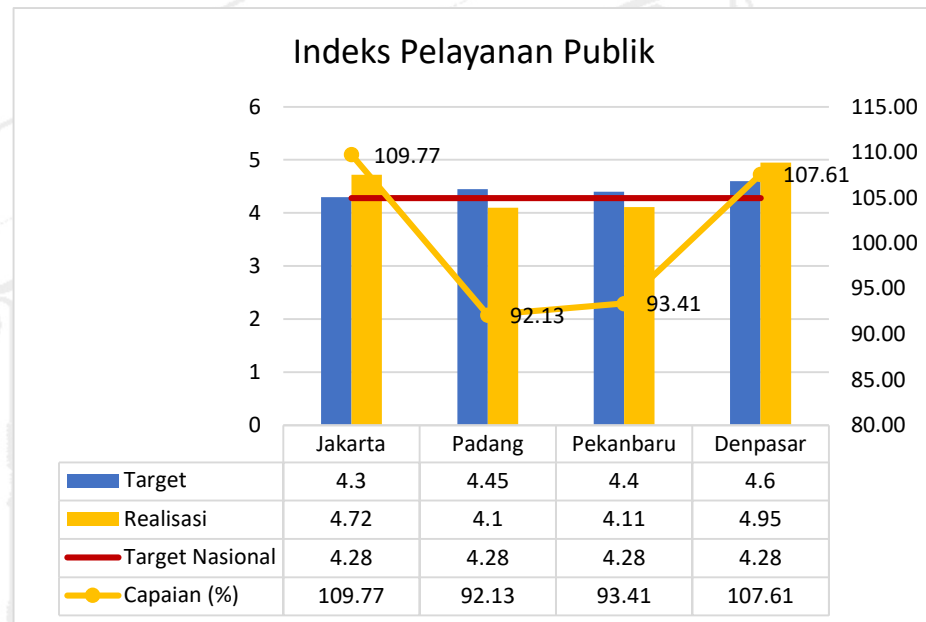
**Gambar 37.** Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dan tahun 2022

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta terus meningkat dari tahun 2020-2022 berturut-turut sebesar 4,00 pada 2020, 4,54 pada 2021, dan 4,72 pada 2022.

Capaian kinerja indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada 2020-2022 yaitu 113,96%, 108,10%, dan 109,77% menandakan realisasi yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 sebesar 4,72 telah melampaui target tahun 2023

sebesar 4,51 dengan capaian sebesar 104,66% dengan kriteria telah Memenuhi ekspektasi dan kesimpulan efektivitas Efektif. Dengan hasil ini maka BBPOM di Jakarta optimis mencapai target Renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara kontinu.

### 15.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



**Gambar 38.** Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/ setara

Indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Denpasar tahun 2022 berturut-turut sebesar 4,72; 4,1; 4,11; dan 4,95. Predikat pelayanan prima telah berhasil diperoleh oleh BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Denpasar.

Capaian kinerja indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Denpasar tahun 2022 berturut-turut sebesar 109,77%, 92,13%, 93,41%, dan 107,61%. Apabila dibandingkan, capaian kinerja BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Denpasar masuk kriteria Memenuhi Ekspektasi, sedangkan capaian kinerja BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru belum memenuhi ekspektasi. Apabila dibandingkan dengan target nasional,

hanya BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Denpasar yang telah melampaui target.

#### **15.4 Analisis penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Faktor-faktor penyebab keberhasilan diperolehnya capaian indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Telah tersedia standar pelayanan publik yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Jakarta.
- 2) Standar pelayanan publik telah disosialisasikan dan dipublikasi kepada masyarakat baik melalui media cetak seperti koran, banner, poster maupun media elektronik melalui media sosial dan portal inovasi Jakdigital yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan standar pelayanan publik dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat seperti pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, dan LSM. Telah dilaksanakannya survei kepuasan
- 4) masyarakat secara rutin dan berkala per bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap SKM dan masukan dari pengguna layanan sebagai saran perbaikan per triwulan.
- 5) Telah dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan publik terutama yang ramah untuk disabilitas seperti tersedianya buku layanan publik dengan huruf *Braile*.
- 6) Telah dilakukan implementasi berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi *Whatsapp*), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi *Online*), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Sultan Betawi (Konsultasi Layanan Informasi Sertifikasi Bersama Balai Besar POM Wilayah DKI), Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data *Library* Balai Besar POM di Jakarta) melalui <https://bbpomjakarta.id>.

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian internal terhadap peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta periode mendatang, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan SKM per jenis layanan dan tindak lanjut SKM.
- 2) Menampilkan profil petugas pelayanan publik pada subsite.
- 3) Meningkatkan pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite.
- 4) Meningkatkan arsip proses konsultasi dan pengaduan yang didokumentasi dan mudah diakses masyarakat.

### 15.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 38.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator   | Output |      |        | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE   | Capaian TE |
|---|--------|------|--------|------------------|-------------|-------|------|------|------------|
|   | T      | R    | %      | T                | R           | %     |      |      |            |
| Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta | 4,3    | 4,72 | 109,77 | 196.075.950      | 193.095.748 | 98.48 | 1,11 | 0,11 | 100%       |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,11 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sistem informasi dalam pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian output indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang

meningkat. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

### **15.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- 1) Intensifikasi pemanfaatan subsite dan media sosial sebagai sarana publikasi dan layanan yang tidak terbatas waktu dan tempat.
- 2) Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik melalui workshop pelayanan publik prima kepada seluruh pegawai dan bimtek pengelolaan media sosial bagi petugas pelayanan publik.

### **15.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Penerapan kebijakan pelayanan publik secara konsisten dengan perbaikan yang terus-menerus melalui monitoring dan evaluasi | Penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang telah dikaji ulang dalam Forum Konsultasi Publik serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan survei kepuasan masyarakat secara periodik | -            | -        |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
|    | secara berkala.   |   |              |          |
| 2  | Inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta | Berbagai inovasi peningkatan layanan baik secara tatap muka maupun digital telah diterapkan guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat, yaitu melalui implementasi inovasi Sultan Betawi (Konsultasi Layanan Informasi Sertifikasi Bersama Balai Besar POM Wilayah DKI), Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta) melalui <a href="https://bbpomjakarta.id">https://bbpomjakarta.id</a> | -            | -        |
| 3  | Sistem apresiasi terhadap petugas pelayan   | Implementasi pemberian <i>reward</i> kepada petugas pelayanan publik terbaik setiap bulannya serta kebijakan  | -            | -        |

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|--|--|--------------|----------|
|    |  | Selesai  | Belum        |          |
|    |  |  | Rencana Aksi | Timeline |
|    | publik berupa pemberian <i>reward</i> serta <i>punishment</i> sebagai sanksi apabila standar pelayanan publik tidak terlaksana dengan baik perlu diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM pelayanan publik. | <i>punishment</i> apabila petugas pelayanan publik tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar |              |          |

### 15.8 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro

Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

### 3.7. SASARAN STRATEGIS V

Capaian sasaran strategis V, yaitu meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

#### 16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

##### 16.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

**Tabel 39.** Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)            | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|--|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 94,4              | 95,06                | 100,70             | Memenuhi Ekspetasi |

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 40.** Pengukuran tingkat efektivitas KIE

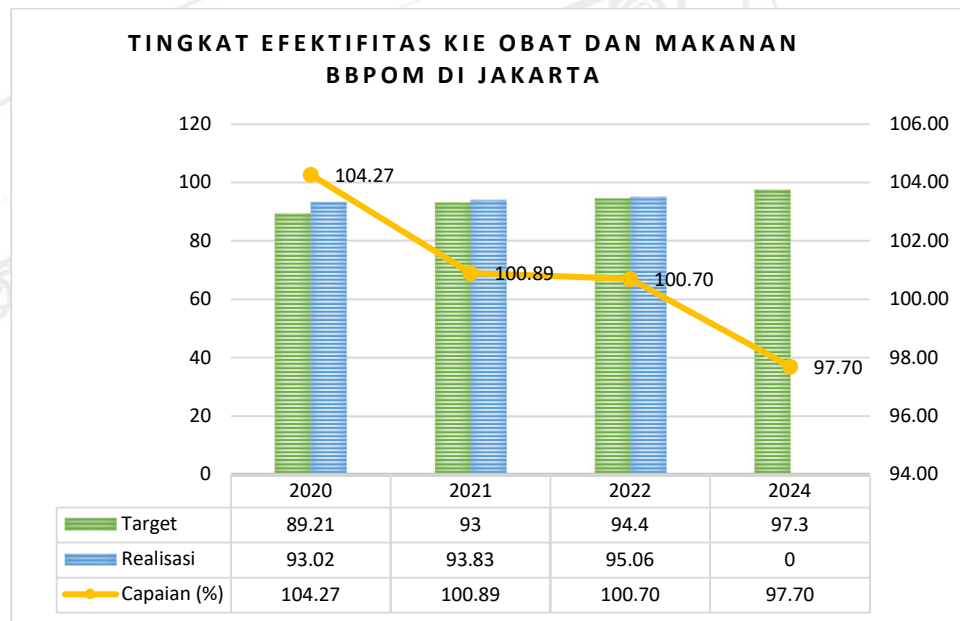
| Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektivitas |
|-----------------|--------------------------|
| <65,00          | Kurang Efektif           |
| 65,01-75,00     | Cukup Efektif            |
| 75,01-85,00     | Efektif                  |
| 85,01-95,00     | Sangat Efektif           |
| 95,01-100       | Sangat Efektif Sekali    |

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 95,06 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target sebesar 94,4 dengan capaian sebesar 100,70%, kriteria kinerja Efektif. Nilai ini diperoleh dari 575 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan pada periode tahun 2022.

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator pemahaman memiliki indeks tertinggi sebesar 96,3 diikuti oleh indikator manfaat sebesar 95,7, kemudian indikator ragam kegiatan

sebesar 93,14 dan indikator minat sebesar 92,43. Nilai indikator pemahaman yang tinggi menandakan tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima dari kegiatan KIE Obat dan Makanan BPOM di Jakarta sudah baik.

### 16.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



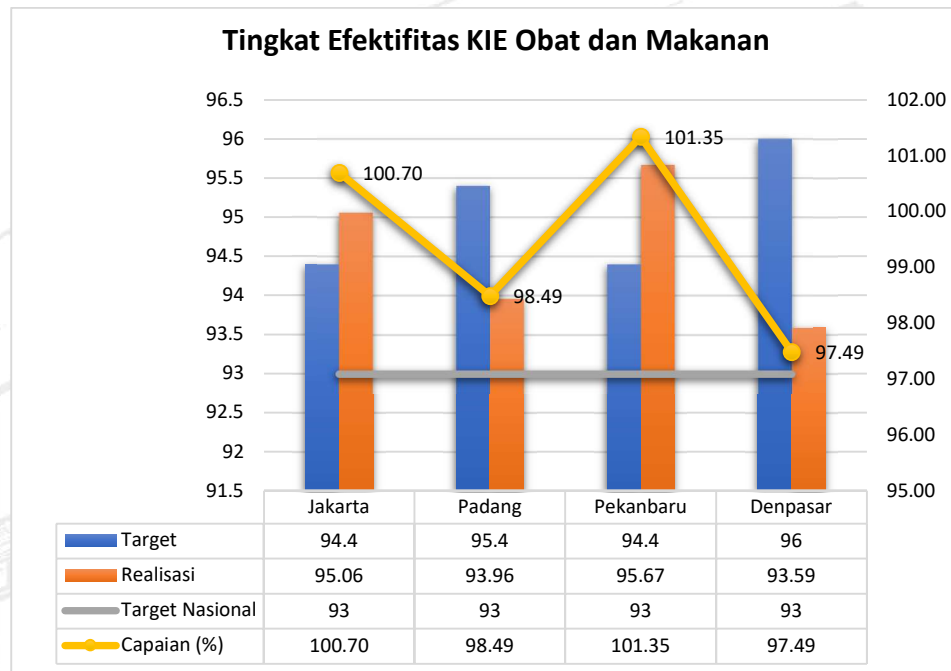
**Gambar 39.** Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2021 yaitu sebesar 93,02 pada tahun 2020, 93,83 pada tahun 2021, dan 95,06 pada tahun 2022.

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2022 secara berturut-turut sebesar 104,27%, 100,89%, dan 100,70% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024, realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2022 sebesar 95,06 memiliki capaian sebesar 97,70% terhadap target tahun

2024 sebesar 97,3 sehingga diperlukan upaya perbaikan terus-menerus untuk dapat mencapai target akhir renstra RPJMN 2020-2024.

### 16.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis setara dan target nasional



**Gambar 40.** Perbandingan Tingkat Efektivitas KIE Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar secara berturut-turut sebesar 95,06; 93,96; 95,67; dan 93,59 dengan capaian sebesar 100,70%; 98,49%; 101,35%; dan 97,49%. Dengan demikian, hanya capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Pekanbaru yang telah memenuhi ekspektasi dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 93, maka capaian BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar tahun 2022 telah melampaui nilai tersebut.

#### **16.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya perkuatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dengan stakeholder terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, OPD, dan media.
- 2) Terselenggaranya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, sebanyak 23 titik dengan jumlah peserta sebanyak 5750 orang. Hasil ini telah melampaui target peserta KIE dengan Tokoh Masyarakat sebanyak 5500 orang.



**Gambar 41.** Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat

- 3) Terselenggaranya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan berbagai tema/ pesan materi seperti Keamanan dan Mutu Obat, Keamanan Pangan, KIE dalam rangka Kampanye Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik secara daring maupun tatap muka dengan target audiens ibu rumah tangga, masyarakat umum, dan pelajar.



**Gambar 42.** Pelaksanaan kegiatan pembinaan UMK Pangan di daerah destinasi wisata Kepulauan Seribu

- 4) Intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia yang melibatkan unsur penta heliks berasal dari pemerintah/lintas sektor, media, tokoh masyarakat, akademisi dan pelaku usaha
- 5) Terselenggaranya rangkaian kegiatan sosialisasi keamanan pangan melalui tahapan kegiatan pada program prioritas nasional Desa Pangan Aman dan Program, PJAS aman, dan Pasar Pangan Berbasis Komunitas melalui tahapan pengawalan.
- 6) Narasumber BBPOM di Jakarta pada berbagai kegiatan dengan *stakeholder*, misalnya Penyuluhan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), keamanan pangan serta label pangan kepada pelaku usaha pangan dan masyarakat.
- 7) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan indikator tingkat minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan, dapat dilakukan upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media sosial, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kuis, tips mengenai Obat dan Makanan
- 2) Peningkatan strategi pelaksanaan KIE dengan lebih mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah.

#### **16.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan**

Pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 ini ditunjang oleh berbagai program yang telah berjalan, meliputi:

1. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (*Instagram, Facebook, dan Twitter*).
2. Program bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan Kader dan Komunitas Keamanan Pangan pada program prioritas nasional keamanan pangan secara langsung sehingga meningkatkan pemahaman terhadap konten informasi yang diberikan.

#### **16.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat efektivitas KIE

Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 41.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator  | Output |       |        | Input (anggaran) |               |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|--|--------|-------|--------|------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|  | T      | R     | %      | T                | R             | %     |             |             |             |
| Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 94,4   | 95,06 | 100,70 | 2.353.862.000    | 2.350.893.805 | 99,87 | <b>1,01</b> | <b>0,01</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian KIE dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal penyampaian KIE Obat dan Makanan.

#### **16.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini antara lain:

- 1) Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Oat dan Makanan.
- 2) Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat.

- 3) Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).
- 4) Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial, talk show dan iklan layanan masyarakat di radio, videotron di berbagai lokasi strategis wilayah DKI Jakarta, dan SMS Blast.

**16.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Diperlukan upaya upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui berbagai macam media seperti media cetak koran, media elektronik ( <i>talk show</i> dan iklan layanan masyarakat di radio, videotron di berbagai tempat umum di wilayah DKI Jakarta, seperti <i>shelter</i> TransJakarta, jalan arteri), dan media sosial BBPOM di Jakarta | -            | -        |

### 16.9 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta *stakeholder*, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

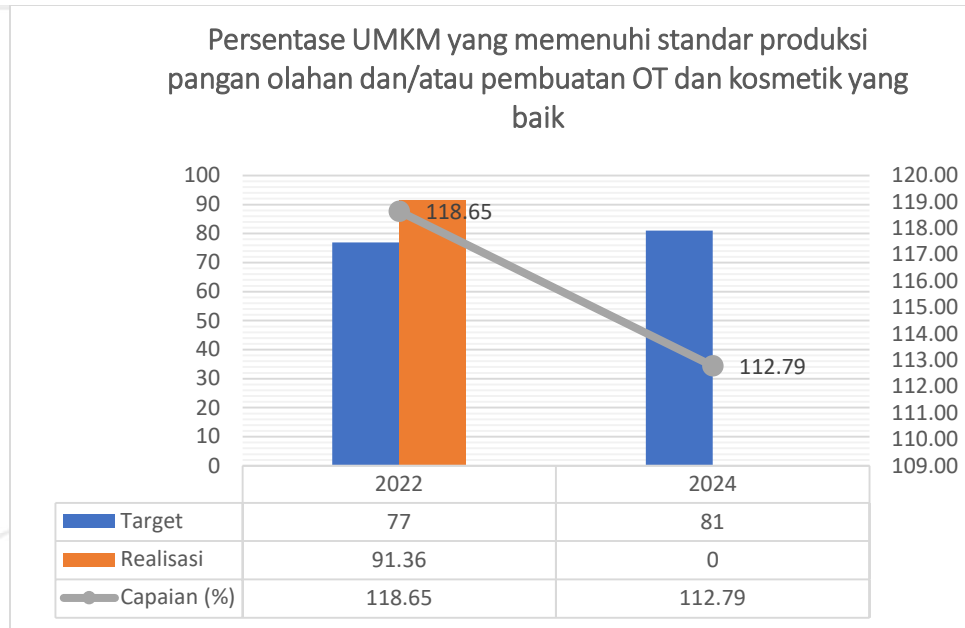
## 17. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### 17.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77                | 91,36                | 118,65             | Memenuhi Ekspetasi |

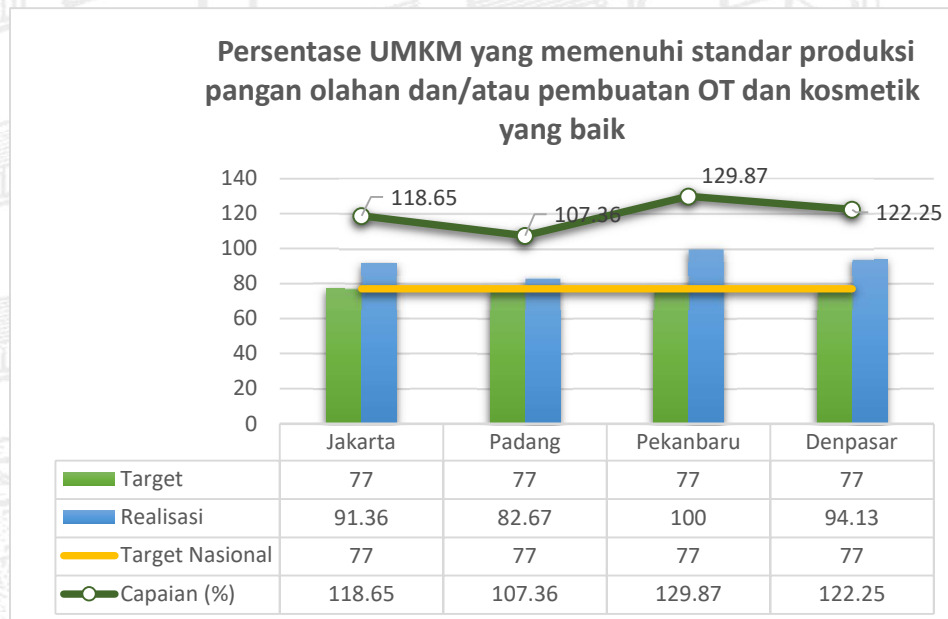
### 17.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Jika dilihat pada gambar di atas capaian dan realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik melampaui target nasional dan pada tahun 2024 BBPOM di Jakarta dapat mencapai target. Indikator ini baru dimulai tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian atau realisasi tahun sebelumnya



**Gambar 43.** Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Balai Besar POM di Jakarta dengan target

### 17.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



**Gambar 44.** Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik melampaui target nasional. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa Balai dengan realisasi tertinggi dari empat Balai yang setara adalah BBPOM di Pekanbaru.

**17.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- 1) Terjadinya pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, di mana pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan sehingga membuat kegiatan visitasi UMKM sedikit terhambat
- 2) Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
- 3) Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta membuat inovasi baru yaitu jak officer yang merupakan perpanjangan tangan untuk menjangkau UMKM yang akan berusaha di bidang obat makanan. Pada triwulan ketiga telah diangkat jak officer sebanyak 700 (tujuh ratus) personil.

**17.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

- 1) Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Jakarta
- 2) Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2022
- 3) Adanya kegiatan fasilitasi UMKM produksi obat tradisional dan produksi kosmetik yang mulai diadakan tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang dapat difasilitasi

- 4) Untuk mengatasi terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta melakukan pembentukan fasilitator yang merupakan pendamping JakPreneur dari Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta dan pada tahun 2022 telah ada 700 (tujuh ratus) personil yang tergabung dalam jak officer
- 5) Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan beskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| No | Bulan                     | Kegiatan   |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Januari 2022              | Audiensi dengan Dinas PPKUKM                               |
| 2  | Maret-April 2022          | Visitasi secara daring lokasi usaha                        |
| 3  | Mei 2022                  | Visitasi daring dan desk denah                             |
| 4  | Juli 2022                 | Visitasi daring tahap 2                                    |
| 5  | Juli – Agustus 2022       | Bimtek CPPOB dan desk denah                                |
| 6  | September 2022            | Desk perbaikan dokumen CPPOB                               |
| 7  | Oktober 2022 di 5 wilayah | Bimtek Kategori Pangan. Label dan Registrasi Pangan Olahan |
| 8  | Oktober                   | Desk CPPOB di 5 wilayah                                    |
| 9  | November                  | Desk CPPOB secara daring melalui zoom meeting              |
| 10 | Desember                  | Desk CPPOB pada kegiatan Kerling Jakarta                   |

- 6) Adanya program pemberian penghargaan terhadap UMKM yang menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada

tahun 2022 diharapkan dapat memacu pelaku usaha UMKM pangan dalam mempertahankan penerapan CPPOB

#### **17.6 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

1. Balai Besar POM di Jakarta telah menginisiasi audiensi dan Forum Grup Dissussion (FGD) untuk melakukan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2022 dan terus berkomunikasi dengan lintas sektor untuk memastikan setiap tahapan perencanaan kegiatan dapat berlangsung.
2. Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan visitasi daring maupun luring untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat. Visitasi bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran
3. Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada system sertifikasi produk pangan Badan POM
4. Memperluas cakupan Kerjasama dengan OKPD terkait pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaring data UMKM yang lebih banyak sehingga kegiatan fasilitasi UMKM lebih tepat sasaran dan efektif
5. Melakukan sistem komunikasi aktif dan Dialog kinerja tentang Kegiatan fasilitasi UMKM dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan masing-masing instansi, dan menjadikan juga sebagai ajang untuk pemecahan masalah dan mencarikan solusi yang efektif

## 17.7

## Informasi tentang pemanfaatan laporan

### kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait fasilitasi UMKM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta *stakeholder*, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## 18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

### 18.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut ini adalah realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

**Tabel 42.** Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                 | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 65                | 65                   | 100,00             | Memenuhi Ekspetasi |

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur

distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Adapun kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

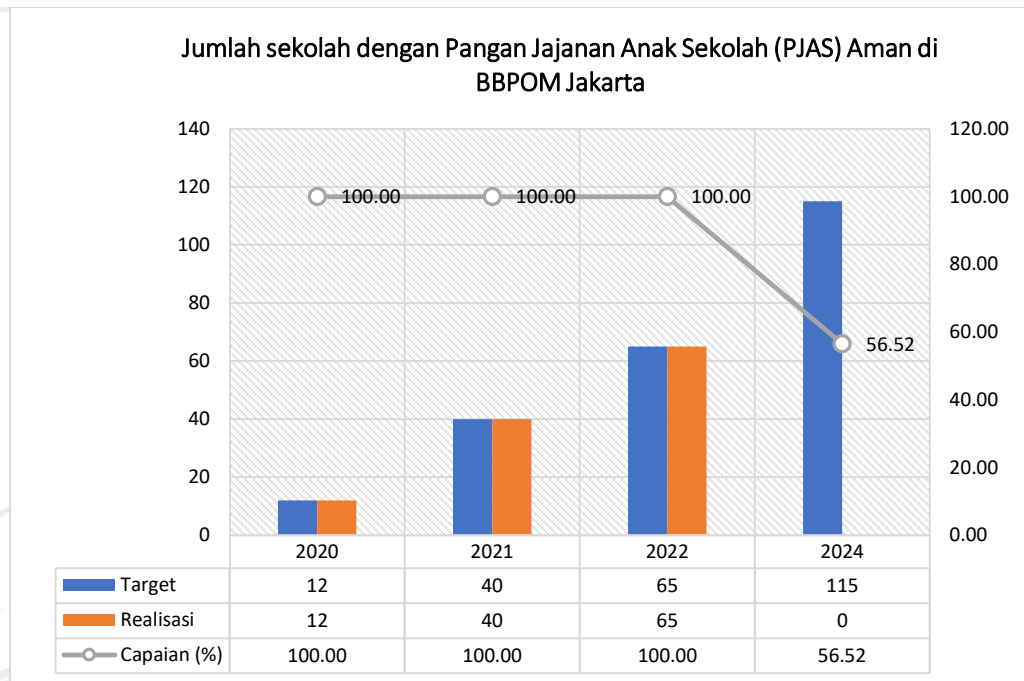
**Tabel 43.** Realisasi bulanan dan Triwulan Sosialisasi Keamanan Pangan

| No | Kegiatan   | Skor | Target Pelaksanaan           |
|----|--|------|------------------------------|
| 1  | Advokasi Lintas Sektor PJAS  | 20%  | Januari-April<br>(TW 1-TW 2) |
| 2  | Sosialisasi Keamanan Pangan  | 10%  | Maret-April<br>(TW 1-TW 2)   |
| 3  | Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah | 15%  | April-Juni<br>(TW 1-TW 2)    |

| No         | Kegiatan  | Skor | Target Pelaksanaan            |
|------------|---|------|-------------------------------|
| 4          | Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan   | 10%  | April-November<br>(TW 2-TW 4) |
| 5          | Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah<br><br>- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%)<br><br>- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%) | 15%  | Juli-September<br>(TW 3-TW 4) |
| 6          | Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman  | 20%  | Agustus-November<br>(TW 4)    |
| 7          | Pengawasan  | 10%  | Oktober-Desember<br>(TW 4)    |
| Total Skor |   | 100% |                               |

Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada tahun 2022 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi PJAS dan mencapai target intervensi terhadap 65 sekolah (25 sekolah intervensi baru dan 40 sekolah dalam rangka pengawasan intervensi tahun 2020-2021). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS sebesar 100% telah mencapai target tahun 2022 65 sekolah dan progress tahapan 100% dengan capaian 100,00% (Memenuhi Ekspektasi) dengan efektivitas kinerja Efektif.

## **18.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

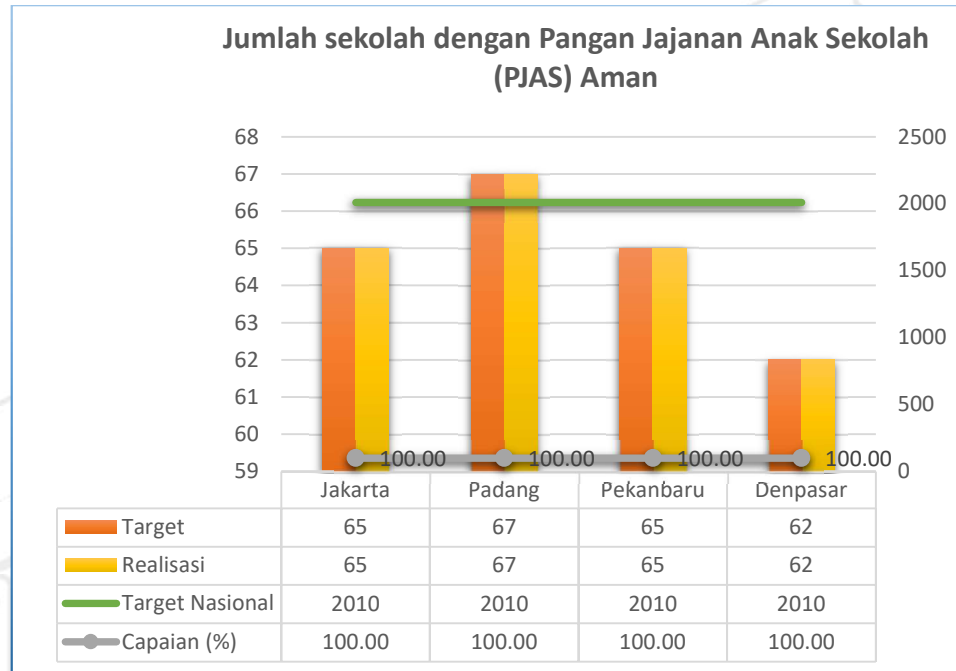


**Gambar 45.** Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM Jakarta

Target jumlah Sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 115 sekolah. Pada tahun 2020, capaian sekolah dengan PJAS aman ialah sebanyak 12 sekolah, kemudian mengalami penambahan jumlah sekolah pada tahun 2021 sebanyak 28 sekolah sehingga total 40 sekolah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi sekolah dengan PJAS aman terhadap 25 sekolah lainnya sehingga total pada 2022 ialah 65 sekolah. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% pada 2020-2022.

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 115 desa, diperoleh capaian sebesar 56,52%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah sekolah yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 25 sekolah tahun 2023 dan 25 sekolah tahun 2024

**18.3 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional**



**Gambar 46.** Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021

Realisasi jumlah jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar tahun 2022 secara berturut-turut adalah 65 sekolah, 67 sekolah, 65 sekolah dan 62 sekolah. Realisasi jumlah sekolah intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi sekolah dengan PJAS aman di 34 provinsi memiliki target jumlah sekolah tahun 2022 secara nasional sebanyak 2010.

**18.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 44.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator   | Output |    |        | Input (anggaran) |             |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|----|--------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R  | %      | T                | R           | %     |             |             |             |
| Jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 65     | 65 | 100,00 | 720.402.000      | 705.415.296 | 97,92 | <b>1,02</b> | <b>0,02</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan intervensi PJAS.

### **18.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program penunjang keberhasilan capaian kinerja program intervensi PJAS tahun 2022 antara lain telah terbentuknya forum komunikasi dengan sekolah-sekolah intervensi tahun 2020-2022 melalui Whatsapp yang memudahkan dalam komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tahapan intervensi PJAS aman.

### **18.6 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|-------------|---------------|
|----|-------------|---------------|

|   |   | Selesai   | Belum        |          |
|---|---|---|--------------|----------|
|   |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Dilakukan koordinasi mengenai kegiatan pengawalan melalui <i>Whatsapp group</i> sehingga sekolah dapat mempersiapkan waktu dan pelaksanaan dapat sesuai perencanaan | Telah dilakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah intervensi tahun 2020-2021 dan pengawalan melalui mobil laboratorium keliling sesuai perencanaan. | -            | -        |

### 18.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## 19 Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

### 19.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut ini adalah realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.

**Tabel 45.** Realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Jumlah desa pangan aman       | 21                | 21                   | 100,00             | Memenuhi Ekspetasi |

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria sebagai berikut:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; dan
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

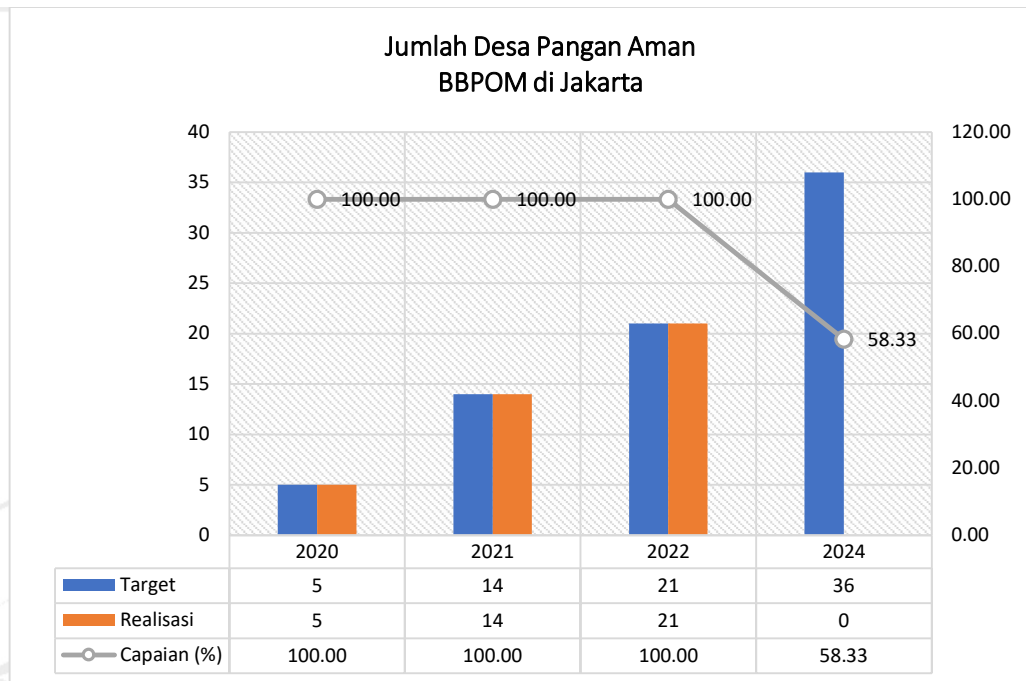
Adapun realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

**Tabel 46.** Realisasi bulanan dan triwulan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman tahun 2022

| No         | Kegiatan  | Skor | Target Pelaksanaan  |
|------------|---|------|---|
| 1          | Advokasi Kelembagaan Desa   | 20%  | Januari-April (TW 1-TW 2)   |
| 2          | Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll. | 5%   | Januari-April (TW 1-TW 2)   |
| 3          | Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)                         | 15%  | April-Juli (TW 2-TW 3)  |
| 4          | Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas   | 15%  | Mei-Oktober (TW 2-TW 4)   |
| 5          | Fasilitasi Keamanan Pangan  | 10%  | Juni-November (TW 2-TW 4)   |
| 6          | Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan                            | 10%  | - Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas)<br>- Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/survei post intervensi) |
| 7          | Monitoring dan Evaluasi   | 10%  | November-Desember (TW 4)  |
| 8          | Lomba Desa Pangan Aman  | 5%   | Desember  |
| 9          | Pengawasan  | 10%  | Juni-Desember (TW 2-TW 4)   |
| Total Skor |   | 100% |   |

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman tahun 2022 ialah 21 kelurahan dengan rincian 7 kelurahan intervensi tahun 2022 dan 14 kelurahan intervensi tahun 2020-2021 dalam rangka pengawalan. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target yaitu 21 desa dengan dengan capaian 100% (Memenuhi Ekspektasi) dengan efektivitas kinerja Efektif

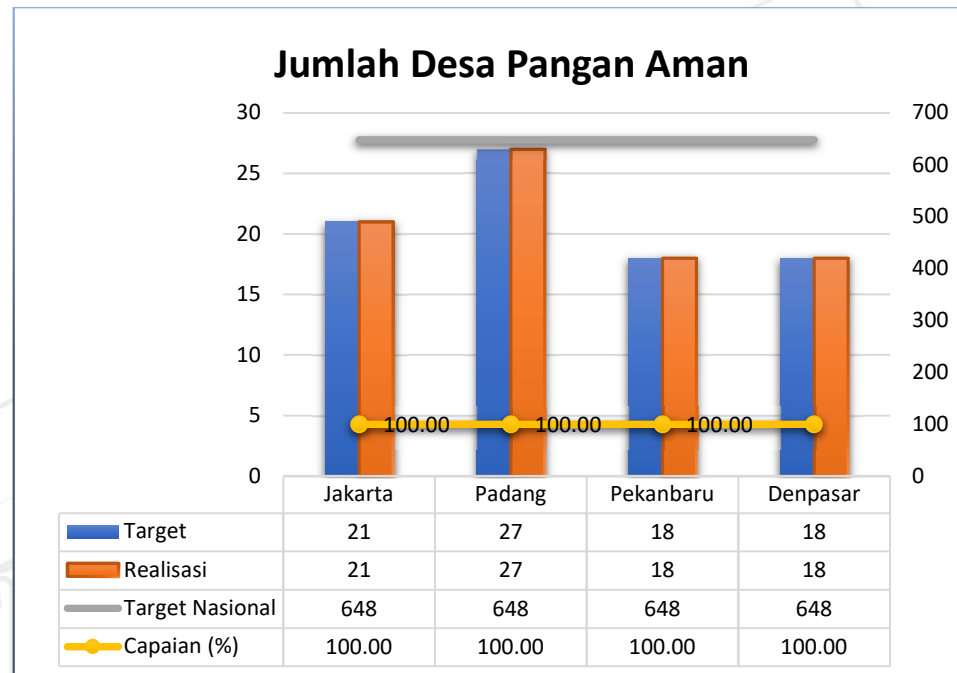
### **19.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**



**Gambar 47.** Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dan 2022

Target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 36 desa/kelurahan. Pada tahun 2020, capaian Desa Pangan Aman ialah sebanyak 5 desa/kelurahan, kemudian mengalami penambahan jumlah Desa pada tahun 2021 sebanyak 9 desa sehingga total 14 desa/kelurahan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi Desa Pangan Aman terhadap 7 desa/kelurahan lainnya sehingga total pada 2022 ialah 21 kelurahan. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% pada 2020-2022. Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 36 desa, diperoleh capaian sebesar 58,33%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah desa/kelurahan yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 28 kelurahan tahun 2023 dan 36 kelurahan tahun 2024

**19.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**



**Gambar 48.** Perbandingan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi jumlah jumlah desa pangan aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Denpasar tahun 2022 secara berturut-turut adalah 21 desa, 27 desa, 18 desa, dan 18 desa. Realisasi jumlah desa intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi desa pangan aman di 34 provinsi memiliki target jumlah desa/kelurahan tahun 2022 secara nasional sebanyak 648.

**19.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tercapainya target kinerja program Desa Pangan Aman pada tahun 2022 yaitu karena adanya komunikasi terus-menerus dan sinergi yang baik dengan kelurahan yang diinterveni program Desa Pangan Aman melalui forum komunikasi *Whatsapp* sehingga pelaksanaan tahapan

program sesuai dengan perencanaan. Selain itu, telah terbentuknya 15 orang Kader dari setiap kelurahan yang diintervensi menjadi total 105 kader yang telah dilatih memudahkan dalam menyebarkan informasi dan melakukan tahapan intervensi Desa Pangan Aman.

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai lokus intervensi melalui Audiensi dan Advokasi serta melibatkan OPD terkait keamanan pangan, mengingat program Desa Pangan ini merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Sudinkes, Sudin PPKUKM, Sudin KPKP, dan Sudindik. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap rencana aksi yang telah disusun kelurahan intervensi sebagai monitoring dalam kegiatan pengawalan.

### 19.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 47.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator   | Output |    |        | Input (anggaran) |               |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|----|--------|------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R  | %      | T                | R             | %     |             |             |             |
| Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 21     | 21 | 100,00 | 1.046.723.000    | 1.041.629.690 | 99,51 | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh

sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan program intervensi desa pangan aman.

**19.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

**19.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Diperlukan analisis terhadap hasil pelaksanaan intervensi terhadap hasil pengujian sampel <i>pre-</i> dan <i>post-</i> intervensi sebagai evaluasi pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman Tahun 2022 | Telah dilakukan analisis hasil intensifikasi pengawasan <i>pre-</i> dan <i>post-</i> intervensi yang disajikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. | -            | -        |

**19.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks

kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

## **20 Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

### **20.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut ini adalah realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.

**Tabel 48.** Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>   | <b>Target Tahun 2022</b> | <b>Realisasi Tahun 2022</b> | <b>Capaian Tahun 2022</b> | <b>Kriteria</b>    |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 3                        | 3                           | 100,00                    | Memenuhi Ekspetasi |

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen penda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku

kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan cara ritel pangan yang baik (CRPB) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya; dan
2. Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ialah 3 (tiga) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2021.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

**Tabel 49.** Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan progress tahapan

| No         | Kegiatan                                     | Skor | Target Pelaksanaan               |
|------------|--|------|----------------------------------|
| 1          | Advokasi                                     | 20%  | Januari-April<br>(TW 1-TW 2)     |
| 2          | Survei Pasar                                 | 5%   | Januari<br>(TW 1)                |
| 3          | Bimtek Pengelola Pasar                       | 15%  | April-Mei<br>(TW 2)              |
| 4          | Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar | 15%  | April-Mei<br>(TW 2)              |
| 5          | Penyuluhan                                   | 10%  | Juni-Juli<br>(TW 2-TW 3)         |
| 6          | Kampanye                                     | 10%  | Juni-Juli<br>(TW 2-TW 3)         |
| 7          | Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar | 15%  | September-Oktober<br>(TW 3-TW 4) |
| 8          | Pengawasan                                   | 10%  | Februari-Oktober<br>(TW 1-TW 4)  |
| Total Skor |  | 100% |                                  |

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 3 pasar intervensi (1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawasan intervensi tahun 2020-2021). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 sebesar 100% (Memenuhi Ekspektasi) dengan efektivitas kinerja Efektif.

## **20.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2020, capaian Pasar Pangan Aman ialah sebanyak 1

pasar, kemudian mengalami penambahan jumlah pasar pada tahun 2021 sebanyak 1 pasar sehingga total 2 pasar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi pasar terhadap 1 pasar lainnya sehingga total pada 2022 ialah 3 pasar. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% pada 2020-2022.



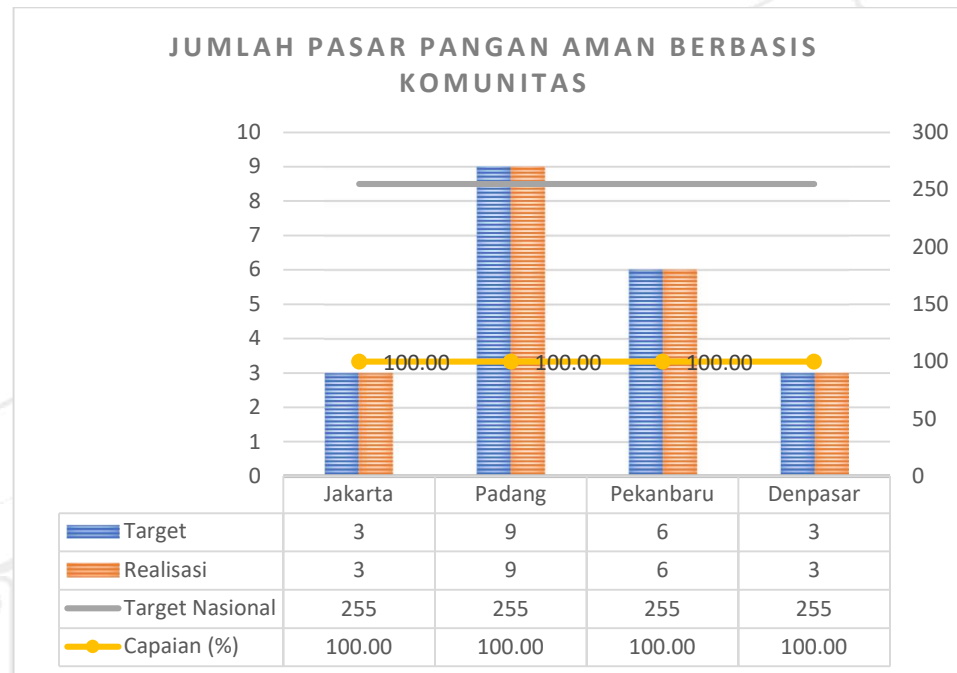
**Gambar 49.** Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 6 pasar, diperoleh capaian sebesar 50%. Target ini akan dicapai pada akhir tahun 2024 karena jumlah pasar yang diintervensi selama periode RPJMN 2020-2024 akan bertambah seiring dengan pelaksanaan program pada periode hingga akhir tahun 2024 yaitu 4 pasar tahun 2023 dan 6 pasar tahun 2024.

### **20.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**

Realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai

Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2021 secara berturut-turut adalah 2 pasar, 12 pasar, 8 pasar dan 8 pasar.



**Gambar 50.** Perbandingan realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai Lainnya

Realisasi jumlah pasar intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00% dengan kinerja Baik. Program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas di 34 provinsi memiliki target jumlah pasar tahun 2021 secara nasional sebanyak 165.

**20.4 Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan *progress* intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas adalah adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya dalam penyelenggaraan program intervensi melalui forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan. Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya,

akan dilaksanakan audiensi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah lokus intervensi dan Perumda Pasar Jaya untuk meningkatkan komitmen serta menentukan pasar intervensi yang sesuai kriteria sehingga dapat dilakukan kegiatan survei pasar yang memadai.

## 20.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 50.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator   | Output |   |        | Input (anggaran) |             |       | IE          | TE          | Capaian TE  |
|---|--------|---|--------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | T      | R | %      | T                | R           | %     |             |             |             |
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 3      | 3 | 100,00 | 111.008.100      | 109.885.560 | 98,99 | <b>1,01</b> | <b>0,01</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program terutama pelaporan dan koordinasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal kemampuan menyampaikan materi bimtek keamanan pangan dan program intervensi pasar pangan aman.

## 20.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tahapan intervensi selanjutnya.

## 20.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|--|--|--------------|----------|
|    |  | Selesai  | Belum        |          |
|    |  |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Dilaksanakan tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) dengan didahului oleh koordinasi dengan pengelola pasar. | Telah dilaksanakan koordinasi, dan monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) kepada Pasar Lenteng Agung pada triwulan IV sesuai perencanaan. | -            | -        |

### 3.8. SASARAN STRATEGIS VI

Capaian sasaran strategis VI, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

#### 21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

##### 21.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut adalah realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022:

**Tabel 51.** Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                  | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|--|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100               | 99,52                | 99,52              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

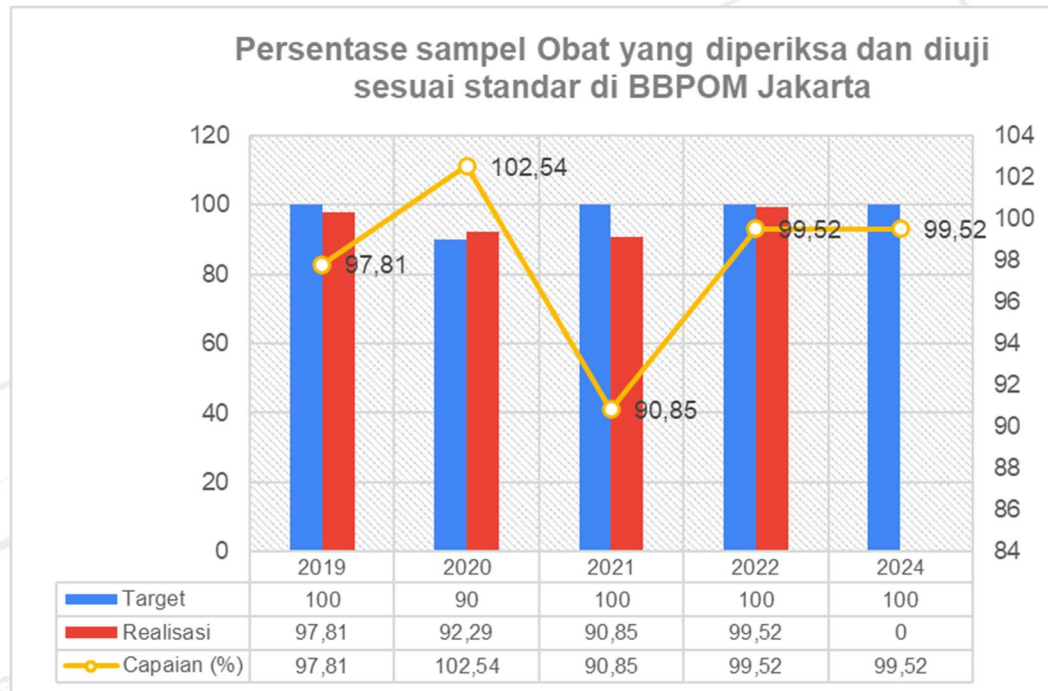
$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta adalah 99.52% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%.

**21.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**



**Gambar 51.** Perbandingan realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

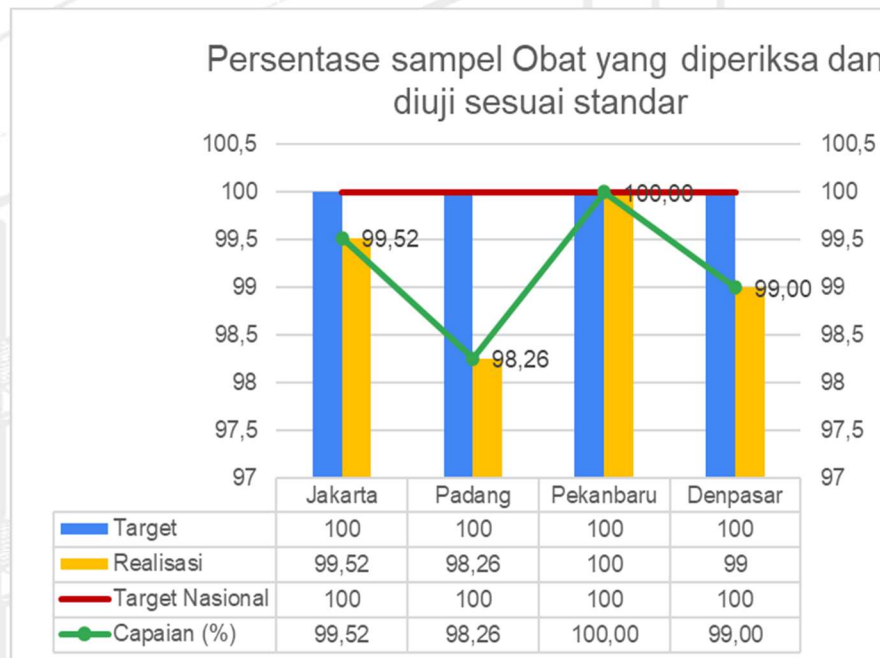
Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta pada tahun 2022 sebesar 99,52% meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%.

Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu terjadi keterlambatan penyelesaian pengujian (melebihi timeline pengujian yang sudah ditetapkan, yaitu 30 hari kerja) penyebabnya antara lain:

1. Terjadi kerusakan alat laboratorium yang memperpanjang waktu pelaksanaan pengujian.
2. Dengan diterapkannya program regionalisasi laboratorium, maka perencanaan reagensia dan suku cadang mengalami perubahan, pemesanannya membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama.

### 21.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta berada di bawah target nasional bersama dua balai lainnya yang setara. Sedangkan Balai Besar POM di Pekanbaru sudah memenuhi target nasional. Capaian Balai Besar POM di Jakarta 99,52%, Balai Besar POM di Padang 98,26% dan Balai Besar POM di Denpasar 99,00% (belum memenuhi ekspektasi) dan Balai Besar POM di Pekanbaru 100% (Memenuhi ekspektasi).



**Gambar 52.** Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan Balai Lainnya

### 21.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2022 adalah 99,52%, masih belum memenuhi target yang ditetapkan (100%). Hal ini disebabkan karena program regionalisasi laboratorium yang sudah ditetapkan secara penuh di laboratorium obat menyebabkan

pengadaan reagensia dan suku cadang mengalami penambahan dan proses pengadaannya membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Tahun 2022 terdapat 2240 sampel yang diperiksa sesuai standar dari target 2245 sampel. Sampel yang masuk dan diuji di laboratorium ada 2285 sampel. Terdapat 4 sampel obat tradisional yang tidak diuji di laboratorium karena tanpa izin edar (TIE). Dari total sampel yang masuk ke laboratorium, terdapat 2263 sampel diuji dengan parameter uji kritis yang lengkap sesuai Pedoman Sampling dan memenuhi timeline pengujian (sesuai standar).

### **21.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.

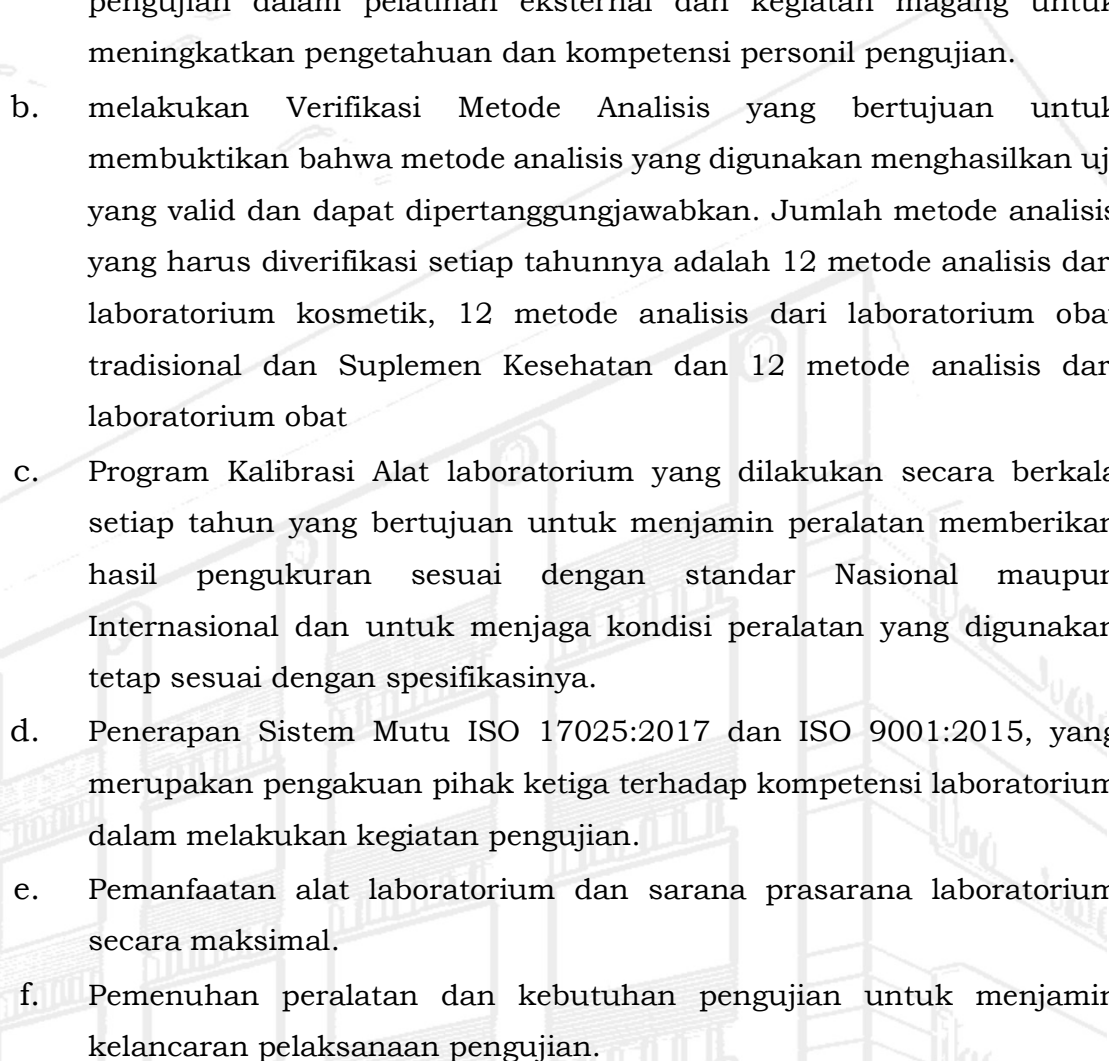
**Tabel 52.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Indikator  | Output |           |       | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE   | Capaian |
|--|--------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|------|------|---------|
|  | Target | Realisasi | %     | Target           | Realisasi   | %     |      |      |         |
| Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100.00 | 99.52     | 99.52 | 390,209,400      | 387,148,243 | 99.22 | 1.00 | 0.00 | 100%    |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran “ efisien”.

### **21.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan/pencapaian kinerja**

Program / Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- 
- a. menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
  - b. melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
  - c. Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
  - d. Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
  - e. Pemanfaatan alat laboratorium dan sarana prasarana laboratorium secara maksimal.
  - f. Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

**21.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).**

| No | Rekomendasi   | Selesai*   | Tindak Lanjut  |                  |
|----|---|--|--|------------------|
|    |   |  | Belum**  |                  |
|    |   |  | Rencana Aksi   | Timeline         |
| 1  | Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. | Sudah dilaksanakan, namun perlu dilaksanakan terus secara berkelanjutan dan konsisten    | penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. | Akhir tahun 2023 |
| 2  | Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).   | Sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan   | Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).                                  | Akhir tahun 2023 |
| 3  | Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji  | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN  | Akhir tahun 2023 |

### 21.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## 22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### 22.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

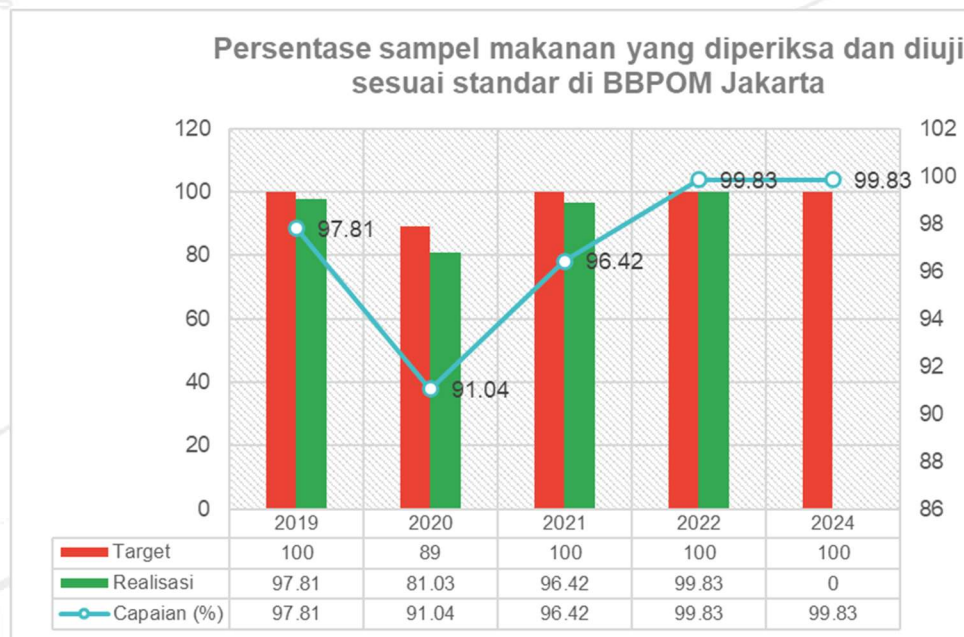
Berikut adalah realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022:

**Tabel 53.** Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                     | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100               | 99,83                | 99,83              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

## 22.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



**Gambar 53.** Perbandingan capaian dan realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan 2020

Berdasarkan grafik tersebut diatas, realisasi persentase dan capaian makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2022 sebesar 99,83%.

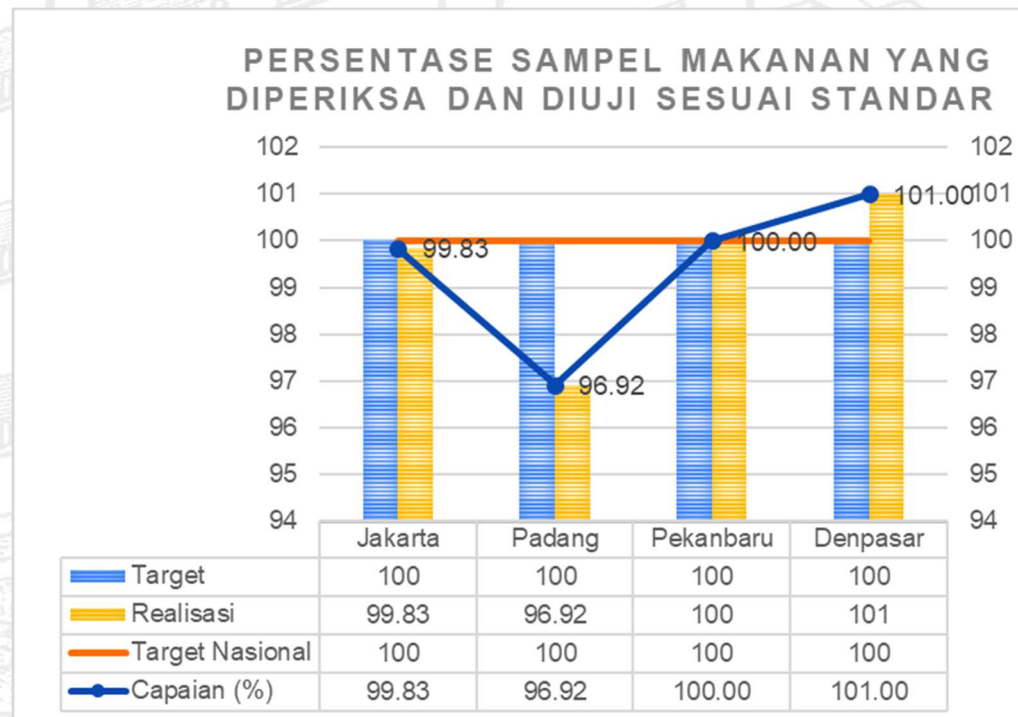
Realisasi dan capaian persentase keduanya mengalami kenaikan mulai tahun 2021 – 2022 dengan target yang sama.

Terdapat penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2022 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut.

Realisasi persentase indikator sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM Jakarta meningkat terus setelah mengalami penurunan di tahun 2020 menunjukkan timeline pengujian dan parameter uji yang diperiksa sesuai dengan standar yang ditetapkan semakin membaik. Demikian juga dengan capaian kinerja, terdapat peningkatan terus setelah mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021-2022 menunjukkan semakin baiknya performa kinerja BBPOM di Jakarta dalam pencapaian target indikator ini.

### 22.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Berdasarkan grafik, diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta berada di atas target nasional bersama tiga balai lainnya yang setara.



**Gambar 54.** Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan Berdasarkan grafik tersebut di atas dengan target dan Target Nasional yang sama, nilai realisasi persentase yang dicapai BBPOM di Jakarta pada tahun 2022 di urutan ketiga setelah BBPOM Denpasar dan BBPOM BBPOM Pekanbaru.

#### **22.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian di tahun 2022 kurang dari 100 % karena terdapat beberapa sampel yang hasil ujiannya TMS sehingga memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja untuk menyelesaikan sampai konfirmasi hasil ujiannya. Penyebab lainnya adalah adanya alat yang masih dalam proses perbaikan sehingga penyelesaian pengujian sampel melebihi timeline pengujian.

Banyaknya sampel kasus yang menjadi isu eksternal dan internal akhir-akhir ini, termasuk juga pengujian kemasan pangan polikarbonat dalam rangka penyusunan regulasi, juga mempengaruhi jadwal uji dan pemenuhan timeline pengujian sampel pengawasan rutin.

Percepatan Pengujian sampel kajian Penetapan kadar Bisfenol A dalam produk Ikan dalam kaleng dan kemasan pangan oleh Ditwasdar mempengaruhi timeline pengujian sampel yang masuk lebih dahulu dibandingkan dengan sampel tersebut di atas.

#### **22.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya mencapai kinerja**

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

**Tabel 54.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| No | Indikator   | Output |       |       | Input (anggaran) |             |       | IE   | TE   | Capaian TE |
|----|---|--------|-------|-------|------------------|-------------|-------|------|------|------------|
|    |   | T      | R     | %     | T                | R           | %     |      |      |            |
| 1  | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100.00 | 99.83 | 99.83 | 241,164,000      | 240,988,800 | 99.93 | 1.00 | 0.00 | 100        |

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran “Efisien”.

#### **22.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kemampuan laboratorium dalam memenuhi ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian serta Juknis Regionalisasi terkait parameter uji yang harus dilakukan, juga oleh pemenuhan timeline pengujian, sehingga hal-hal yang dapat mendukung terpenuhinya Kemampuan tersebut tentu akan menunjang keberhasilan kegiatan.

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

1. Meningkatnya jumlah produk pangan yang beredar di masyarakat dan beragamnya kondimen dan BTP yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi produk pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium Pangan untuk lebih meningkatkan kemampuan ujinya.
2. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metoda yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter

uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat

3. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji juga dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang
4. Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian.
5. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah perlu peningkatan kemampuan uji SDM dan menambah jumlah metoda uji yang akan digunakan, kesiapan reagen dan dana yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana agar menjadi perhatian utama.

#### **22.7 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   |  |                  |
|----|---|---|--|------------------|
|    |   | Selesai*  | Belum**  |                  |
|    |   |   | Rencana Aksi   | <i>Timeline</i>  |
| 1  | Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. | Sudah dilaksanakan, namun perlu dilaksanakan terus secara berkelanjutan dan konsisten | penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. | Akhir tahun 2023 |
| 2  | Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).   | Sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan  | Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).                                  | Akhir tahun 2023 |

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |   |                  |
|----|--|--|---|------------------|
|    |  | Selesai*   | Belum**                                       |                  |
|    |  |  | Rencana Aksi                                  | Timeline         |
| 3  | Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji | Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN | Akhir tahun 2023 |

### 22.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## 3.9. SASARAN STRATEGIS VII

Capaian sasaran strategis VII, yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

### 23 Tingkat persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

#### 23.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 58                | 60,39                | 104,13             | Memenuhi Ekspetasi |

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ;
2. Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ;
3. P21 sebesar 30% -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ; dan

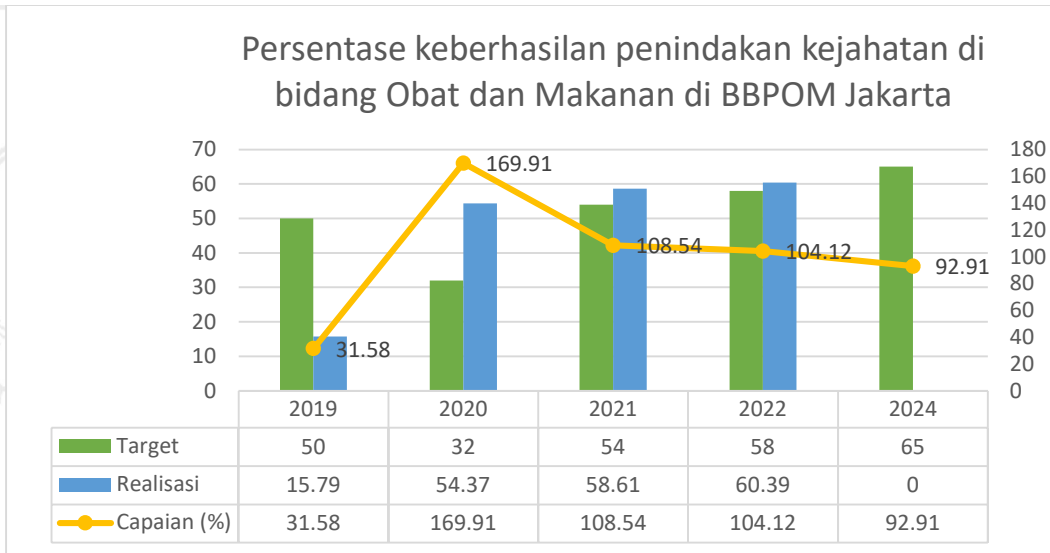
Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $[d / \text{jumlah perkara}]$ . Adapun nilai tingkat keberhasilan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 adalah sesuai target dengan capaian sebesar 104,12%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan. Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 108,54% atau tingkat keberhasilan 58,61. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan dengan target 2021 yakni sebesar 54,00. Berdasarkan nilai perbandingan tersebut, kinerja terkait indikator meningkatnya efektivitas penindakan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta telah berhasil dicapai dengan kriteria "baik".

### **23.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**



**Gambar 55.** Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 dan target akhir periode Renstra RPJMN 2020 – 2024

Target indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” pada tahun 2022 ini adalah 58 dengan realisasi sebesar 60,39 atau 104,12%. Capaian ini dikategorikan ke dalam kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan berdasarkan SK KaBPOM nomor 128 tahun 2022 termasuk kategori “Efektif”.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan 2021 adalah terdapat penurunan capaian dari 108,54% di tahun 2021 menjadi 104,12% di tahun 2022. Adapun capaian tahun 2021 adalah 58,61 sedangkan tahun 2022 capaiannya adalah 60,39. Apabila dianalisis, terdapat peningkatan kinerja sebesar 1,74% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Pencapaian kinerja dari Poksi Penindakan ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan penanganan perkara tahun 2022.

Pada dokumen Renstra jangka menengah, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditetapkan untuk Poksi Penindakan adalah sebesar 65. Dengan demikian, capaian

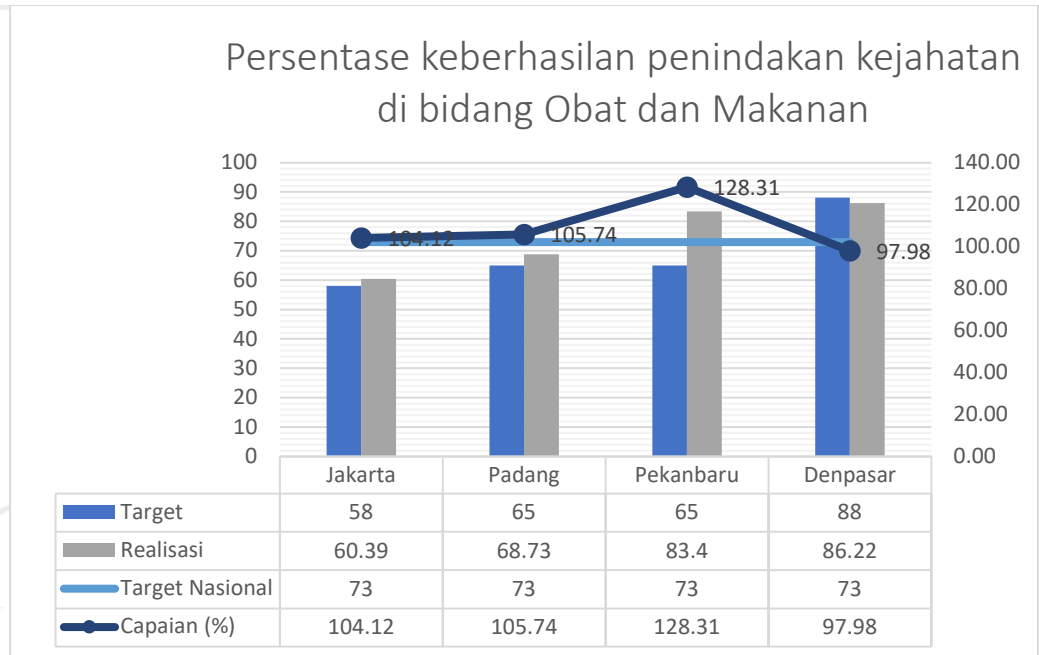
indikator kinerja tahun 2022 terhadap target tersebut adalah 92,91% yang tergolong “belum memenuhi ekspektasi”.

Gambaran tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya mengingat target kinerja juga meningkat.

### **23.3 Perbandingan realisasi kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini dibandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, dan Balai Besar POM di Denpasar. Perbandingan kinerja juga dibandingkan dengan target nasional yakni sebesar 73,00.

Kinerja 4 (empat) UPT ini disajikan pada gambar berikut. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa capaian Balai Besar POM di Jakarta dan Padang adalah memenuhi ekspektasi (>100%), capaian Balai Besar POM di Denpasar belum memenuhi ekspektasi (rentang 80-100%), sedangkan capaian Balai Besar POM di Pekanbaru tidak dapat disimpulkan (>120%).



**Gambar 56.** Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2021 dengan Balai lain

Target yang ditetapkan untuk Balai Besar POM di Jakarta lebih kecil jika dibandingkan dengan 3 (tiga) UPT yang lain maupun target nasional. Penetapan target ini sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.01.02.2.21.07.21.326 tanggal 12 Juli 2021.

#### **23.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

- a. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif  
Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara

(Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). Spreadsheet ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.. Kinerja Poksi Penindakan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai apabila tahapan kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif maka Koordinator Poksi Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh staf Poksi Penindakan.

- b. Koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) yang lebih optimal  
Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap. Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara tunggakan yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2022.

Tindak pidana yang ditangani PPNS BBPOM di Jakarta merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait obat dan makanan. Perlu adanya kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk persamaan persepsi dan tafsir dalam penyelesaian perkara. Pencapaian kinerja tahun 2022 merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

- c. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait  
Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Poksi Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya.

Pada tahun 2022 ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran pangan olahan mengandung bahan berbahaya, obat tradisional mengandung BKO dan juga kosmetik mengandung bahan berbahaya yang diedarkan secara daring. Kerja sama juga dijalin dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk mengungkap peredaran obat yang dikategorikan obat tertentu yang sering disalahgunakan. Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan akademisi, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, serta komunitas mahasiswa. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- d. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal  
Sepanjang tahun 2022 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.

#### **23.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pencapaian kinerja Poksi Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses

informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kolaborasi kinerja dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Poksi Penindakan.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui gelar perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Poksi Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

### **23.6 Analisis terhadap penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kelompok Substansi Penindakan masuk ke dalam kategori efektif. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2022.

Penggunaan anggaran untuk indikator persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di Jakarta mencapai 98,66%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.267.408.000 dapat direalisasikan sebesar Rp1.250.400.000. Perhitungan TE menunjukkan angka 0,06 yang tergolong kategori efisien.

Meskipun pemanfaatan sumber daya yang mendukung kinerja penindakan tahun 2022 dinyatakan efektif dan efisien, namun perlu dilakukan evaluasi untuk capaian yang lebih optimal di tahun mendatang.

### **23.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pencapaian kinerja Poksi Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kolaborasi kinerja dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Poksi Penindakan.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui gelar perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi

kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Poksi Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

### **23.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Pencapaian tahun 2022 ini merupakan upaya penerapan rekomendasi perbaikan kinerja yang disusun setiap triwulannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan cegah tangkal, intelijen, siber, hingga penyidikan perkara. Rekomendasi yang telah tuntas dilaksanakan adalah gelar perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya untuk akselerasi penyelesaian tunggakan perkara pada tanggal 23 Desember 2022. Kesepakatan atas solusi yang dirumuskan dalam kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti di sepanjang tahun 2023. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik agar tindak lanjut dapat selesai sesuai jadwal. Pada akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Ketentuan yang berkaitan dengan kinerja Poksi Penindakan termasuk ke dalam klaster Kesehatan yang mencakup obat dan makanan. Dengan adanya perubahan yang berkaitan dengan kinerja Poksi Penindakan tersebut, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel di Poksi

Penindakan harus terus dilakukan. Hal ini akan berpengaruh terhadap upaya pemenuhan target kinerja di tahun berikutnya. Selanjutnya, kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai target kinerja namun belum terlaksana di tahun 2022 akan disiapkan ke dalam Plan of Action 2023.

### **23.9 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Poksi Penindakan menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Poksi Penindakan di atas, kegiatan yang dilaksanakan dengan lebih intensif di tahun 2022 adalah gelar perkara. Pada awal tahun 2022, jumlah perkara tunggakan yang ditangani teridentifikasi sejumlah 32 perkara. Hasil dari tindak lanjut atas rekomendasi dalam gelar perkara tersebut, di akhir tahun 2022 perkara tunggakan berkurang 10 perkara menjadi 21 perkara.

Kendala koordinasi dengan CJS juga dapat diatasi dengan kegiatan gelar perkara tersebut. Target waktu penyelesaian perkara tunggakan akan disusun dalam rencana kinerja tahun 2023.

## **3.10. SASARAN STRATEGIS VIII**

Capaian strategis VIII, yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal Indeks reformasi birokrasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

## 24 Indeks reformasi birokrasi

### 24.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut ini adalah realisasi indeks reformasi birokrasi Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022:

*Tabel 55. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2022*

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal | Indeks RB BBPOM di Jakarta    | 83,4              | 89,98                | 107,89             | Memenuhi Ekspetasi |

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

**Tabel 56.** *Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM*

| No | Komponen Pengungkit                 | Bobot (60%) |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1  | Manajemen Perubahan                 | 8%          |
| 2  | Penataan Tatalaksana                | 7%          |
| 3  | Penataan Sistem Manajemen SDM       | 10%         |
| 4  | Penguatan Akuntabilitas Kinerja     | 10%         |
| 5  | Penguatan Pengawasan                | 15%         |
| 6  | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10%         |

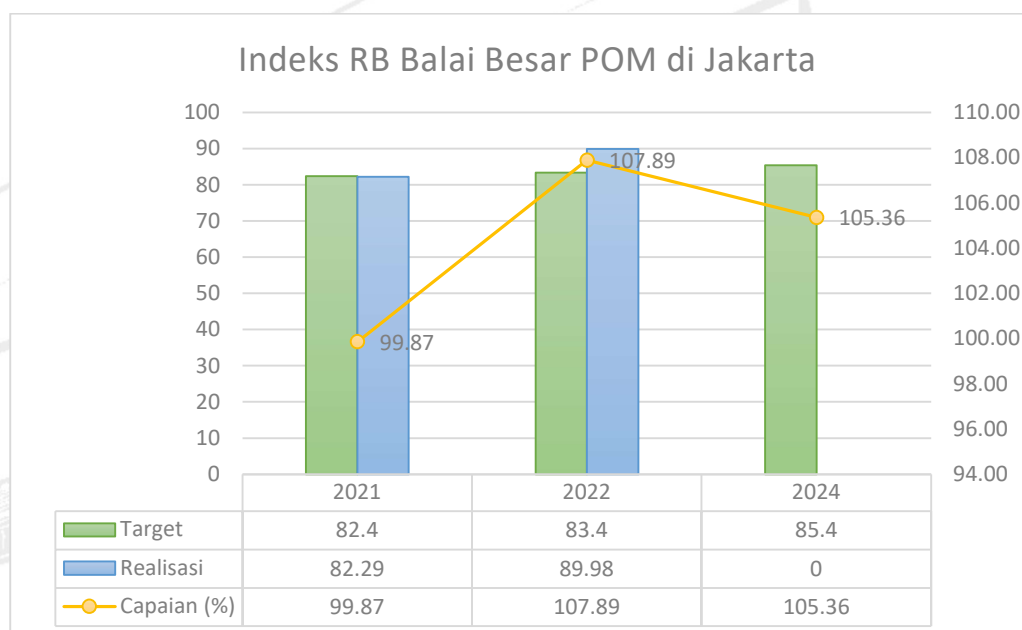
Berikut adalah tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

**Tabel 57.** *Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM*

| No | Komponen Hasil                          | Bobot (40%) |
|----|---|-------------|
| I  | Birokrasi Bersih dan Akuntabel          | 22.5%       |
|    | a. Nilai Survei Persepsi Korupsi        | 17.5%       |
|    | b. Capaian Kinerja Lebih Baik           | 5%          |
| II | Pelayanan Publik yang Prima             | 17.5%       |
|    | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP) | 17.5%       |

## 24.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

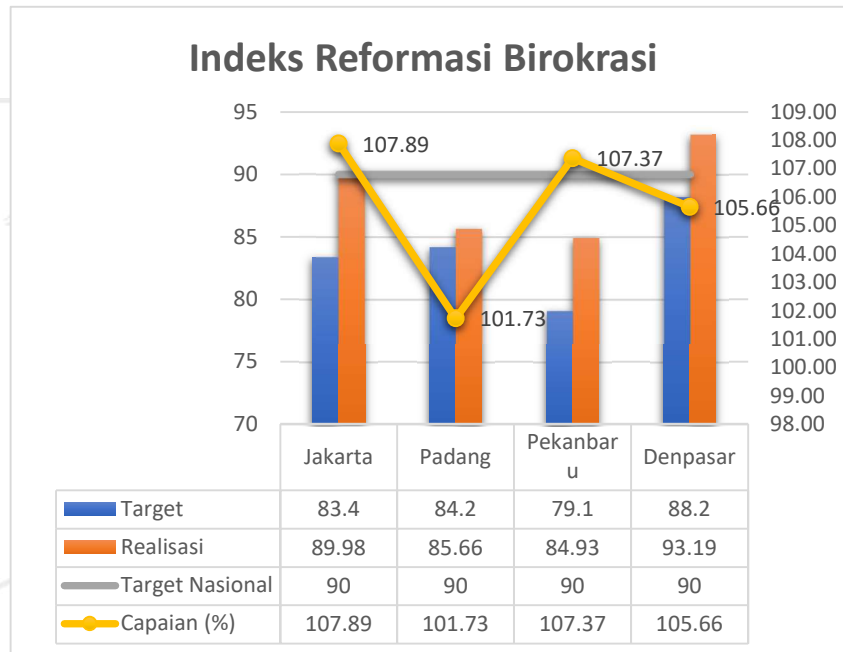
Nilai Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020. Terdapat penyesuaian target Indeks RB, sesuai dengan Reviu Renstra yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021.



**Gambar 57.** Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Target pada tahun 2022 adalah 83,4 dengan realisasi sebesar 89,98%. Dengan capaian 107.89%, Tahun 2022 merupakan kali pertama BBPOM di Jakarta dapat melampaui target semenjak IKU Indeks RB ditetapkan. Target 2024 sebesar 85,4 ditetapkan sesuai *roadmap* Balai Besar POM di Jakarta mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebelum RPJMN berakhir pada tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut capaian Wilayah Bebas dari Korupsi yang diraih Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.

## 24.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang setara dan target nasional



**Gambar 58.** Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan Balai lain

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan 4 balai besar yaitu Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Denpasar, masing-masing balai sudah melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

#### **24.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sudah melampaui target 100%. Keberhasilan peningkatan kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. BBPOM di Jakarta telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan termasuk penetapan Target Prioritas;
2. Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
3. Unit Kerja telah melakukan penataan sistem manajemen SDM secara memadai mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, rekrutmen mengacu pada kebutuhan,

mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;

4. Pimpinan Unit telah terlibat dalam pengelolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
5. Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan dengan cukup baik diantaranya dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
6. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah) dan mendekatkan diri kepada masyarakat diantaranya Laron Baja, Kerling Jakarta maupun Laila
7. Berbagai program peningkatan awareness dan Implementasi Zona Integritas Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 diantaranya pendampingan penguatan area Pengawasan dari Inspektorat Utama Badan POM pada 25 April 2022, Pendampingan ZI menuju WBBM oleh Kementerian PAN-RB pada 11 Mei 2022, Pencanangan ZI Menuju WBBM pada kegiatan Passionate (Pagelaran Semarak Inovasi Obat dan Makanan) pada 22 September 2022 serta Workshop Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik pada 5-6 Desember 2022.

#### **24.5 Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian IKU yang melampaui target perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja ke depan adalah :

1. Melaksanakan internalisasi core value ASN terbaru secara menyeluruh dan menuangkannya bentuk penerapannya kedalam SOP setiap kegiatan yang telah dibuat.;
2. Berupaya untuk melakukan validasi dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monev terhadap transformasi digital pada bidang proses

bisnis utama, administrasi pemerintahan, pelayanan publik yang telah dilakukan;

3. Mengukur kesenjangan kompetensi dengan memperhitungkan pemenuhan standar kompetensi baik yang bersifat teknis maupun sosio kultural manajerial terhadap seluruh pegawai;
4. Memanfaatkan hasil capaian/monitoring atas seluruh perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
5. Terus melakukan perbaikan maupun penyempurnaan atas inovasi baik yang sudah ada dan dilakukan dokumentasi yang memadai, serta menyusun analisis dampak kebermanfaatannya atas inovasi terhadap perbaikan Unit Kerja;
6. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu mendukung dan meningkatkan ketercapaian target kinerja utama yang mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

#### **24.6 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah :

1. Mengakomodir seluruh area perubahan pada rencana kerja prioritas Pembangunan ZI;
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, terhadap seluruh pelatihan;
3. Telah membuat inovasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai karakteristik unit kerja, namun beserta implementasinya (Ikan Telat : Ikrar Mantan Telatan)
4. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) sebagai inovasi pada area penguatan pengawasan;

5. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh area perubahan telah dilaksanakan secara memadai beserta tindak lanjutnya;
6. Telah dilaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja yang dituangkan dalam Galasin (Galeri Inovasi BBPOM di Jakarta)
7. Telah memiliki replikasi inovasi untuk Simanten (Sistem Mesin Antrian) dan Sabbeni (Sarana Balai buat Informasi dan Edukasi) dari BBPOM di Bandung dan BBPOM di Palembang

#### **24.7 Informasi pemanfaatan laporan kinerja**

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Indeks RB menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.

### **25 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta**

#### **24.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut ini adalah realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021:

**Tabel 58.** Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b> | <b>Target Tahun 2022</b> | <b>Realisasi Tahun 2022</b> | <b>Capaian Tahun 2022</b> | <b>Kriteria</b>    |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal | Nilai AKIP BBPOM di Jakarta          | 80                       | 80,34                       | 100,43                    | Memenuhi Ekspetasi |

Berdasarkan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
  - d. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%); dan
  - e. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pengukuran (5%);
  - b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan
  - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pelaporan (3%);
  - b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan
  - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
  - b. Kualitas evaluasi (5%); dan
  - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);

- b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); dan
- c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

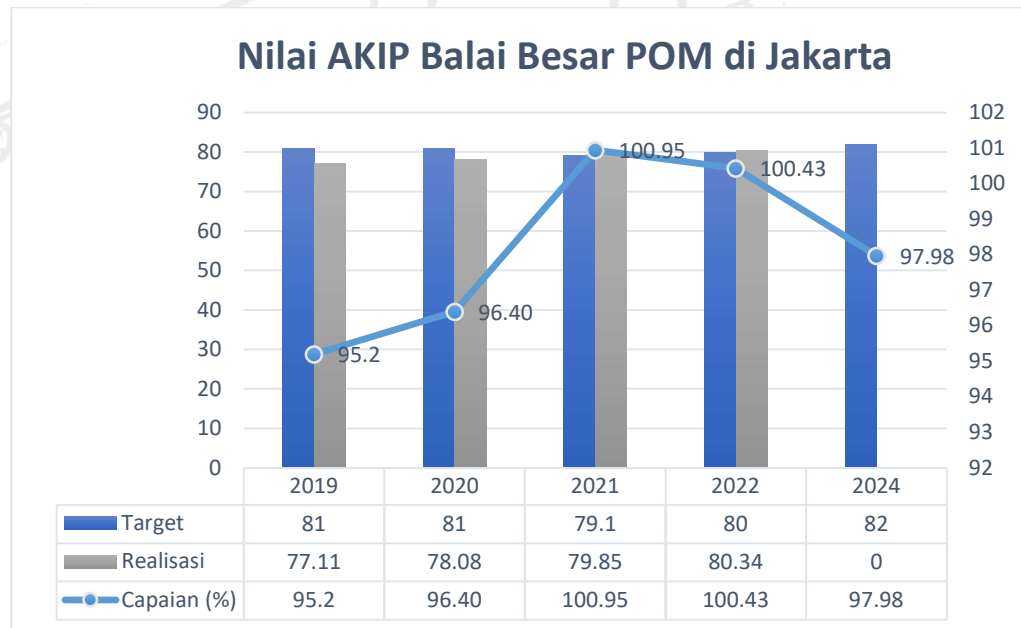
1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90; dan
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
4. B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Pada tahun 2022, nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target, realisasi 80,34 dengan target 80 sehingga diperoleh capaian kinerja 100,43% dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTAKSI”. Berdasarkan kriteria penilaian SAKIP, nilai tersebut termasuk dalam kategori nilai A (Memuaskan) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem

Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Jakarta akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

#### 24.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Balai Besar POM Jakarta berupaya mencapai target jangka menengah tersebut dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Indikator AKIP Balai Besar POM Jakarta ini mendukung Indikator AKIP Badan POM pada sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama Badan POM yang efektif”.



**Gambar 59.** Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik diatas, nilai AKIP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2019, dan berhasil mencapai target pada tahun 2022. Demikian juga halnya dengan capaian nilai AKIP. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM Jakarta berkomitmen untuk selalu mencapai target akuntabilitas kinerja.

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target nilai AKIP ditetapkan 82. Bila realisasi nilai AKIP 2022 dibandingkan dengan target

tahun 2024 tersebut, nilai capaian indikator adalah 100,43 dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

### 24.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara



**Gambar 60.** Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain

Capaian Nilai AKIP tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Denpasar dengan nilai 100,43 dan berturut-turut Balai Besar POM Jakarta, Balai Besar POM Padang dan Balai Besar POM Pekanbaru. Nilai AKIP yang melampaui Balai POM di Jakarta pada tahun 2022 termasuk dalam kategori “Memenuhi Ekspektasi”

### 24.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 dibandingkan dengan 2021, terdapat peningkatan pada capaian kinerja. Namun, karena terdapat

perubahan bobot penilaian maka komponen yang lain tidak dapat dibandingkan

**Tabel 59.** Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP

|   | Komponen yang Dinilai | Bobot (%) | Nilai 2020 | Nilai 2021 | Bobot | Nilai 2021 |
|---|-----------------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja   | 30        | 14,86      | 26,74      | 24    | 18,96      |
| 2 | Pengukuran Kinerja    | 25        | 19,38      | 19,38      | 24    | 19,20      |
| 3 | Pelaporan Kinerja     | 15        | 12,94      | 13,56      | 12    | 10,80      |
| 4 | Evaluasi Internal     | 10        | 7,64       | 6,41       | 20    | 16,00      |
| 5 | Capaian Kinerja       | 20        | 13,26      | 13,26      | 20    | 15,38      |
|   | Nilai Hasil Evaluasi  | 100       | 78,08      | 79,85      | 100   | 80,34      |
|   | Tingkat Akuntabilitas |           | BB         | BB         |       | A          |

Secara rinci, hasil penilaian SAKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 terhadap komponen dan subkomponen penyusunnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hal-hal yang berhasil meningkatkan nilai AKIP, yaitu:

1. Perencanaan

- a. Adanya review renstra dan target kinerja dilengkapi dengan kertas kerja exercise yang mencakup baseline/ data capaian periode;
- b. Tersedia rencana aksi yang mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan;
- c. Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024 yang direviu secara berkala dan dipublikasikan pada *website* Badan POM;
- d. Monitoring rencana Aksi mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan serta rincian anggaran untuk memastikan bahwa program/ kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan; dan
- e. Capaian target kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*).

2. Pengukuran

- a. Terdapat sistem pengumpulan data kinerja secara online melalui SI-pitung Kinerja yang dilengkapi dengan SOP Mikro, dan SK Tim Penanggungjawab; dan
  - b. Target kinerja Koordinator dan Sub Koordinator telah dimonitor dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan *punishment*.
3. Pelaporan
- a. Adanya analisis terhadap penggunaan sumber daya dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja; dan
  - b. Adanya analisis capaian indikator kinerja dan rekomendasinya.
4. Evaluasi internal
- a. Laporan Kinerja Interim menyajikan informasi pencapaian kinerja, analisis mengenai capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan; dan
  - b. Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2022 lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2021.

Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai AKIP pada periode selanjutnya adalah:

1. Melaksanakan *cascading* indikator kinerja sampai dengan level individu selaras dengan indikator kinerja unit kerja;
2. Mekanisme bila terjadi kesalahan data belum disosialisasikan kepada pihak yang terkait;
3. Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target akhir periode renstra yaitu tahun 2024 serta perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding dengan IKU Badan POM;
4. Peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan sehingga mampu telusur dan andal serta dilengkapi dengan data dukung yang tepat;

5. Penggunaan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja; dan
6. Melengkapi notulen evaluasi internal dengan pembagian PIC dan timeline penyelesaiannya serta rencana aksi serta simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.

#### **24.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target AKIP yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Dokumen yang telah dilaporkan tepat waktu pada tahun 2022 meliputi dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2022, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja Interim 1, 2 3 dan 4 Tahun 2022;
2. Pelaksanaan kegiatan monev secara tepat waktu melalui beberapa aplikasi yaitu BOC, RHPK, SMART DJA, Bappenas dan e-performance. Ketepatan waktu pelaporan dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di Jakarta, perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua poksi hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat, ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing poksi, kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
3. Rapat evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala setiap bulan dalam rangka monitoring capaian kinerja dan merumuskan tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja;
4. Program pengumpulan data kinerja online melalui Si Pitung Kinerja secara konsisten setiap bulan;
5. Adanya SK Pedoman Penilaian Kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja

#### **24.6 Tindak lanjut lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan telah berdampak terhadap kenaikan nilai AKIP, yaitu:

1. Mempublikasikan Renstra 2020-2024 pada *website* BPOM dan subsite Balai Besar POM di Jakarta;
2. Melengkapi kertas kerja dengan justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan tren kenaikan/penurunan;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar untuk pemberian *reward/punishment*;
4. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja serta penanggungjawabnya;
5. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan

#### **24.7 Informasi pemanfaatan laporan kinerja**

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Nilai AKIP menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.

### 3.11.SASARAN STRATEGIS IX

Capaian sasaran strategis IX, yaitu terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

#### 26 Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

##### 26.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

**Tabel 60.** Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)               | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta | 84,5              | 85,24                | 100,88             | Memenuhi Ekspetasi |

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami dengan menggunakan form survei sesuai Permen

PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 di lingkungan BPOM dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi SIASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 adalah 85,24 dengan capaian 100.88% pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

## **26.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024**

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 memperoleh nilai 85,24. Pada reuiu renstra Tahun 2021, target IP disesuaikan dengan baseline dan tren capaian serta pemetaan dimensi pegawai secara aktual dari target 75 menjadi 84,25. Capaian tahun 2022 sebesar 100,88% telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian 2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan 2021, karena memiliki target yang berbeda.

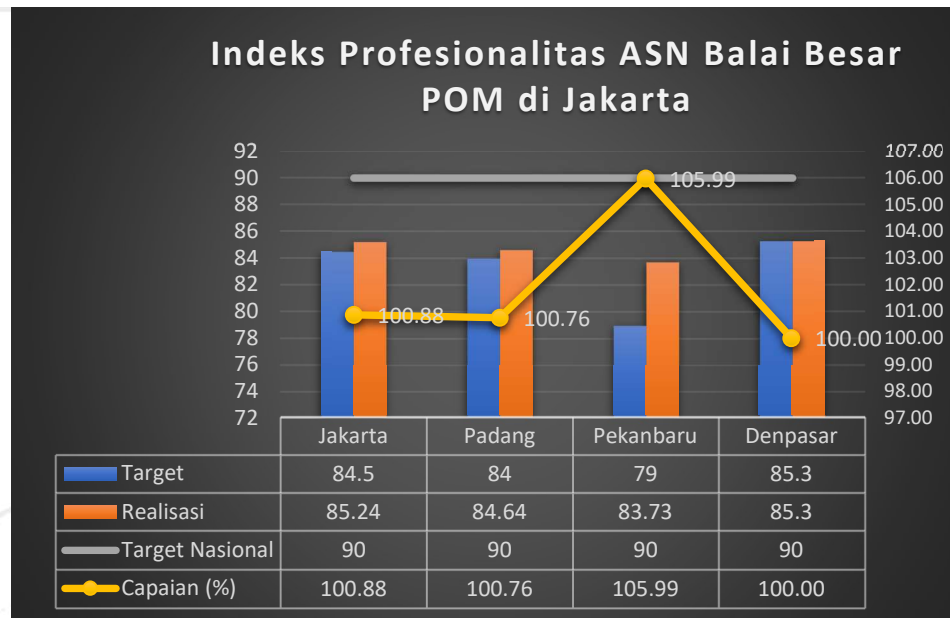


**Gambar 61.** Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 berkontribusi terhadap 100.28% target pada akhir RPJMN. Perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap target tahun 2024 sebesar 85 agar tidak terjadi capaian lebih dari 120% (kategori tidak dapat disimpulkan). Hal ini dikarenakan terus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN sehingga diperkirakan target 85 dapat tercapai sebelum tahun 2024.

### **26.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai setara lainnya dan target nasional**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN untuk Balai Besar POM di Jakarta dan UPT pembandingan telah memperoleh kategori “Memenuhi Ekspektasi”. Realisasi dan capaian tertinggi diraih oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, diikuti oleh Balai Besar POM di Jakarta, kemudian Balai Besar di Padang dan yang terakhir adalah Balai Besar Denpasar.



**Gambar 62.** Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain

#### **26.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dapat mencapai target dikarenakan Balai Besar POM di Jakarta terus berupaya meningkatkan dimensi penilaian Indeks Profesionalitas melalui berbagai program, diantaranya:

1. Tugas Belajar bagi 9 orang pegawai yang sedang berlangsung pada tahun 2022 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai;
2. Mengusulkan pegawai untuk tugas belajar sebanyak 5 orang pada tahun 2022 dan apabila disetujui dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai;
3. Menyelenggarakan bimtek teknis dan manajerial sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;

4. Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional baik dilakukan secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform IDEAS pada *subsite* Pusat Pengembangan SDM POM;
5. Memantau peningkatan kinerja pegawai melalui evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta;
6. Pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absensi; dan
7. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan karier pegawai serta manajemen talenta.

#### **26.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja**

Dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah tercapainya pengembangan kompetensi dengan target 20 Jam Pelajaran untuk seluruh pegawai serta diklat teknis fungsional yang wajib diikuti bagi pegawai yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Selain itu, nilai sempurna pada dimensi disiplin karena seluruh pegawai telah tertib dalam pencatatan kehadiran maupun menjalankan kode etik sebagai PNS, sehingga tidak ada hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai.

Hal ini dapat tercapai dengan adanya inovasi hukuman disiplin berupa IKRAR MANTAN TELATAN dengan melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap pelanggaran disiplin dengan memberikan hukuman berupa penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi keterlambatan untuk pegawai yang melebihi 1,5 jam keterlambatan tiap bulannya sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Implementasi inovasi ini mencegah akumulasi pelanggaran disiplin pegawai di akhir tahun.

#### **26.6 Tindak lanjut lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Capaian target pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai sebanyak 20 Jam Pelajaran merupakan target kuantitatif yang mungkin tidak berdampak langsung terhadap kompetensi pegawai dan kinerja organisasi. Selain itu capaian pengembangan kompetensi untuk diklat fungsional yang wajib diikuti oleh seluruh pejabat fungsional yang telah diangkat dalam jabatan fungsionalnya perlu dilakukan monitoring secara berkala.

Peta kompetensi yang telah disusun, perlu dilakukan pemutakhiran dan monitoring untuk memenuhi gap kompetensi pegawai agar tercapai kemampuan teknis sesuai penugasan dan kompetensi manajerial sosiokultural sesuai jenjang jabatan.

#### **26.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan inovasi dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Disiplin Pegawai serta usulan kegiatan pengembangan kompetensi yang direncanakan untuk meningkatkan kinerja pegawai BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

### **3.12.SASARAN STRATEGIS X**

Capaian sasaran strategis X, yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

#### **27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Procedure*)**

##### **27.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Berikut realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

**Tabel 61.** Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria           |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82                | 85,27                | 103,99             | Memenuhi Ekspetasi |

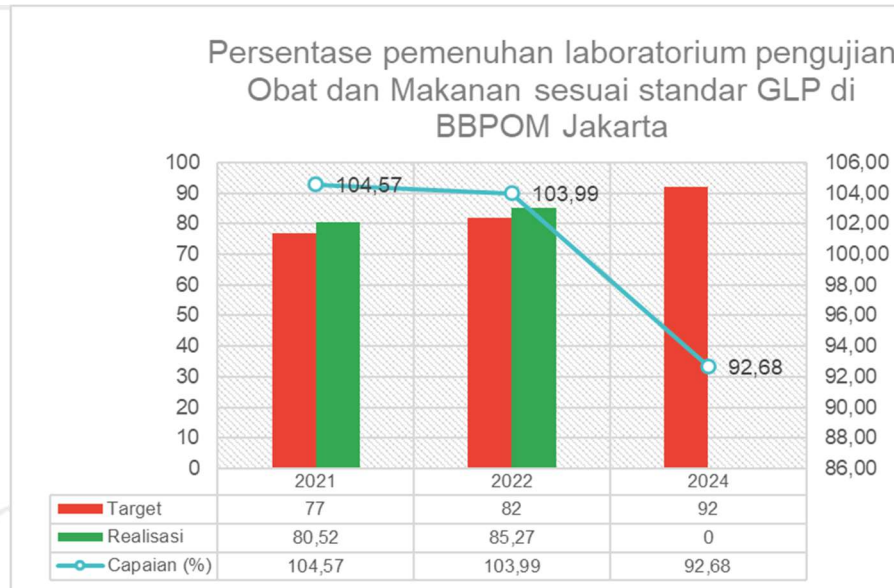
Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Adapun batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup  $\geq 65$ ;
2. Standar Kompetensi personel laboratorium  $\geq 75$ ; dan
3. Standar Alat Laboratorium  $\geq 70$

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar kemampuan laboratorium yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan Laboratorium, dan Standar Kompetensi Personel Laboratorium.

## **27.2 Perbandingan realisasi dan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

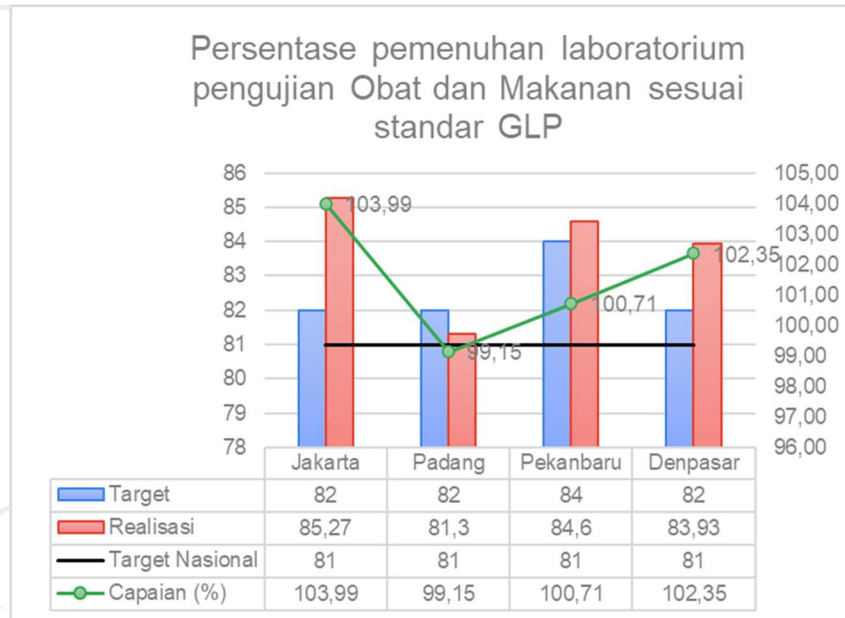


**Gambar 63.** Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di BBPOM Jakarta

Berdasarkan gambar di atas, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Capaian tahun 2021 80,52% dan meningkat menjadi 85,27% di tahun 2022. Untuk tahun 2023 targetnya meningkat lagi menjadi 87%.

### **27.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional**

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan laboratorium sesuai standar GLP di Balai Besar POM di Jakarta dan dua Balai Besar POM yang setara berada di atas target nasional, sedangkan 1 balai lainnya yang setara berada di bawah target nasional 76%.



**Gambar 64.** Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP, Balai Besar POM Jakarta mendapat nilai 85,27%. Balai Besar POM di Padang 81,3%, Balai Besar POM di Pekanbaru 84.6% dan Balai Besar POM di Denpasar 83,93%. Semua Balai sudah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 81%

#### **27.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk pemenuhan laboratorium obat dan makanan sesuai standar GLP sebesar 85,27% sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 82%.

## 27.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2022.

| Indikator   | Output |           |        | Input (anggaran) |               |       | IE   | TE   | Capaian |
|---|--------|-----------|--------|------------------|---------------|-------|------|------|---------|
|   | Target | Realisasi | %      | Target           | Realisasi     | %     |      |      |         |
| Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82.00  | 85.27     | 103.99 | 5,551,243,000    | 5,548,458,065 | 99.95 | 1.04 | 0.04 | 100%    |

**Tabel 62.** Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.04 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien.

## 27.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- 1) menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- 2) melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis kosmetik, 12 metode analisis obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.

- 3) Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.
- 4) Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- 5) Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.

**27.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).**

| No | Rekomendasi                        | Tindak Lanjut      |   |                  |
|----|------------------------------------|--------------------|---|------------------|
|    |                                    | Selesai*           | Belum**   |                  |
|    |                                    |                    | Rencana Aksi  | Timeline         |
| 1  |                                    | Sudah dilaksanakan | Program regionalisasi Laboratorium (khususnya Laboratorium Obat) menambah standar kemampuan laboratorium  | Akhir tahun 2022 |
| 2  | Penambahan ruang lingkup pengujian | Sudah dilaksanakan | Menjadi penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium (Penetapan Kadar Azitromisin Tablet)   | Akhir tahun 2022 |
| 3  |                                    | Sudah dilaksanakan | Verifikasi Metode Analisis yang belum pernah dilakukan antara lain: (PK Etilen Glicol dan Dietilen Glicol dalam sediaan sirup secara GCMS), PK Methotrexate Injeksi (Obat Kanker) | Akhir tahun 2022 |

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut      |   |                  |
|----|---|--------------------|---|------------------|
|    |   | Selesai*           | Belum**                                       |                  |
|    |   |                    | Rencana Aksi                                  | Timeline         |
| 4  |   | Sudah dilaksanakan | Mengikuti Program Uji Profisiensi             | Akhir tahun 2022 |
| 5  | Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. | Sudah dilaksanakan | Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN | Akhir tahun 2022 |

## 27.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan dan usulan pengadaan alat laboratorium dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

## 28 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

### 28.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Berikut realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

**Tabel 63.** Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                       | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal | 2,25              | 2,88                 | 128,00             | Tidak Dapat Disimpulkan |

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen berikut:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (*BPOM Command Centre*);
  1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
  2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  3. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan;
  4. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;
  5. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    1. UPT, yaitu terdiri SIPT, SPIMKer Data Keracunan; dan
    2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir);
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
  1. Balai: e-mail, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai; dan
  2. Pusat: e-mail dan *dashboard* BCC.

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

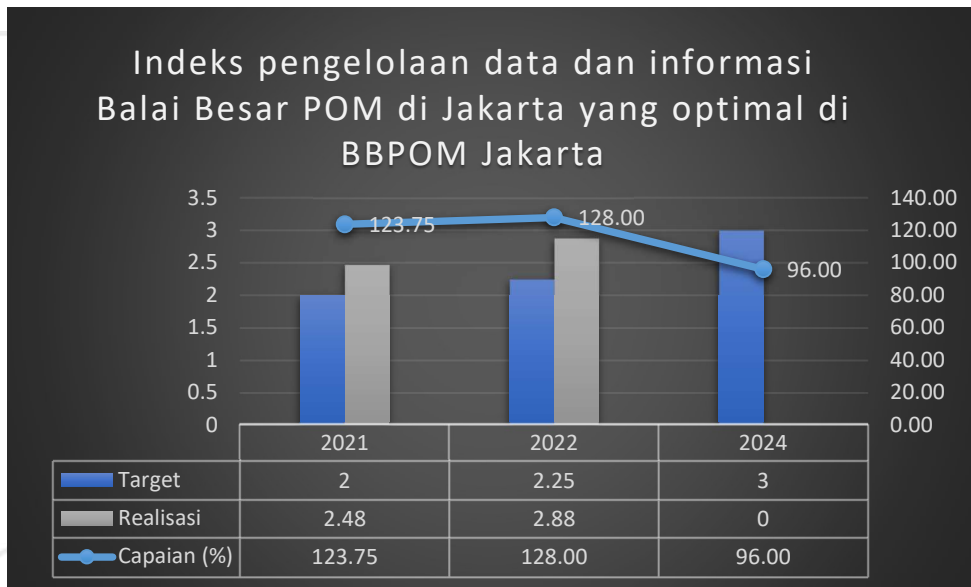
Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

1. 2,26 – 3 : Optimal
2. 1,51 – 2,25 : Cukup
3. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
4. 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi di triwulan keempat sebesar 2,475 dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Artinya selama periode Januari sampai Desember 2021, jumlah akses data dalam satu bulan Balai Besar POM di Jakarta telah memenuhi untuk SIPT, SPIMker, *e-mail*, *sharing folder*, *dashboard* BCC dan berita aktual.

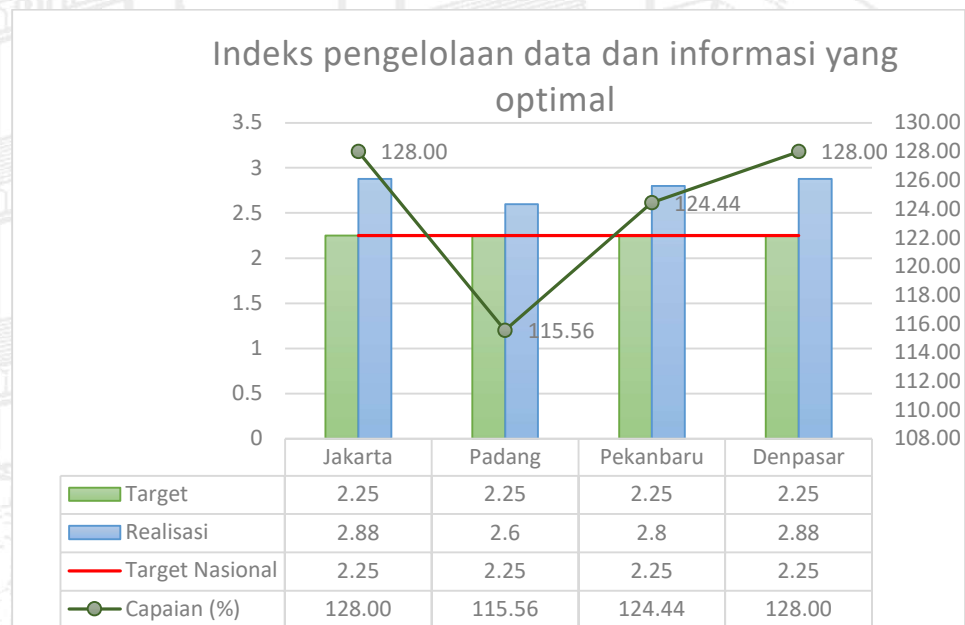
### **28.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024**

Nilai indeks ini jauh melampaui target (128%) sehingga TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Nilai yang tinggi tersebut karena pada Triwulan IV terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Triwulan III, sehingga pada akhir tahun 2022 indeks ini sangat optimal untuk pemanfaatan data dan informasi melalui *email*, *sharing folder* dan berita aktual serta memutakhirkan data melalui Spimker.



**Gambar 65.** Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal di BBPOM Jakarta

### 28.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara



**Gambar 66.** Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain

Perbandingan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Denpasar memperoleh capaian tertinggi dengan capaian 128%. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Jakarta berada di atas target nasional, demikian juga dengan realisasi Balai Besar lainnya.

#### **28.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pemantauan indeks pengelolaan data dan informasi dilakukan oleh Tim IT yang tercantum dalam SK Tim IT Balai Besar POM di Jakarta. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks.

#### **28.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Balai Besar POM di Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi;
2. Program pemanfaatan email corporate secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara maksimal;
3. Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk;

4. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks maksimal;
5. Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita actual/bulan dengan masing-masing minimal 101 viewer/berita aktual;
6. Verifikasi dan tindak lanjut petugas aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal.
7. Monitoring dan evaluasi terhadap input SIPT dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketuntasan pelaporan

#### **28.6 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Rekomendasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Kerjasama semua pegawai terkait dalam pengelolaan akun sosial media telah memberikan dampak positif untuk menjangkau pegawai senior agar lebih melek teknologi.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, pendekatan dan sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun berikutnya.

#### **28.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan dan usulan pengadaan alat laboratorium dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

### **3.13. SASARAN STRATEGIS XI**

Capaian sasaran strategis XI, yaitu terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

#### **29 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta**

## 29.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

### Berikut realisasi persentase terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel tahun 2022

**Tabel 64.** Realisasi persentase terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel tahun 2022

| Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja Utama (IKU)           | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Kriteria                 |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta | 92,5              | 91,84                | 99,29              | Belum Memenuhi Ekspetasi |

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:

1. NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
2. NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
3. NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;
4. NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang; dan
5. NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang,

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencerminkan 4 aspek dan terdiri dari 13 indikator sebagai berikut:

**Tabel 65.** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

| Aspek                                     | Indikator                | Bobot |
|---|--------------------------|-------|
| Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan | Revisi DIPA              | 5%    |
|   | Deviasi Halaman III DIPA | 5%    |
|   | Pagu Minus               | 5%    |
| Kepatuhan terhadap Regulasi               | Data Kontrak             | 10%   |
|   | Pengelolaan UP dan TUP   | 8%    |
|   | LPJ Bendahara            | 5%    |
|   | Dispensasi SPM           | 5%    |
| Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan          | Penyerapan Anggaran      | 15%   |
|   | Penyelesaian Tagihan     | 10%   |
|   | Capaian <i>Output</i>    | 17%   |
|   | Retur SP2D               | 5%    |
| Efisiensi Pelaksanaan Anggaran            | Renkas                   | 5%    |
|   | Kesalahan SPM            | 5%    |

Kriteria nilai IKPA sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yaitu:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
2. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
3. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No.2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka

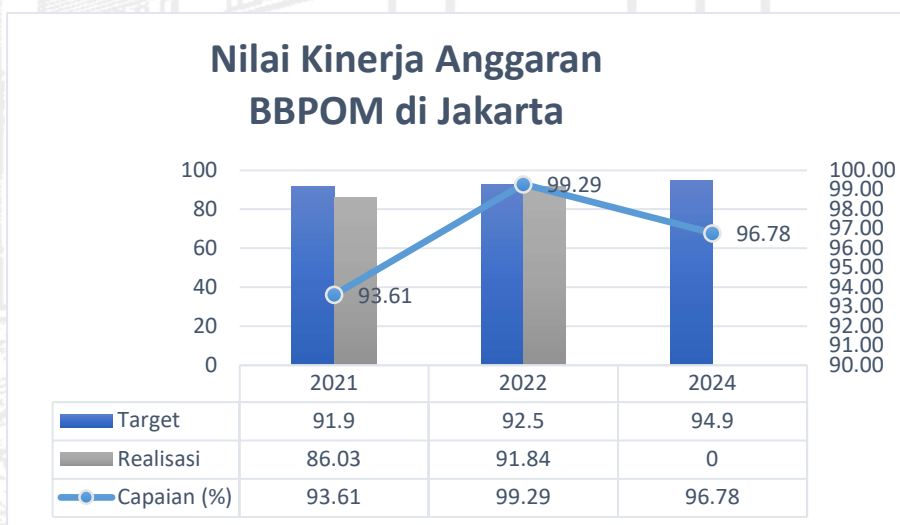
pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Adapun Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator sebagai berikut:

**Tabel 66.** Indikator nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

| Indikator                | Bobot  |
|--------------------------|--------|
| Penyerapan Anggaran      | 9,70%  |
| Konsistensi              | 18,20% |
| Capaian Realisasi Output | 43,50% |
| Efisiensi                | 28,60% |

## 29.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sejak tahun 2020. Realisasi NKA pada tahun 2022 mengalami kenaikan, namun masih belum masuk dalam kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” .



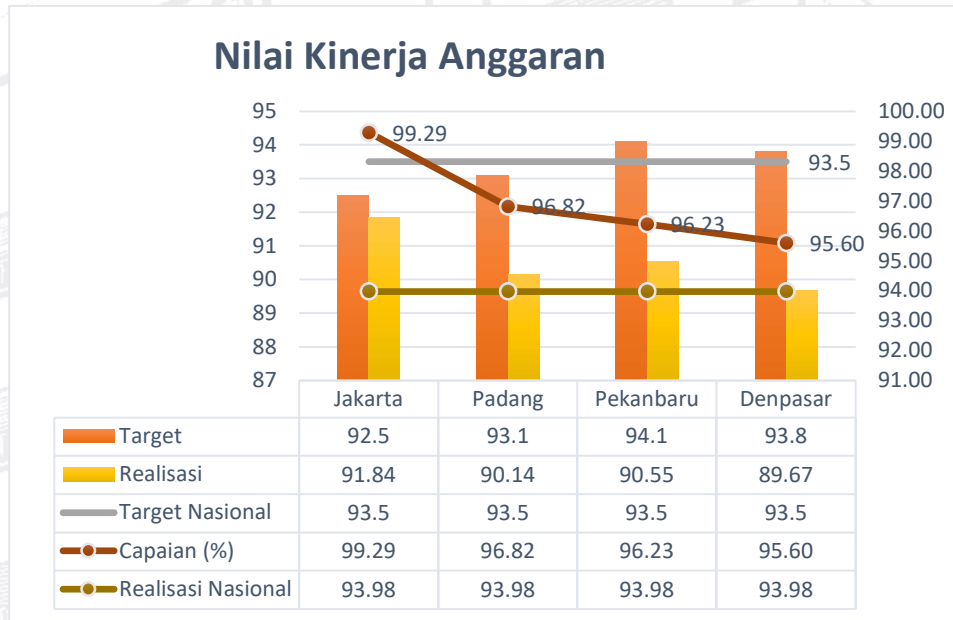
**Gambar 67.** Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 202

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta adalah 94,9. Dengan demikian, nilai NKA

tahun ini mencapai 99,29% . Upaya untuk meningkatkan nilai NKA dalam mencapai target akhir periode renstra terus dilakukan oleh BBPOM di Jakarta dengan mempertahankan nilai IKPA yang sudah cukup tinggi dan meningkatkan nilai EKA.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta mendukung indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan POM pada sasaran strategis “Terkelolanya keuangan Badan POM secara akuntabel” dalam rangka mencapai misi pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.

**29.3**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara



**Gambar 68.** Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi diraih oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan nilai 99,29, kemudian Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru dan terakhir adalah Balai Besar POM di Denpasar.

#### **29.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA (60%) dan nilai IKPA (40%). Proporsi nilai EKA lebih besar dibandingkan dengan nilai IKPA. Nilai kinerja anggaran tahun 2022 BBPOM di Jakarta mengalami peningkatan cukup signifikan, dan memperoleh peringkat tertinggi diantara Balai Besar-Balai POM di Indonesia berdasarkan monitoring dan evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Berdasarkan data, Nilai IKPA pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sudah cukup tinggi yaitu 94,70, 95,62 dan 97,07. Nilai IKPA cukup tinggi karena pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan secara optimal melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Nilai belanja kontraktual, revisi DIPA dan dispensasi SPM pada IKPA memperoleh nilai penuh karena dilakukan monitoring secara lebih ketat
2. Nilai deviasi halaman III DIPA mengalami kenaikan walaupun masih terdapat deviasi yang cukup besar pada belanja modal bulan Januari, Juni, dan Agustus yang disebabkan data anomali dan tidak terealisasinya pengadaan. Hal ini menyebabkan menurunnya/berkurangnya nilai Halaman III DIPA 3. Alternatif solusi terhadap halaman III DIPA yaitu memastikan realisasi dilaksanakan sesuai dengan jenis belanja pada periode yang ditetapkan serta melakukan penyesuaian Halaman III DIPA pada saat ada open periode.

Balai Besar POM di Jakarta belum dapat memaksimalkan nilai EKA, nilai yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 88,35. Nilai EKA terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi *output* dan tingkat efisiensi. Pada tahun ini, BBPOM Jakarta berhasil menyerap anggaran sebesar 99,73% dan capaian realisasi output 100%.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2022 tidak mencapai target karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya nilai efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya adalah jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian *Output* Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Tingkat efisiensi anggaran maksimal dapat dicapai bila efisiensi anggaran mencapai 20% berdasarkan rumus sebagai berikut:

Efisiensi anggaran Balai Besar POM di Jakarta hanya 0,63. Hal ini memperlihatkan bahwa hampir tidak ada selisih antara pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi anggaran. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dengan adanya efisiensi pada KRO EAA Layanan Perkantoran dan KRO QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga. Pada KRO EAA, terdapat sisa anggaran dan target RO tercapai. Pada KRO QIC, Realisasi *Output* melebihi target dengan capaian realisasi anggaran mendekati 100%. Dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi anggaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan lebih optimal sehingga dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dapat diperoleh hasil melebihi target.

Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Menurunkan selisih antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Bulanan (RPD) dengan melaksanakan pemutakhiran halaman III DIPA secara berkala setiap awal triwulan untuk meningkatkan nilai konsistensi dan deviasi halaman III DIPA;
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai output melebihi target dalam rangka meningkatkan nilai tingkat efisiensi;
3. Mengawal indikator lain yang merupakan komponen penyusun nilai IKPA dan EKA sehingga tetap mencapai nilai maksimal; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pencapaian nilai kinerja anggaran.

### **29.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Berikut ini adalah program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran:

1. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM;
2. Pengalihan beberapa kegiatan dari onsite menjadi daring, misal pengawasan sarana produksi dan distribusi sehingga mampu berkontribusi terhadap tingkat efisiensi Program Pengawasan dan Pengendalian Lembaga karena realisasi volume outputnya jauh melampaui target; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi output secara berkala

### **29.6 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan yaitu peningkatan komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi. Untuk itu telah dilaksanakan program evaluasi berkala setiap bulan membahas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut perbaikan dengan melibatkan seluruh pengelola kegiatan dan keuangan serta bagian pelaporan.

### **29.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.

### 3.14. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 anggaran adalah sebesar Rp 43.705.622.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2022 sebesar Rp 43.586.926.108 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu serratus delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,73%.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
3. Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
4. Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 67.** Realisasi Anggaran per sasaran strategis tahun 2022

| No | Sasaran Strategis   | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian input |
|----|---|-----------------|--------------------|---------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 1.049.183.800   | 1.033.618.314      | 98,52%        |

| No | Sasaran Strategis  | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian input |
|----|--|-----------------|--------------------|---------------|
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                     | 112.120.800     | 109.132.393        | 97,33%        |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta | 1.859.862.800   | 1.842.364.090      | 99,06%        |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta            | 802.363.400     | 796.863.952        | 99,31%        |
| 5  | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                       | 2.036.654.000   | 2.019.714.614      | 99,17%        |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                     | 449.650.200     | 442.979.277        | 98,52%        |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta                                 | 1.036.012.000   | 1.030.978.877      | 99,51%        |
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal  | 342.755.000     | 338.211.691        | 98,67%        |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal   | 23.184.820.000  | 22.901.275.271     | 98,78%        |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan  | 1.410.559.000   | 1.394.888.270      | 98,89%        |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel  | 342.755.000     | 338.211.691        | 98,67%        |

Rendahnya capaian anggaran di sasaran 2 “meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja

Balai Besar POM di Jakarta” terdampak kebijakan penanganan Pandemi COVID-19 (physical distancing, PSBB, dan WFH) sehingga penguji dan inspektur menghadapi kendala dalam proses pengujian dan pemeriksaan sarana. Menyikapi kondisi terkini terkait penyebaran COVID-19, seluruh instansi Pemerintah, termasuk Balai Besar POM di Jakarta, telah melakukan berbagai upaya antisipasi, khususnya dengan melakukan pembatasan sosial yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme *Work From Home* (WFH).

WFH berdampak terhadap proses kegiatan pengujian, pemeriksaan sarana, penindakan, KIE dan layanan pengawasan terhadap obat dan makanan, khususnya dalam hal penyampaian dokumen, pembahasan dan meeting lainnya yang diperlukan dalam proses kegiatan. Perubahan pola kerja karena WFH mungkin berdampak pada diperlukannya waktu tambahan, di samping peralatan dan sistem yang perlu dioptimalkan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai rencana yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.15. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing- masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

SE

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta

| No | Indikator                               | Output |       |       | Input (anggaran) |             |       | IE          | TE           | Capaian TE           |
|----|---|--------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------|
|    |   | T      | R     | %     | T                | R           | %     |             |              |                      |
| 1  | Persentase Obat yang memenuhi syarat    | 81,00  | 80,39 | 99,25 | 455.244.300      | 451.672.950 | 99,22 | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100%</b>          |
| 2  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 95,50  | 94,16 | 98,59 | 256.188.000      | 255.306.708 | 99,66 | <b>0,99</b> | <b>-0,01</b> | <b>Tidak Efisien</b> |

| No | Indikator   | Output |        |        | Input (anggaran) |               |       | IE   | TE    | Capaian TE    |
|----|---|--------|--------|--------|------------------|---------------|-------|------|-------|---------------|
|    |   | T      | R      | %      | T                | R             | %     |      |       |               |
| 3  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                    | 81,00  | 75,00  | 92,59  | 455.244.300      | 451.672.950   | 99,22 | 0,93 | -0,07 | Tidak Efisien |
| 4  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                 | 83,00  | 88,00  | 106,02 | 256.188.000      | 255.306.708   | 99,66 | 1,06 | 0,06  | 100%          |
| 5  | Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89,00  | 76,80  | 86,29  | 50.338.400       | 49.739.221    | 98,81 | 0,87 | -0,13 | Tidak Efisien |
| 6  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu              | 87,00  | 91,04  | 104,64 | 168.065.100      | 165.510.641   | 98,48 | 1,06 | 0,06  | 100%          |
| 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan   | 87,70  | 95,10  | 108,44 | 43.462.500       | 43.414.383    | 99,89 | 1,09 | 0,09  | 100%          |
| 8  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                   | 76,65  | 80,22  | 104,66 | 196.075.950      | 193.095.748   | 98,48 | 1,06 | 0,06  | 100%          |
| 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta                         | 91,00  | 96,03  | 105,53 | 3.069.000        | 3.065.625     | 99,89 | 1,06 | 0,06  | 100%          |
| 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan      | 90,00  | 102,83 | 114,26 | 309.634.250      | 307.879.352   | 99,43 | 1,15 | 0,15  | 100%          |
| 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan        | 79,00  | 79,93  | 101,18 | 316.632.000      | 314.721.257   | 99,40 | 1,02 | 0,02  | 100%          |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                              | 87,00  | 97,80  | 112,42 | 312.063.000      | 304.518.500   | 97,58 | 1,15 | 0,15  | 100%          |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                   | 63,00  | 71,31  | 113,19 | 135.006.000      | 133.652.515   | 99,00 | 1,14 | 0,14  | 100%          |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                 | 75,00  | 84,22  | 112,29 | 484.262.500      | 482.106.189   | 99,55 | 1,13 | 0,13  | 100%          |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta  | 4,30   | 4,72   | 109,77 | 196.075.950      | 193.095.748   | 98,48 | 1,11 | 0,11  | 100%          |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00  | 77     | 100,00 | 63.421.500       | 63.106.883    | 99,50 | 1,00 | 0,00  | 100%          |
| 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94,40  | 95,06  | 100,70 | 2.353.862.000    | 2.350.893.805 | 99,87 | 1,01 | 0,01  | 100%          |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 65,00  | 65     | 100,00 | 720.402.000      | 705.415.296   | 97,92 | 1,02 | 0,02  | 100%          |
| 19 | Jumlah desa pangan aman   | 21,00  | 21     | 100,00 | 1.046.723.000    | 1.041.629.690 | 99,51 | 1,00 | 0,00  | 100%          |

| No | Indikator   | Output |       |        | Input (anggaran) |                |       | IE   | TE    | Capaian TE    |
|----|---|--------|-------|--------|------------------|----------------|-------|------|-------|---------------|
|    |   | T      | R     | %      | T                | R              | %     |      |       |               |
| 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 3,00   | 3     | 100,00 | 111.008.100      | 109.885.560    | 98,99 | 1,01 | 0,01  | 100%          |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 100,00 | 99,52 | 99,52  | 390.209.400      | 387.148.243    | 99,22 | 1,00 | 0,00  | 100%          |
| 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 100,00 | 99,83 | 99,83  | 241.164.000      | 240.988.800    | 99,93 | 1,00 | 0,00  | Tidak Efisien |
| 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 58,00  | 60,39 | 104,13 | 1.267.408.000    | 1.250.400.000  | 98,66 | 1,06 | 0,06  | 100%          |
| 24 | Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta  | 83,40  | 89,98 | 107,89 | 283.344.000      | 280.709.958    | 99,07 | 1,09 | 0,09  | 100%          |
| 25 | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta   | 80,00  | 80,34 | 100,43 | 587.597.000      | 586.705.519    | 99,85 | 1,01 | 0,01  | 100%          |
| 26 | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta                           | 84,50  | 85,24 | 100,88 | 164.296.000      | 163.922.000    | 99,77 | 1,01 | 0,01  | 100%          |
| 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82,00  | 85,27 | 103,99 | 5.551.243.000    | 5.548.458.065  | 99,95 | 1,04 | 0,04  | 100%          |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal   | 2,25   | 2,88  | 128,00 | 18.234.000       | 16.532.735     | 90,67 | 1,41 | 0,41  | 92%           |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta                               | 92,50  | 91,84 | 99,29  | 27.076.660.000   | 27.045.407.206 | 99,88 | 0,99 | -0,01 | Tidak Efisien |

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras.

# BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2022 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 21 (dua puluh satu) indikator mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” ( $100\% < x < 120\%$ ); 7 (tujuh) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” yaitu ( $80\% < x < 100\%$ ); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”,

Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dengan jumlah anggaran BBPOM di Jakarta Rp43.705.622.000 pada triwulan IV tahun 2022 terealisasikan sebesar Rp43.586.926.108 dengan capaian 99,73%. BBPOM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap tahun sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA.

Secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022 dapat dicapai.

## **4.2. SARAN**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada periode berikutnya.

- 1) Monitoring dan evaluasi terus menerus akan dilakukan pada periode selanjutnya
- 2) Konsistensi revisi Halaman III Dipa yang perlu dikawal ketat
- 3) Melakukan optimalisasi kinerja agar semua target IKU tercapai
- 4) Membuat inovasi yang mendukung kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Jakarta  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Jakarta

| <b>Sasaran Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|--|---|---------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 81            |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 95.5          |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 81            |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 83            |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89            |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan                  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            | 87            |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 87.7          |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 76.65         |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT  | 91            |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 90            |

| <b>Sasaran Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|---|---|---------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 79            |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 87            |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 63            |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 75            |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik UPT   | 4.30          |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77            |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.4          |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 65            |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah desa pangan aman   | 21            |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 3             |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100           |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100           |

| <b>Sasaran Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|---|---|---------------|
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 58            |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Indeks RB UPT   | 83.4          |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Nilai AKIP UPT  | 80            |
| Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN UPT  | 84.5          |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82            |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2.25          |
| Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel  | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 92.5          |

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
45,606,169,000.00

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Jakarta  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Anggaran       |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------|
|     |   | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12   |                |
| 1.  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81    | 465.152.450,00 |
| 2.  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 95.5   | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5  | 298.193.000,00 |
| 3.  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   | 81    | 465.152.450,00 |
| 4.  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 83     | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83   | 83    | 298.193.000,00 |
| 5.  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89    | 50.898.400,00  |
| 6.  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 87    | 318.225.000,00 |
| 7.  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 87.7  | 46.325.000,00  |
| 8.  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 76.65 | 123.287.500,00 |
| 9.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 91    | 330.571.000,00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 90     | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90    | 396.496.750,00 |
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 79     | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79    | 396.496.750,00 |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 87     | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87    | 295.830.000,00 |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                 | 63     | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63    | 160.788.000,00 |



| No.          | Indikator Kinerja   | Target |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                          | Anggaran          |
|--------------|---|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------|
|              |   | B01    | B02 | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12                      |                   |
| 14.          | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 75     | 75  | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75                       | 632.205.500,00    |
| 15.          | Indeks Pelayanan Publik UPT   |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4,30                     | 371.262.500,00    |
| 16.          | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 3,3    | 6,7 | 23,3 | 30   | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 53,3 | 66,7 | 96,7 | 77                       | 85.159.000,00     |
| 17.          | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  |        |     | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4                     | 2.603.617.000,00  |
| 18.          | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   |        | 20  | 30   | 30   | 55   | 70   | 70   | 70   | 90   | 90   | 90   | 65                       | 767.240.000,00    |
| 19.          | Jumlah desa pangan aman   |        | 20  | 25   | 25   | 35   | 40   | 50   | 60   | 65   | 70   | 85   | 21                       | 1.097.149.000,00  |
| 20.          | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  |        | 5   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100                      | 398.702.100,00    |
| 21.          | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   |        | 5   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100                      | 277.407.600,00    |
| 22.          | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   |        | 5   | 10   | 15   | 20   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 58                       | 1.444.888.000,00  |
| 23.          | Indeks RB UPT   |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 83,4                     | 91.936.000,00     |
| 24.          | Nilai AKIP UPT  |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 80                       | 54.154.000,00     |
| 25.          | Indeks Profesionalitas ASN UPT  |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 84,5                     | 27.090.178.000,00 |
| 26.          | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP                           |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 82                       | 6.770.065.000,00  |
| 27.          | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal  |        |     | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25                     | 137.915.000,00    |
| 28.          | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 75     | 76  | 77   | 78   | 79   | 80   | 82   | 84   | 86   | 88   | 90   | 92,5                     | 28.600.000,00     |
| 29.          | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   |        | 25  | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 70   | 70   | 90   | 90   | 3                        | 110.081.000,00    |
| <b>Total</b> |   |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>45.606.169.000,00</b> |                   |

